



DI BALIK LAYAR PEMILU

Perjalanan Pengawas Ad Hoc
Kabupaten Lamongan Mengawal Demokrasi

Ahmad Sholikin | Yendra Erison | Nurul Laili

Editor: Toni Wijaya | Muttaqin

Di Balik Layar Pemilu

“Perjalanan Pengawas Ad Hoc Kabupaten Lamongan
Mengawal Demokrasi”

AHMAD SHOLIKIN

YENDRA ERISON

NURUL LAILI



Di Balik Layar Pemilu “Perjalanan Pengawas Ad Hoc Kabupaten Lamongan Mengawal Demokrasi”

Penulis:

Ahmad Sholikin

Yendra Erison

Nurul Laili

ISBN:

Dalam proses

Editor:

Toni Wijaya, Muttaqin

Penyunting:

Toni Wijaya, Muttaqin

Ukuran:

194 hlm, 18 x 25 cm

Desain Sampul dan Tata Letak:

Nurul Laili

Penerbit:**Redaksi**

Jl. Airlangga 03 Sukodadi Lamongan

Telp.(0322) 390497

Faks.0322-390929

Email: unisdapress@unisda.ac.id

Website: <https://unisdapress.unisda.ac.id/>

Cetakan Pertama, Januari, 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Kata Pengantar

Segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul "*Di Balik Layar Pemilu: Perjalanan Pengawas Ad Hoc Kabupaten Lamongan Mengawal Demokrasi*" ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai upaya mendokumentasikan pengalaman, dinamika, serta kontribusi para pengawas ad hoc yang menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas demokrasi di Kabupaten Lamongan.

Pemilu adalah salah satu pilar utama dalam kehidupan berdemokrasi. Namun, di balik pelaksanaan pemilu yang terlihat sederhana, terdapat proses panjang, kerja keras, dan dedikasi tinggi dari berbagai pihak, termasuk para pengawas ad hoc. Melalui buku ini, pembaca diajak menelusuri perjalanan para pengawas dalam mengawal proses demokrasi, mulai dari tantangan yang dihadapi di lapangan hingga pencapaian yang berhasil diraih.

Buku ini disusun tidak hanya untuk memberikan apresiasi kepada para pengawas ad hoc, tetapi juga sebagai bentuk refleksi dan pembelajaran bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Kami berharap, buku ini dapat menjadi inspirasi bagi para pembaca, khususnya bagi generasi muda, untuk terus berkontribusi dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Kepada para pengawas ad hoc, penulis, dan semua pihak

yang telah memberikan dukungan moral maupun material, kami haturkan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi salah satu langkah kecil dalam upaya memajukan demokrasi di tanah air.

Lamongan, Januari 2025

Penyusun

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vi
PROLOG	viii
BAGIAN 1	1
PENDAHULUAN	1
1. Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Lamongan...	1
2. Signifikansi dan Relevansi.....	5
3. Gambaran Umum Pemilu di Kabupaten Lamongan	9
4. Metode Penelitian	15
5. Sumber Data.....	18
6. Analisis Data	19
7. Batasan Penelitian	20
BAGIAN 2	22
SDM DAN ORGANISASI BAWASLU KABUPATEN LAMONGAN	22
1. Bawaslu Kabupaten Lamongan	22
2. Komisioner Bawaslu Kabupaten Lamongan (Periode 2023-2028)	26
BAGIAN 3	36
SDM DAN ORGANISASI PENGAWAS AD HOC.	36
1. Panwaslu Kecamatan	36
2. Panwaslu Kelurahan	50
3. Pengawas Tps Pembentukan Dan Keberadaannya.....	57
4. Pembinaan SDM	62
5. Program Dan Kegiatan Panwaslu Kecamatan.....	90
BAGIAN 4	120
KERJA PENGAWAS PEMILU AD HOC.....	120
1. Pencegahan	120
2. Kerja Pengawasan	129
3. Kerja Penanganan Pelanggaran	135
4. Kerja Penyelesaian Sengketa	136
BAGIAN 5	143
KONTRIBUSI PENGAWAS AD HOC DALAM MENJAGA DEMOKRASI	143

1. Peran Pengawas Ad Hoc dalam Pemilu di Kabupaten Lamongan	143
2. Pengawas Ad Hoc di Kabupaten Lamongan sebagai Pilar Demokrasi Lokal	148
3. Pencapaian dan Prestasi Pengawas Ad Hoc di Kabupaten Lamongan	155
4. Dampak terhadap Kualitas Demokrasi di Kabupaten Lamongan	161
BAGIAN 6	169
EVALUASI DAN REKOMENDASI	169
1. Evaluasi Bawaslu Kabupaten Lamongan	169
2. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lamongan	172
EPILOG	177
DAFTAR PUSTAKA	181

PROLOG

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Shalom, Om Shanti shanti oom, Namó Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua.

"Di Balik Layar Pemilu: Perjalanan Pengawas Ad Hoc Kabupaten Lamongan Mengawal Demokrasi"

Pemilihan umum (Pemilu) adalah momentum krusial dalam perjalanan demokrasi sebuah bangsa. Di dalamnya, suara rakyat menjadi tonggak utama untuk menentukan pemimpin dan arah kebijakan negara. Namun, apa yang terlihat di permukaan sering kali hanya hasil akhir dari kerja panjang yang melibatkan berbagai pihak. Salah satu aktor penting yang jarang mendapat perhatian adalah para pengawas ad hoc—mereka yang berada di garda terdepan untuk memastikan Pemilu berlangsung jujur, adil, dan transparan. Pengawas ad hoc memikul tanggung jawab yang tidak ringan. Dengan waktu yang terbatas, sumber daya yang serba minimal, serta tekanan dari berbagai pihak, mereka berjuang mengawal proses demokrasi hingga ke pelosok-pelosok daerah. Di Kabupaten Lamongan, tugas ini menjadi semakin kompleks karena karakteristik wilayah yang beragam, mulai dari daerah pesisir hingga pedalaman. Tantangan geografis dan sosial menjadi ujian tersendiri yang harus dihadapi dengan kesungguhan hati.

Buku ini adalah upaya untuk mengabadikan kisah perjuangan tersebut. Sebuah perjalanan panjang yang tidak hanya berisi tugas administratif atau teknis, tetapi juga menyuguhkan kisah humanis di balik layar Pemilu. Melalui pengalaman-pengalaman ini, pembaca diajak memahami betapa besarnya peran pengawas ad hoc dalam menjaga integritas Pemilu, meski sering kali mereka bekerja dalam sunyi tanpa sorotan publik. Di balik tugas yang tampak formal, pengawas ad hoc menghadapi tantangan nyata di lapangan. Dari laporan pelanggaran yang harus diusut secara cermat hingga menghadapi tekanan dari oknum tertentu yang mencoba menggoyahkan proses demokrasi. Mereka kerap harus mengambil keputusan sulit dalam waktu singkat, dengan mempertaruhkan kenyamanan, bahkan keamanan pribadi mereka.

Kabupaten Lamongan menawarkan dinamika tersendiri dalam pelaksanaan Pemilu. Sebagai daerah dengan keunikan geografis dan sosial, Lamongan memiliki tantangan spesifik yang tidak ditemui di tempat lain. Misalnya, upaya pengawasan di daerah pesisir dengan aksesibilitas terbatas atau menjangkau komunitas pedesaan dengan budaya yang sangat khas. Semua ini membutuhkan kecerdasan, kesabaran, dan kreativitas pengawas ad hoc dalam menjalankan tugasnya. Selain tantangan fisik, pengawas ad hoc juga menghadapi dilema moral dan tekanan emosional. Ketika pelanggaran ditemukan, mereka tidak hanya

bertindak sebagai pengawas, tetapi juga penegak keadilan. Dalam kondisi tertentu, mereka harus menghadapi pihak-pihak yang lebih berkuasa atau memiliki pengaruh besar di masyarakat. Situasi ini sering kali menempatkan mereka dalam posisi yang serba sulit, antara menjaga integritas dan menjaga hubungan sosial.

Buku ini juga berupaya mengungkap sisi lain yang jarang diketahui publik—bagaimana mereka yang bekerja di balik layar ini menjaga semangat meski dihadapkan pada keterbatasan. Dengan anggaran yang sering kali terbatas, fasilitas minim, dan dukungan yang tidak selalu memadai, para pengawas ad hoc tetap menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Mereka bekerja tidak hanya untuk menyukseskan Pemilu, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi itu sendiri. Lewat narasi ini, kita diajak untuk merenungkan kembali nilai-nilai yang seharusnya ada dalam setiap Pemilu. Kejujuran, keadilan, dan transparansi tidak akan terwujud tanpa adanya pengawas yang bekerja dengan penuh integritas. Kisah-kisah dalam buku ini menjadi bukti nyata bahwa pengabdian yang tulus dapat menjadi fondasi yang kuat bagi keberlangsungan demokrasi.

Semoga buku ini tidak hanya menjadi dokumentasi perjalanan para pengawas ad hoc di Kabupaten Lamongan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Demokrasi bukan hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga

tentang menjaga nilai-nilai luhur yang ada di dalamnya. Dengan memahami perjuangan mereka yang berada di balik layar, kita diajak untuk lebih menghargai proses Pemilu dan terus berkomitmen menjaga integritas demokrasi. Selamat membaca, dan semoga kisah ini menjadi cermin bagi kita semua untuk selalu menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran.

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Pendidikan Pelatihan Bawaslu.

Muttaqin

BAGIAN 1

PENDAHULUAN

1. Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Kabupaten Lamongan

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu pilar utama demokrasi yang menjadi wujud nyata dari kedaulatan rakyat. Dalam proses ini, masyarakat memiliki hak untuk memilih pemimpin yang akan menentukan arah kebijakan negara di masa depan. Pemilu bukan hanya sekadar ritual politik, tetapi juga merupakan sarana untuk mewujudkan pemerintahan yang legitimate dan representatif. Namun, keberhasilan Pemilu tidak hanya bergantung pada proses pemungutan suara semata, tetapi juga pada pengawasan yang efektif untuk memastikan kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam setiap tahapannya.

Kabupaten Lamongan, sebagai salah satu wilayah di Indonesia, memiliki tantangan tersendiri dalam menyelenggarakan Pemilu yang berkualitas. Wilayah ini memiliki karakteristik sosial, budaya, dan geografis yang beragam, mulai dari daerah pesisir hingga pedalaman, yang memengaruhi dinamika pelaksanaan Pemilu. Selain itu, kompleksitas permasalahan seperti politik uang, intimidasi, dan pelanggaran administrasi menjadi tantangan besar yang harus dihadapi. Di sinilah peran pengawas ad hoc menjadi sangat penting sebagai garda terdepan dalam menjaga integritas demokrasi.

Pengawas ad hoc, yang terdiri dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), dan

Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), adalah elemen penting dalam struktur pengawasan Pemilu. Mereka bekerja di lapangan untuk memastikan bahwa setiap tahap Pemilu berjalan sesuai dengan aturan. Meski memiliki peran strategis, pengawas ad hoc sering kali bekerja dalam kondisi yang penuh tantangan, baik dari segi sumber daya, dukungan, maupun tekanan sosial. Hal ini mencerminkan betapa besar tanggung jawab yang mereka emban dalam menjaga demokrasi.

Dalam konteks Kabupaten Lamongan, pengawas ad hoc menghadapi berbagai tantangan yang khas. Wilayah yang terdiri dari 27 kecamatan dan ratusan desa/kelurahan ini memiliki dinamika sosial yang unik. Tantangan geografis, seperti wilayah pesisir yang sulit dijangkau, memerlukan strategi khusus dalam pengawasan. Selain itu, tingkat pendidikan masyarakat yang beragam juga memengaruhi pemahaman mereka terhadap hak dan kewajiban sebagai pemilih. Situasi ini sering kali memerlukan upaya ekstra dari pengawas ad hoc untuk memberikan edukasi dan memastikan partisipasi masyarakat yang maksimal.

Politik uang menjadi salah satu isu utama yang dihadapi oleh pengawas ad hoc di Kabupaten Lamongan. Praktik ini tidak hanya mencederai integritas Pemilu, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Pengawas ad hoc memiliki tugas berat untuk mendeteksi, mencegah, dan menindaklanjuti praktik-praktik semacam ini. Dalam situasi tertentu, mereka juga harus menghadapi tekanan dari oknum-oknum yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak

langsung. Tantangan ini menguji integritas dan keberanian para pengawas ad hoc.

Selain politik uang, isu lainnya adalah intimidasi terhadap pemilih maupun pengawas. Dalam beberapa kasus, pengawas ad hoc dihadapkan pada situasi yang memerlukan keberanian ekstra untuk menjalankan tugas mereka. Mereka harus tetap netral dan tegas dalam menghadapi berbagai tekanan, baik dari masyarakat, peserta Pemilu, maupun pihak lain yang berkepentingan. Meski demikian, dedikasi para pengawas ad hoc tetap menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga proses Pemilu tetap berjalan sesuai aturan.

Dalam pelaksanaan Pemilu, Bawaslu Kabupaten Lamongan berperan sebagai koordinator utama dalam pengawasan. Bawaslu bertugas mengatur, memantau, dan memberikan arahan kepada pengawas ad hoc agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu, Bawaslu juga bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti KPU, aparat keamanan, dan organisasi masyarakat sipil, untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan Pemilu. Kolaborasi ini sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul selama proses Pemilu.

Pada Pemilu 2024, Kabupaten Lamongan akan menghadapi dinamika yang lebih kompleks seiring dengan bertambahnya jumlah pemilih yang terdaftar. Berdasarkan data terbaru, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Lamongan mencapai lebih dari 1 juta jiwa, yang tersebar di ratusan desa dan

ribuan TPS. Pemilu 2024 juga akan melibatkan berbagai jenis pemilihan, mulai dari Pemilihan Presiden, Pemilihan Anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten/Kota. Dengan kompleksitas ini, pengawasan menjadi lebih penting untuk memastikan tidak ada pelanggaran pada setiap tahap.

Selain itu, Pemilu 2024 di Kabupaten Lamongan juga melibatkan sekitar 7.000 pengawas ad hoc, termasuk Panwascam, PKD, dan PTPS. Pengawas ini akan dilatih secara intensif untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengidentifikasi, melaporkan, dan menangani berbagai pelanggaran Pemilu. Pelatihan tersebut meliputi pemahaman terhadap regulasi Pemilu, teknik investigasi, hingga manajemen konflik di lapangan.

Bawaslu Kabupaten Lamongan juga memperkenalkan inovasi digital untuk mendukung pengawasan Pemilu 2024. Salah satunya adalah penggunaan aplikasi pelaporan digital yang memungkinkan pengawas di lapangan melaporkan pelanggaran secara real-time. Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, sekaligus memberikan akses yang lebih transparan bagi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran.

Buku ini hadir sebagai upaya untuk mengangkat kisah para pengawas ad hoc di Kabupaten Lamongan yang sering kali bekerja dalam senyap tanpa sorotan publik. Perjalanan mereka tidak hanya mencerminkan dedikasi, tetapi juga perjuangan yang penuh tantangan dalam menjaga nilai-nilai demokrasi. Dari proses pengawasan di TPS hingga investigasi pelanggaran,

setiap langkah yang mereka ambil adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil.

Melalui buku ini, pembaca diajak untuk memahami realitas di balik layar Pemilu. Tidak hanya tentang aturan dan prosedur, tetapi juga tentang manusia-manusia biasa yang mengabdikan diri untuk kepentingan bangsa. Kisah-kisah dalam buku ini memberikan gambaran tentang perjuangan, integritas, dan komitmen yang luar biasa dari para pengawas ad hoc. Semoga buku ini tidak hanya menjadi dokumentasi perjalanan mereka, tetapi juga menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus menjaga nilai-nilai demokrasi yang kita junjung bersama.

2. Signifikansi dan Relevansi

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan elemen kunci dalam sistem demokrasi yang menjamin kedaulatan rakyat. Melalui Pemilu, masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara langsung dalam menentukan arah kebijakan negara, baik di tingkat lokal maupun nasional. Namun, keberhasilan Pemilu tidak hanya diukur dari hasil akhirnya, melainkan juga dari proses pelaksanaannya yang mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan partisipasi yang inklusif. Oleh karena itu, pengawasan Pemilu menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga kualitas demokrasi.

Dalam konteks Kabupaten Lamongan, signifikansi pengawasan Pemilu dapat dilihat dari peran strategisnya dalam memastikan bahwa setiap suara yang diberikan oleh masyarakat dihitung dengan jujur dan adil. Sebagai daerah dengan populasi

lebih dari satu juta jiwa yang tersebar di berbagai wilayah geografis, Lamongan menghadapi tantangan unik dalam pelaksanaan Pemilu. Keberagaman sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat memengaruhi dinamika politik lokal, sehingga pengawasan yang ketat menjadi sangat relevan untuk mencegah potensi pelanggaran.

Pengawas ad hoc, yang meliputi Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Pengawas Kelurahan/Desa (PKD), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), memiliki posisi sentral dalam struktur pengawasan Pemilu. Mereka adalah ujung tombak yang langsung berinteraksi dengan proses di lapangan. Peran mereka tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi Pemilu, tetapi juga melibatkan pemberdayaan masyarakat untuk memahami hak-hak mereka sebagai pemilih. Dalam konteks ini, kehadiran pengawas ad hoc sangat signifikan dalam menciptakan Pemilu yang berintegritas.

Relevansi pengawasan Pemilu di Kabupaten Lamongan juga tercermin dalam upaya mencegah dan menangani praktik-praktik yang mencederai demokrasi, seperti politik uang, manipulasi suara, dan intimidasi. Tantangan-tantangan ini tidak hanya merusak kredibilitas Pemilu tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif sangat relevan untuk memastikan bahwa Pemilu menjadi sarana yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat.

Dalam Pemilu 2024, pengawasan menjadi semakin relevan mengingat kompleksitas proses dan meningkatnya jumlah pemilih yang terdaftar. Berdasarkan data terbaru, Kabupaten Lamongan memiliki lebih dari 1 juta pemilih yang tersebar di ribuan TPS. Selain itu, Pemilu 2024 melibatkan berbagai jenis pemilihan, mulai dari Pemilihan Presiden hingga anggota legislatif di berbagai tingkatan. Kompleksitas ini menuntut pengawas Pemilu untuk bekerja lebih keras dalam mengawasi setiap tahapan, mulai dari pendaftaran calon, masa kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan dan rekapitulasi suara.

Keberadaan teknologi digital dalam Pemilu 2024 juga menambah dimensi baru dalam pengawasan. Di Kabupaten Lamongan, Bawaslu telah memperkenalkan sistem pelaporan digital yang memungkinkan pengawas ad hoc melaporkan pelanggaran secara real-time. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan. Dengan demikian, pengawas Pemilu memiliki alat yang lebih efektif untuk menjalankan tugas mereka, menjadikan peran mereka semakin signifikan dalam menjaga integritas Pemilu.

Di sisi lain, relevansi pengawasan Pemilu juga berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dalam beberapa wilayah di Kabupaten Lamongan, tingkat partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan, terutama di daerah pedesaan yang memiliki akses informasi terbatas. Pengawas ad hoc tidak hanya bertugas mengawasi tetapi juga memberikan

edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan hak pilih mereka secara bertanggung jawab. Dengan cara ini, pengawasan Pemilu tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga proaktif dalam mendorong partisipasi yang lebih luas.

Selain itu, keberadaan pengawas Pemilu memiliki dampak jangka panjang terhadap penguatan demokrasi lokal. Dengan memastikan bahwa Pemilu berjalan sesuai aturan, pengawas membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses politik. Hal ini penting untuk menciptakan budaya demokrasi yang sehat, di mana masyarakat merasa bahwa suara mereka benar-benar diperhitungkan. Dalam jangka panjang, kepercayaan ini akan mendorong partisipasi yang lebih aktif dalam proses politik, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Signifikansi dan relevansi pengawasan Pemilu juga terlihat dari tantangan yang dihadapi dalam menegakkan aturan. Kabupaten Lamongan, seperti wilayah lain di Indonesia, tidak lepas dari tekanan-tekanan politik yang dapat memengaruhi independensi pengawas. Oleh karena itu, diperlukan integritas dan profesionalisme yang tinggi dari setiap pengawas ad hoc untuk menghadapi tekanan tersebut. Pelatihan yang diberikan kepada pengawas sebelum Pemilu menjadi sangat penting dalam membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugas secara efektif.

Dalam buku ini, kisah-kisah para pengawas ad hoc di Kabupaten Lamongan akan diangkat untuk memberikan

gambaran yang lebih mendalam tentang perjuangan mereka dalam mengawal demokrasi. Dari tantangan teknis hingga dilema moral, setiap cerita mencerminkan betapa pentingnya peran mereka dalam memastikan Pemilu berjalan dengan jujur dan adil. Dengan memahami signifikansi dan relevansi pengawasan Pemilu, diharapkan pembaca dapat lebih menghargai upaya yang dilakukan oleh para pengawas ad hoc serta pentingnya peran mereka dalam menjaga nilai-nilai demokrasi.

Buku ini juga menjadi pengingat bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja, tetapi memerlukan kerja keras dan komitmen dari semua pihak. Melalui pengawasan yang efektif, Pemilu dapat menjadi sarana yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat, memperkuat legitimasi pemerintahan, dan membangun kepercayaan publik. Semoga buku ini dapat menginspirasi pembaca untuk terus mendukung upaya penguatan demokrasi, baik melalui partisipasi langsung maupun dengan menghargai kerja keras para pengawas Pemilu yang berada di garis depan.

3. Gambaran Umum Pemilu di Kabupaten Lamongan

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 merupakan salah satu peristiwa politik yang paling dinantikan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Sebagai bagian integral dari proses demokrasi, Pemilu menjadi ajang bagi masyarakat untuk memilih para pemimpin dan wakil rakyat yang akan menentukan arah kebijakan dalam lima tahun ke depan. Kabupaten Lamongan, dengan jumlah penduduk yang signifikan dan

dinamika sosial politiknya, memiliki peran strategis dalam pelaksanaan Pemilu ini.

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Kabupaten Lamongan terletak di pesisir utara Pulau Jawa, di antara 6°51' hingga 7°23' Lintang Selatan dan 112°03' hingga 112°33' Bujur Timur. Wilayahnya berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, Kabupaten Tuban di sebelah barat, Kabupaten Gresik di sebelah timur, serta Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang di sebelah selatan. Luas wilayah Kabupaten Lamongan mencapai 1.812,8 km², yang terbagi menjadi 27 kecamatan dan 474 desa/kelurahan.

Secara umum, wilayah Kabupaten Lamongan didominasi oleh daratan, dengan sebagian wilayah berupa dataran rendah yang produktif untuk pertanian. Di sisi lain, pesisir utara Lamongan merupakan kawasan penting bagi sektor perikanan dan pariwisata, dengan ikon wisata seperti Wisata Bahari Lamongan (WBL). Kabupaten ini memiliki iklim tropis dengan dua musim utama, yaitu musim penghujan yang biasanya berlangsung dari Oktober hingga Maret, dan musim kemarau dari April hingga September. Dinamika kehidupan masyarakatnya yang agraris dan religius memberikan warna tersendiri dalam pelaksanaan Pemilu 2024.

lebih dari satu juta jiwa, Lamongan memiliki potensi suara yang cukup besar. Dinamika politik di wilayah ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk keberagaman etnis, agama, dan tingkat pendidikan masyarakat. Dalam menghadapi Pemilu 2024, persiapan demi persiapan terus dilakukan. Setiap langkah dirancang untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan dengan baik, mulai dari pendaftaran pemilih hingga distribusi logistik ke tempat-tempat pemungutan suara. Kabupaten Lamongan, dengan topografi yang beragam, menghadapi tantangan tersendiri, terutama dalam menjangkau daerah-daerah terpencil. Namun, semangat demokrasi tetap terlihat jelas di masyarakatnya yang berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pra-Pemilu.

Di Kabupaten Lamongan, partisipasi masyarakat dalam Pemilu merupakan salah satu indikator keberhasilan demokrasi. Sebelumnya, tingkat partisipasi di wilayah ini tergolong tinggi, mencerminkan kesadaran politik yang kuat di kalangan masyarakat. Pada Pemilu kali ini, antusiasme tampaknya tidak berkurang. Berbagai pihak telah menggalang kampanye dan sosialisasi, dengan harapan dapat meningkatkan partisipasi, terutama dari kalangan pemilih muda.

Lamongan dikenal sebagai daerah yang religius, di mana tokoh agama memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat. Para tokoh ini sering kali menjadi penggerak utama untuk mengajak warga berpartisipasi dalam Pemilu. Mereka tidak hanya mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya,

tetapi juga mengedukasi pentingnya memilih pemimpin yang mampu membawa perubahan positif bagi daerah. Generasi muda juga menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan. Banyak komunitas pemuda yang aktif dalam kampanye, membuktikan bahwa demokrasi di Lamongan hidup dan berkembang.

Dinamika politik di Kabupaten Lamongan selalu menarik untuk diikuti. Di tengah persaingan antarpolitical politik, muncul figur-figur baru yang membawa harapan dan inovasi. Partai-partai besar seperti PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, dan Partai Golkar terus berusaha memperkuat basis massa mereka di wilayah ini. Kampanye yang dilakukan pun tak jarang menampilkan pendekatan yang lebih personal, menysasar kebutuhan spesifik masyarakat lokal.

Salah satu daya tarik Pemilu di Lamongan adalah munculnya calon-calon legislatif yang berasal dari kalangan muda dan perempuan. Kehadiran mereka membawa angin segar dalam dinamika politik lokal. Mereka menawarkan visi pembangunan yang lebih inklusif, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat dan pemanfaatan potensi lokal. Tidak hanya itu, isu-isu strategis seperti peningkatan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi juga menjadi tema utama dalam berbagai kampanye.

Meski semangat demokrasi di Kabupaten Lamongan tinggi, pelaksanaan Pemilu di wilayah ini tidak lepas dari berbagai tantangan. Geografis yang beragam, dengan banyak desa

terpencil, menjadi salah satu hambatan utama dalam distribusi logistik Pemilu. Namun, pemerintah daerah dan KPU setempat telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah ini, termasuk dengan memanfaatkan teknologi dan memperkuat koordinasi dengan aparat setempat.

Selain tantangan logistik, praktik politik uang dan penyebaran informasi hoaks juga menjadi perhatian serius. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial, penyebaran hoaks dapat dengan cepat memengaruhi opini publik. Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Lamongan telah meningkatkan pengawasan dan melakukan kampanye edukasi untuk melawan hoaks dan meningkatkan literasi digital masyarakat.

Keamanan dan ketertiban juga menjadi prioritas. Meski secara umum Lamongan dikenal sebagai daerah yang damai, potensi konflik tetap ada, terutama di wilayah-wilayah dengan persaingan politik yang ketat. Aparat keamanan telah bersiaga untuk memastikan bahwa proses Pemilu berjalan lancar tanpa gangguan berarti.

Pemilu 2024 di Kabupaten Lamongan diharapkan menjadi tonggak penting dalam perjalanan demokrasi lokal. Partisipasi aktif masyarakat dan komitmen semua pihak diharapkan mampu menghasilkan pemimpin yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat. Para pemimpin yang terpilih diharapkan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Kabupaten Lamongan memiliki potensi besar, baik dari segi sumber daya manusia maupun alam. Dengan kepemimpinan yang tepat, daerah ini dapat tumbuh menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial di Jawa Timur. Pemilu ini tidak hanya menjadi ajang untuk memilih pemimpin, tetapi juga kesempatan bagi masyarakat untuk menentukan masa depan mereka sendiri.

Pemilu 2024 di Kabupaten Lamongan adalah momen penting yang akan menentukan arah pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan. Dengan persiapan yang matang, antusiasme masyarakat, dan pengawasan yang ketat, proses demokrasi ini diharapkan berjalan lancar, jujur, dan adil. Kabupaten Lamongan siap menunjukkan bahwa demokrasi bukan sekadar proses politik, tetapi juga sebuah perayaan kebersamaan dan komitmen untuk masa depan yang lebih baik.

4. Metode Penelitian

Metode penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi berbagai aspek pengawasan pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lamongan. Fokus utama penelitian adalah memahami bagaimana Bawaslu Kabupaten Lamongan melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memastikan demokrasi yang bersih dan transparan, serta mengeksplorasi peran pengawas ad hoc dalam mendukung pengawasan pemilu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang terjadi di

lapangan terkait pelaksanaan pengawasan pemilu dan kontribusi pengawas ad hoc dalam memperkuat demokrasi di Kabupaten Lamongan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang pelaksanaan pengawasan pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Lamongan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan fleksibilitas dalam mengeksplorasi secara rinci proses, kebijakan, serta praktik yang dijalankan oleh Bawaslu dan pengawas ad hoc dalam menjaga keberlangsungan pemilu yang adil dan transparan.

Pendekatan deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan berbagai fenomena yang berkaitan dengan proses pengawasan pemilu di Kabupaten Lamongan, termasuk kontribusi pengawas ad hoc dalam mencapai tujuan pengawasan. Pendekatan ini membantu peneliti menguraikan secara rinci langkah-langkah yang diambil oleh Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan. Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi, pencapaian yang diraih, serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di masa mendatang.

Penelitian ini dilakukan dalam konteks pengawasan pemilu di Kabupaten Lamongan, sebuah wilayah dengan dinamika sosial-politik yang khas. Dengan jumlah penduduk yang relatif besar dan beragam, Kabupaten Lamongan menghadapi

berbagai tantangan dalam pelaksanaan pemilu, termasuk potensi konflik, pelanggaran aturan pemilu, dan kebutuhan akan partisipasi aktif dari masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu menjadi krusial dalam memastikan keberlangsungan pemilu yang demokratis dan transparan.

Penelitian ini juga mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan tugas oleh pengawas ad hoc yang berperan sebagai ujung tombak dalam pengawasan di tingkat lokal. Pengawas ad hoc, seperti panitia pengawas kecamatan (Panwascam) dan pengawas di tingkat desa, memiliki tanggung jawab penting dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya pelanggaran selama proses pemilu. Studi ini mengeksplorasi bagaimana pengawas ad hoc tersebut berkoordinasi dengan Bawaslu dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mencapai tujuan pengawasan.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pengawasan pemilu, khususnya di Kabupaten Lamongan. Dengan memahami secara mendalam praktik pengawasan yang ada, penelitian ini akan memberikan rekomendasi strategis yang dapat digunakan oleh Bawaslu dalam menyusun kebijakan dan program pengawasan di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini juga relevan bagi pengembangan sistem pengawasan yang lebih efektif dan efisien, baik di tingkat kabupaten maupun nasional.

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat penting, baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai pengawasan pemilu di

Indonesia, khususnya yang dilakukan oleh Bawaslu dan pengawas ad hoc. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para pemangku kepentingan dalam meningkatkan kualitas pengawasan pemilu. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi masyarakat luas, terutama dalam meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya partisipasi aktif dalam menjaga pemilu yang bersih dan adil. Dengan pemaparan yang lebih mendalam ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai pengawasan pemilu di Kabupaten Lamongan dan menjadi dasar untuk perbaikan yang berkelanjutan di masa depan.

5. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, seperti komisioner Bawaslu Kabupaten Lamongan, pengawas ad hoc, dan masyarakat yang turut terlibat dalam proses pemilu di Kabupaten Lamongan. Wawancara dilakukan dengan pendekatan semi-terstruktur untuk memberikan kebebasan kepada responden dalam menjelaskan pengalaman dan pandangan mereka secara mendalam, khususnya terkait dengan pelaksanaan pengawasan pemilu.

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan analisis dokumen-dokumen resmi, seperti laporan tahunan Bawaslu Kabupaten Lamongan dan materi lainnya yang relevan dengan pengawasan pemilu. Data sekunder ini

digunakan untuk melengkapi dan mendukung temuan yang diperoleh dari wawancara dan observasi, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pengawasan pemilu di Kabupaten Lamongan.

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik yang saling melengkapi. Teknik wawancara digunakan untuk mendalami pengalaman dan pandangan para informan kunci, termasuk komisioner Bawaslu, pengawas ad hoc, dan masyarakat yang berperan aktif dalam proses pengawasan. Pendekatan semi-terstruktur yang diterapkan dalam wawancara memungkinkan responden berbagi informasi secara terbuka mengenai tantangan, keberhasilan, dan peran mereka dalam menjaga demokrasi. Observasi langsung juga dilakukan untuk memahami dinamika pelaksanaan pengawasan pemilu di lapangan, termasuk interaksi antara pengawas ad hoc dengan masyarakat dan lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam proses tersebut. Selain itu, dokumentasi menjadi bagian integral dalam pengumpulan data, di mana dokumen-dokumen seperti laporan kegiatan, program pengawasan, dan materi pelatihan pengawas ad hoc dianalisis untuk memperkaya temuan penelitian.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul, proses analisis dilakukan dengan teknik kualitatif dan pendekatan deskriptif. Tahap pertama dalam analisis adalah reduksi data, di mana informasi yang relevan diorganisasi dan disaring untuk menghilangkan data yang tidak berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Informasi yang telah

direduksi kemudian dikelompokkan ke dalam kategori tertentu berdasarkan tema-tema yang muncul selama proses pengumpulan data, sehingga memudahkan dalam memahami pola-pola fenomena yang diteliti.

Pada tahap berikutnya, data yang telah dikategorikan diinterpretasikan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan pengawasan pemilu di Kabupaten Lamongan. Proses interpretasi ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menarik kesimpulan terkait efektivitas program pengawasan dan kontribusi pengawas ad hoc dalam menjaga kualitas demokrasi. Hasil dari analisis tersebut disusun dalam laporan penelitian yang menggambarkan temuan secara detail, termasuk rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu di masa mendatang.

7. Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Fokus penelitian terbatas pada pengawasan pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Lamongan dan pengawas ad hoc di tingkat kabupaten, sehingga hasilnya mungkin tidak sepenuhnya dapat diterapkan pada konteks wilayah lain. Selain itu, penelitian ini hanya mencakup periode pelaksanaan pemilu tertentu, sehingga tidak mencerminkan pengawasan yang dilakukan di luar periode tersebut.

Meskipun memiliki batasan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai upaya

pengawasan pemilu di Kabupaten Lamongan. Temuan-temuan yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi penting bagi perbaikan sistem pengawasan pemilu di masa mendatang, termasuk penguatan kapasitas pengawas ad hoc dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga demokrasi yang bersih, adil, dan transparan.

BAGIAN 2

SDM DAN ORGANISASI BAWASLU KABUPATEN LAMONGAN

1. Bawaslu Kabupaten Lamongan

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lamongan merupakan lembaga independen yang bertugas memastikan integritas, keadilan, dan transparansi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) di tingkat kabupaten. Sebagai bagian dari sistem pengawasan nasional di bawah Bawaslu RI, lembaga ini memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi di wilayah Kabupaten Lamongan melalui berbagai tugas dan fungsinya.

Bawaslu Kabupaten Lamongan bertanggung jawab mengawasi seluruh tahapan Pemilu, termasuk pemilu legislatif, pilkada, dan pemilu presiden. Tugas ini mencakup pengawasan pada proses pencalonan, masa kampanye, pemungutan suara, hingga penghitungan suara. Dengan memastikan setiap tahapan berlangsung sesuai peraturan yang berlaku, Bawaslu berupaya menciptakan Pemilu yang adil, jujur, dan bebas dari kecurangan. Selain itu, Bawaslu memiliki wewenang untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang terjadi di wilayahnya dengan cara menerima laporan, melakukan investigasi, dan mengambil langkah hukum yang sesuai.

Selain tugas pengawasan, Bawaslu Kabupaten Lamongan juga menjalankan fungsi edukasi kepada masyarakat. Edukasi ini mencakup pemberian informasi mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam Pemilu, prosedur pelaksanaan Pemilu, serta

pentingnya partisipasi aktif untuk menciptakan Pemilu yang berkualitas. Dalam hal ini, Bawaslu juga berperan sebagai fasilitator untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga integritas Pemilu.

Kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi salah satu strategi kunci Bawaslu Kabupaten Lamongan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bawaslu bekerja sama dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Lamongan, aparat keamanan seperti Polres, dan instansi terkait lainnya. Kerja sama ini bertujuan menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Pemilu, sehingga masyarakat dapat menjalankan hak pilihnya secara bebas tanpa tekanan atau intimidasi.

Tantangan dalam pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Lamongan tidak terlepas dari dinamika sosial, ekonomi, dan politik setempat. Untuk itu, Bawaslu berupaya memastikan bahwa seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan, dapat berpartisipasi secara aktif dan sah sesuai aturan. Bawaslu juga memiliki komitmen kuat untuk mencegah dan mengurangi berbagai bentuk pelanggaran, seperti praktik politik uang, kampanye hitam, atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak tertentu.

Bawaslu Kabupaten Lamongan juga mengadopsi teknologi modern untuk mendukung pengawasan yang lebih efektif. Penggunaan sistem informasi terintegrasi memungkinkan proses pencatatan pelanggaran, pengawasan penghitungan suara, dan laporan hasil Pemilu dilakukan dengan lebih

transparan. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas Bawaslu, tetapi juga mempermudah masyarakat dalam memantau perkembangan Pemilu secara real-time.

Dalam menyelesaikan sengketa Pemilu, Bawaslu Kabupaten Lamongan berperan sebagai mediator dan penegak keadilan. Sengketa yang melibatkan peserta Pemilu, pemilih, atau pihak lain diselesaikan melalui mekanisme yang jelas, transparan, dan berbasis fakta. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu serta memastikan keputusan yang diambil mencerminkan keadilan.

Pentingnya Bawaslu dalam mengawal Pemilu demokratis tidak dapat dipandang sebelah mata. Sebagai lembaga pengawas, Bawaslu memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap suara masyarakat dihargai dan dihitung dengan jujur. Hal ini menjadi pilar utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap proses Pemilu.

Bawaslu juga berperan sebagai penyeimbang dalam sistem Pemilu. Dalam situasi di mana terdapat potensi ketidakadilan, seperti intimidasi pemilih atau praktik politik uang, Bawaslu hadir untuk menegakkan aturan dan menjaga agar Pemilu tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dengan adanya pengawasan yang ketat, pelaksanaan Pemilu dapat lebih terjamin kualitasnya.

Keberadaan Bawaslu juga penting dalam mencegah konflik yang mungkin timbul selama proses Pemilu. Dengan melakukan pengawasan sejak dini dan mengambil langkah

proaktif, Bawaslu dapat memitigasi potensi permasalahan yang dapat merusak integritas Pemilu. Ini termasuk mengidentifikasi titik rawan konflik dan memberikan rekomendasi kepada pihak terkait.

Edukasi yang dilakukan Bawaslu kepada masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam menciptakan Pemilu yang demokratis. Dengan memberikan pemahaman yang benar tentang pentingnya partisipasi aktif dan kesadaran akan hak-hak mereka, masyarakat dapat lebih berperan dalam menjaga kualitas Pemilu. Edukasi ini juga mendorong masyarakat untuk menolak segala bentuk kecurangan.

Terakhir, Bawaslu berfungsi sebagai penjaga transparansi dalam Pemilu. Dengan memanfaatkan teknologi dan sistem informasi modern, Bawaslu memastikan bahwa setiap proses Pemilu dapat dipantau oleh publik. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat, tetapi juga menjadi sarana akuntabilitas bagi penyelenggara Pemilu. Dengan transparansi yang terjaga, demokrasi di tingkat lokal maupun nasional dapat tumbuh dengan lebih sehat.

Melalui seluruh fungsi dan perannya, Bawaslu Kabupaten Lamongan tidak hanya berfokus pada pengawasan teknis, tetapi juga pada penguatan sistem demokrasi di tingkat lokal. Edukasi yang berkesinambungan kepada masyarakat dan pengawasan yang profesional menjadikan Bawaslu sebagai pilar penting dalam menjaga kualitas Pemilu. Dengan demikian, Bawaslu Kabupaten Lamongan berkontribusi dalam membangun

kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan melindungi marwah demokrasi di Indonesia.

2. Komisioner Bawaslu Kabupaten Lamongan (Periode 2023-2028)

Komisioner Bawaslu Kabupaten Lamongan periode 2023-2028, memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi jalannya Pemilu di daerah tersebut. Sebagai badan yang bertugas menjaga integritas dan keadilan dalam proses pemilihan umum, para komisioner Bawaslu di Lamongan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa demokrasi berjalan dengan adil, transparan, dan bebas dari praktik kecurangan atau pelanggaran hukum.

Periode 2023-2028

Masuk ke periode 2023-2028, komisioner Bawaslu Kabupaten Lamongan menghadapi tantangan baru seiring dengan perubahan dinamika politik, sosial, dan teknologi. Pada periode ini, mereka kembali dipercaya untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu, termasuk Pemilu Legislatif, Pilpres, dan Pilkada yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang. Tantangan utama yang dihadapi adalah memastikan proses demokrasi yang lebih inklusif dan responsif terhadap perubahan zaman, terutama dengan maraknya informasi yang beredar melalui platform digital dan media sosial (Rahman, 2010). Selain itu, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah meningkatkan kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan Pilkada yang juga akan menjadi sorotan besar masyarakat.

Di bawah kepemimpinan komisioner Bawaslu periode 2023-2028, Bawaslu Kabupaten Lamongan semakin mengedepankan pengawasan berbasis teknologi untuk mendukung proses pemantauan yang lebih transparan dan efisien. Mereka memanfaatkan aplikasi pelaporan pelanggaran, pemantauan media sosial untuk mendeteksi potensi penyebaran berita hoaks yang dapat mempengaruhi hasil pemilu, dan alat digital lainnya untuk mengawasi berbagai tahap Pemilu, mulai dari kampanye hingga proses penghitungan suara. Komisioner Bawaslu Lamongan juga semakin fokus pada pembentukan kelembagaan yang kuat di tingkat kecamatan dan desa. Mereka memperkuat keberadaan Pengawas kelurahan/desa (PKD) di setiap desa dan kecamatan, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan pemilu. Dalam hal ini, para komisioner berperan sebagai fasilitator yang memberikan pelatihan kepada PKD dan masyarakat tentang bagaimana cara mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran Pemilu, serta memastikan hak suara warga tetap terlindungi dari berbagai potensi manipulasi.

Bawaslu Kabupaten Lamongan terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk KPU Lamongan, kepolisian, kejaksaan, dan instansi terkait lainnya, untuk memastikan bahwa seluruh tahapan Pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Para komisioner juga berkomitmen untuk menjaga netralitas dalam pengawasan dan penindakan, sehingga masyarakat bisa merasa bahwa proses Pemilu benar-

benar berjalan dengan adil tanpa ada intervensi politik. Pada periode 2023-2028, komisioner Bawaslu Kabupaten Lamongan juga menghadapi tantangan dari segi keberagaman dan karakteristik sosial masyarakat Lamongan yang beragam. Salah satu fokus utama adalah memastikan bahwa semua suara warga, termasuk yang ada di daerah terpencil atau yang mungkin kesulitan mengakses informasi tentang pemilu, tetap dihitung secara adil. Untuk itu, Bawaslu berupaya memperbaiki sistem informasi, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa, guna menjamin partisipasi yang lebih luas dan terhindar dari potensi kecurangan.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Lamongan, baik pada periode 2023-2028, memainkan peran yang sangat penting dalam mengawal jalannya demokrasi di tingkat lokal. Mereka berkomitmen untuk menjaga kualitas pemilu dengan memastikan bahwa setiap tahapan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari kecurangan. Dengan berfokus pada peningkatan kapasitas pengawasan, pemberdayaan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi, Bawaslu Kabupaten Lamongan berusaha untuk menciptakan iklim demokrasi yang lebih baik dan lebih inklusif, sehingga masyarakat Lamongan dapat merasakan pemilu yang adil dan berkualitas.

Adapun Komisioner Bawaslu Kabupaten Lamongan periode 2023-2028 bisa dilihat sebagaimana gambar berikut:

TONI WIJAYA, S. H. **KETUA BAWASLU LAMONGAN**

Jenis Kelamin : Laki -Laki
Tempat Tgl. Lahir : Lamongan, 7 November 1979
Agama : Islam
Alamat : Desa Manyar RT. 001 / RW. 002 Kecamatan
Sekaran Kabupaten Lamongan

Riwayat Pendidikan Terakhir:
Universitas Islam Darul Ulum Lamongan Lulus Tahun
2003.

Pengalaman Kepemiluan:
a. Anggota PPK Pucuk Tahun 2003-2005 (Berturut)
b. Anggota PPK Pucuk Tahun 2008-2010 (Berturut)
c. Ketua Panwaslu Kabupaten Lamongan 2012-2014
d. Ketua Panwaslu Kabupaten Lamongan 2015-2016
e. Ketua Panwaslu Kabupaten Lamongan 2017 - 2018
f. Anggota Bawaslu Kabupaten Lamongan Periode 2018 -
2023



M. SYAMSUL, S. PD.

**KOORDINATOR DIVISI HUKUM DAN
PENYELESAIAN SENGKETA**

Jenis Kelamin : Laki -Laki
Tempat Tgl. Lahir : Lamongan, 14 Mei 1972
Agama : Islam
Alamat : Dusun Karanganom Wetan, 008/004, Desa
Karangbinangun, Kabupaten Lamongan

Riwayat Pendidikan Terakhir:
IKIO Budi Utomo Malang Lulus Tahun 2002

Pengalaman Kepemiluan:
a. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018, 2019
dan 2020
b. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Pemilu Serentak
2024



MUTTAQIN

KOORDINATOR DIVISI SDMO DAN DIKLAT

Jenis Kelamin : Laki -Laki
Tempat Tgl. Lahir/Usia : Lamongan, 6 Juni 1977
Agama : Islam
Alamat : Desa Payaman, Kecamatan Solokuro,
Kabupaten Lamongan
Riwayat Pendidikan Terakhir:
S1 Ilmu Pemerintahan Unmuh Malang 2005

Pengalaman Kepemiluan:
a.KPPS Tahun 2008
b.Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Solokuro Tahun 2013 dan 2014
c. PPK Solokuro Tahun 2020
d.PPK Solokuro Tahun 2023-2024.



M. FARID ACHIYANI

KOORDINATOR DIVISI PP DAN DATIN

Jenis Kelamin : Laki -Laki
Tempat Tgl. Lahir/Usia : Lamongan, 31 Juli 1976
Agama : Islam
Alamat : Desa Tanggulrejo RT. 003 / RW. 001 Kecamatan
Babat Kabupaten Lamongan

Riwayat Pendidikan Terakhir:
S1 FISIP Universitas Islam Darul Ulum Lamongan.

Pengalaman Kepemiluan:
a.Ketua KPPS Tahun 2009-2019
b.Anggota PPK Babat Tahun 2020
c.Ketua PPK Babat Pemilu Serentak Tahun 2024



YULIANTI

KOORDINATOR DIVISI PENCEGAHAN, PARMAS DAN HUMAS

Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tgl. Lahir : Sondosia, 7 November 1983
Agama : Islam
Alamat : Desa Keranji RT. 005 / RW. 004 Kecamatan
Paciran, Kabupaten Lamongan

Riwayat Pendidikan Terakhir:
Universitas Islam Malang Tahun 2002 s.d 2007

Pengalaman Kepemiluan:
a. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Paciran
Tahun 2015 dan 2018
b. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Paciran Tahun
2019 dan 2020



Alamat Kantor Bawaslu Kabupaten Lamongan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lamongan memiliki peran penting dalam menjaga integritas pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Alamat kantor Bawaslu Lamongan berada di Jalan Raya Sudirman Nomor 45, Kelurahan Tumenggungan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, 62212. Gedung ini menjadi pusat kegiatan pengawasan, pengelolaan laporan pelanggaran, serta koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan transparan.

Untuk mempermudah masyarakat mengakses informasi atau melaporkan temuan pelanggaran, Bawaslu Lamongan memiliki situs web resmi di <https://lamongan.bawaslu.go.id>. Selain itu, masyarakat dapat menghubungi Bawaslu melalui email di sekretariat@bawaslu.go.id atau melalui nomor telepon 081234567890. Agar lebih dekat dengan masyarakat dan relevan

di era digital, Bawaslu Lamongan juga aktif di berbagai media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok dengan akun @BawasluLamongan.

Gedung kantor yang digunakan oleh Bawaslu Lamongan merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Lamongan yang dipinjamkan untuk mendukung tugas pengawasan pemilu. Dengan lokasi strategis di pusat kota Lamongan, kantor ini menjadi tempat yang mudah diakses oleh masyarakat. Keberadaan kantor di jantung kota juga memungkinkan Bawaslu untuk merespons cepat laporan pelanggaran atau keluhan terkait pemilu dari seluruh wilayah Kabupaten Lamongan.

Sebagai pusat pengawasan pemilu di tingkat kabupaten, kantor ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti ruang rapat untuk koordinasi internal, ruang administrasi untuk kegiatan operasional, serta ruang pengaduan masyarakat. Di sini, masyarakat dapat melaporkan temuan pelanggaran secara langsung atau melalui berbagai saluran komunikasi yang telah disediakan. Selain itu, kantor ini juga memiliki ruang khusus untuk pelatihan dan bimbingan teknis bagi para pengawas pemilu tingkat desa dan kecamatan, memastikan seluruh jajaran pengawas memahami tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik.

Lokasi kantor yang berada di pusat kota memberikan banyak keuntungan, terutama dalam hal kolaborasi dengan berbagai pihak. Bawaslu Lamongan sering bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lamongan, kepolisian,

dan organisasi masyarakat sipil untuk mendukung pengawasan yang efektif. Keberadaan kantor di lokasi strategis ini juga mempermudah pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya dalam meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan pemilu.

Bawaslu Kabupaten Lamongan menjalankan perannya dengan dukungan struktur organisasi yang terdiri dari empat divisi utama yang saling melengkapi. Divisi Pencegahan dan Humas memiliki peran penting dalam menyosialisasikan pentingnya pemilu yang bersih dan partisipasi aktif masyarakat. Divisi ini juga berupaya mencegah potensi pelanggaran melalui edukasi tentang aturan pemilu dan kewajiban semua pihak yang terlibat, termasuk netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan POLRI.

Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi (Datin) bertugas menangani laporan pelanggaran yang diterima, baik melalui pengaduan masyarakat maupun hasil temuan di lapangan. Divisi ini bekerja secara profesional dalam mengidentifikasi, menyelidiki, dan menindaklanjuti berbagai pelanggaran pemilu, mulai dari pelanggaran administratif hingga pidana. Mereka juga memastikan bahwa semua data pelanggaran dikelola secara sistematis untuk memudahkan tindak lanjut yang terorganisir dan transparan.

Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa menjadi ujung tombak dalam menangani berbagai persoalan hukum yang muncul selama pelaksanaan pemilu. Sengketa yang sering

terjadi, seperti permasalahan daftar pemilih atau pencalonan, ditangani dengan pendekatan mediasi yang berlandaskan hukum. Divisi ini juga memberikan nasihat hukum kepada Bawaslu untuk memastikan semua langkah yang diambil sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga hak-hak semua pihak tetap terlindungi.

Divisi SDM dan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) memiliki peran strategis dalam memastikan kualitas sumber daya manusia di Bawaslu. Mereka bertugas menyelenggarakan pelatihan teknis dan edukasi yang dirancang untuk meningkatkan kompetensi pengawas pemilu di semua tingkatan. Program pelatihan ini tidak hanya mencakup pengetahuan tentang hukum pemilu tetapi juga keterampilan teknis di lapangan, sehingga setiap pengawas dapat menjalankan tugas mereka dengan profesional.

Keberadaan kantor Bawaslu Kabupaten Lamongan sebagai pusat koordinasi dan pengawasan memberikan dampak besar dalam menciptakan pemilu yang berkualitas. Dengan struktur organisasi yang terencana dan fasilitas yang mendukung, Bawaslu Lamongan tidak hanya menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas tetapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menjaga integritas demokrasi di Kabupaten Lamongan. Seluruh upaya yang dilakukan bertujuan untuk memastikan setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga hasilnya dapat diterima dengan baik oleh semua pihak.

Struktur organisasi Bawaslu Kabupaten Lamongan, yang terdiri dari empat divisi utama—Pencegahan dan Humas,

Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi (Datin), Hukum dan Penyelesaian Sengketa, serta SDM dan Diklat–mencerminkan pendekatan yang komprehensif dan terorganisasi dalam menjalankan tugas pengawasan Pemilu. Setiap divisi memiliki peran yang esensial dan saling mendukung satu sama lain untuk memastikan pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Lamongan berlangsung secara transparan, jujur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan pembagian tanggung jawab yang terstruktur dan koordinasi yang efektif antardivisi, Bawaslu Kabupaten Lamongan siap menghadapi tantangan pengawasan Pemilu 2024. Komitmen ini diharapkan dapat menjamin integritas di setiap tahapan Pemilu, sehingga menghasilkan pemilu yang tidak hanya sah secara hukum tetapi juga mendapatkan kepercayaan dan penerimaan dari masyarakat.

Gambar.2. Struktur Organisasi BAWASLU Lamongan



BAGIAN 3

SDM DAN ORGANISASI PENGAWAS AD HOC.

1. Panwaslu Kecamatan

Salah satu tugas penting yang diemban oleh Bawaslu Kabupaten/Kota adalah membentuk Panwaslu Kecamatan. Tugas ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017, yang telah mengalami perubahan terakhir melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022. Kewenangan untuk menjalankan tugas ini diberikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang menjadi landasan hukum dalam upaya menjaga integritas dan transparansi proses pemilu di tingkat kecamatan.

Pada tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Lamongan melaksanakan rekrutmen Panwaslu Kecamatan untuk mendukung pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024. Sebagai upaya menyebarkan informasi terkait pembentukan Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Lamongan mengadakan kegiatan sosialisasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, organisasi masyarakat, dan masyarakat umum, baik melalui pertemuan tatap muka maupun media lainnya. Pengumuman pendaftaran Panwaslu Kecamatan disampaikan melalui berbagai saluran, seperti papan pengumuman di Kantor Bawaslu Kabupaten Lamongan, media cetak Jawa Pos Radar Bojonegoro, papan pengumuman di kantor kecamatan se-

Kabupaten Lamongan, serta platform media sosial resmi Bawaslu, termasuk website, Facebook, Twitter, dan Instagram.

Selain itu, proses pembentukan Panwaslu Kecamatan dilaksanakan melalui tahapan yang dirancang secara sistematis dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahapan ini diawali dengan perencanaan serta pengumuman pembukaan pendaftaran, kemudian dilanjutkan dengan seleksi administrasi dan wawancara yang bertujuan untuk menjaring kandidat yang memenuhi kriteria. Setelah itu, dilakukan penetapan anggota Panwaslu Kecamatan yang terpilih. Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan, jadwal setiap tahapan dirancang dalam bentuk timeline yang rinci, sehingga proses ini berjalan transparan, akuntabel, dan sejalan dengan prinsip keadilan.

Jadwal pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 telah disusun secara rinci guna memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan. Berikut adalah rincian jadwal tersebut:

Tabel 3.1

Jadwal Pembentukan Panwaslu Kecamatan Tahun 2024

NO	TAHAPAN	TANGGAL PELAKSANAAN	WAKTU
1	Sosialisasi	10 - 21 September 2022	12 hari
2	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	15 - 21 September 2022	7 hari

3	Pendaftaran Dan Berkas Anggota Panwaslu Kecamatan	21 - 27 September 2022	7 hari
4	Penelitian Pendaftaran Panwaslu Kecamatan	28 - 30 September 2022	3 hari
5	Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	1 Oktober 2022	1 hari
6	Perpanjangan Masa Calon Anggota Kecamatan	2 - 8 Oktober 2022	7 hari
7	Penerimaan Berkas Calon Anggota Kecamatan	2 - 8 Oktober 2022	7 hari
8	Penelitian Berkas Pendaftaran Panwaslu Kecamatan	9 - 11 Oktober 2022	3 hari
9	Pengumuman Hasil Berkas Administrasi Anggota Panwaslu Kecamatan	12 Oktober 2022	1 hari
10	Tanggapan Dan Masukan Dari Masyarakat	12 - 18 Oktober 2022	7 hari
11	Tes Tertulis Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	14 - 16 Oktober 2022	3 hari
12	Pengumuman Hasil Tes Tertulis Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	17 Oktober 2022	1 hari
13	Pelaksanaan Tes Wawancara Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	18 - 22 Oktober 2022	5 hari

14	Pleno Penetapan Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	23 - 24 Oktober 2022	2 hari
15	Pengumuman Hasil Tes Wawancara Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	25 Oktober 2022	1 hari
16	Pelantikan Panwaslu Kecamatan dan Pembekalan Panwaslu Kecamatan	26 - 28 Oktober 2022	3 hari

Sumber : Pengumuman Pendaftaran Panwaslu Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Persyaratan Administrasi Bakal Calon Anggota Panwaslu Kecamatan dalam rangka Pemilu Serentak Tahun 2024, dengan Nomor: 020/KP.01.00/JI-11/09/2022, yang dilaksanakan pada tanggal 28 hingga 30 September 2022, ditemukan bahwa di beberapa kecamatan keterwakilan perempuan belum memenuhi ketentuan minimal sebesar 30% dalam satu kecamatan. Hal ini menjadi perhatian penting untuk memastikan kesetaraan gender dalam proses pembentukan Panwaslu Kecamatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk memastikan terpenuhinya ketentuan minimal 30% keterwakilan pendaftar perempuan di setiap kecamatan, Bawaslu Kabupaten Lamongan membuka Perpanjangan Pendaftaran Khusus Perempuan. Perpanjangan ini berlaku di kecamatan-kecamatan yang belum mencapai batas minimal tersebut, dengan tujuan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi

perempuan untuk berpartisipasi dalam proses seleksi Panwaslu Kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.2
Daftar Kecamatan Yang Dilakukan Perpanjangan Pendaftaran Khusus Pendaftar Perempuan Tahun 2024

NO	KECAMATAN	KETERANGAN
1	BLULUK	Kurang dari 30% keterpenuhan perempuan
2	MODO	Kurang dari 30% keterpenuhan perempuan
3	NGIMBANG	Kurang dari 30% keterpenuhan perempuan
4	BABAT	Kurang dari 30% keterpenuhan perempuan
5	BRONDONG	Kurang dari 30% keterpenuhan perempuan
6	LAREN	Kurang dari 30% keterpenuhan perempuan
7	MADURAN	Kurang dari 30% keterpenuhan perempuan
8	SUGIO	Kurang dari 30% keterpenuhan perempuan
9	PUCUK	Kurang dari 30% keterpenuhan perempuan
10	PACIRAN	Kurang dari 30% keterpenuhan perempuan
11	SOLOKURO	Kurang dari 30% keterpenuhan perempuan
12	MANTUP	Kurang dari 30% keterpenuhan perempuan
13	SUKODADI	Kurang dari 30% keterpenuhan perempuan
14	KARANGGENE NG	Kurang dari 30% keterpenuhan perempuan
15	KALITENGAH	Kurang dari 30% keterpenuhan perempuan
16	TURI	Kurang dari 30% keterpenuhan perempuan
17	TIKUNG	Kurang dari 30% keterpenuhan perempuan
18	KARANGBINA NGUN	Kurang dari 30% keterpenuhan perempuan
19	GLAGAH	Kurang dari 30% keterpenuhan perempuan
20	SARIREJO	Kurang dari 30% keterpenuhan perempuan

Sumber : Pengumuman Pendaftaran Panwaslu Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024

Penerimaan berkas pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Lamongan untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 dilaksanakan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan, yang beralamat di Jl. Ki Sarmidi Mangun Sarkoro No. 7 Lamongan (tepat di depan SMP Negeri 1 Lamongan). Proses penerimaan berlangsung pada tanggal 21 hingga 27 September 2022, setiap hari mulai pukul 09.00 hingga 17.00 WIB. Adapun rincian jumlah pendaftar selama periode tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Rincian Pendaftar Laki-Laki dan Perempuan

No	Kecamatan	Pendaftar		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Babat	14	2	16
2	Bluluk	5	2	7
3	Brondong	12	0	12
4	Deket	8	8	16
5	Glagah	10	4	14
6	Kalitengah	17	0	17
7	Karangbinangu	12	0	12
8	Karanggeneng	17	1	18
9	Kedungpring	7	4	11
10	Kembangbahu	9	5	14
11	Lamongan	11	7	18
12	Laren	8	2	10
13	Maduran	10	1	11
14	Mantup	13	0	13

15	Modo	10	3	13
16	Ngimbang	11	2	13
17	Paciran	18	1	19
18	Pucuk	12	2	14
19	Sambeng	10	5	15
20	Sarirejo	12	4	16
21	Sekaran	9	4	13
22	Solokuro	17	1	18
23	Sugio	13	3	16
24	Sukodadi	15	4	19
25	Sukorame	6	4	10
26	Tikung	9	6	15
27	Turi	14	1	15
Jumlah		307	78	385

Sumber : Laporan Akhir Pembentukan Panwaslu Kecamatan 2022

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pendaftar terbanyak berasal dari Kecamatan Paciran dengan total 19 pendaftar, terdiri atas 18 laki-laki dan hanya 1 perempuan. Jumlah pendaftar yang sama juga tercatat di Kecamatan Sukodadi, yakni sebanyak 19 orang. Namun, rincian pendaftar di Kecamatan Sukodadi menunjukkan komposisi yang sedikit berbeda, dengan 15 laki-laki dan 4 perempuan. Hal ini menggambarkan adanya perbedaan tingkat partisipasi perempuan di masing-masing kecamatan.

Karena beberapa kecamatan belum memenuhi kuota minimal 30% pendaftar perempuan, Bawaslu Kabupaten Lamongan memutuskan untuk memperpanjang masa pendaftaran di 20 kecamatan. Perpanjangan ini berlangsung selama 7 hari, mulai dari tanggal 2 hingga 8 Oktober 2022. Hasil

dari perpanjangan pendaftaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Tahapan Perpanjangan Pendaftaran

No	Total Kecamatan Perpanjangan	Total Kecamatan Tidak Perpanjangan	Total Kecamatan
1	20 Kecamatan	7 Kecamatan	27 Kecamatan

Sumber : Laporan Akhir Pembentukan Panwaslu Kecamatan 2022

Dari perpanjangan pendaftaran khusus bagi perempuan yang berlangsung selama 7 hari, mulai tanggal 2 hingga 8 Oktober 2022, di 20 kecamatan, tercatat tambahan sebanyak 16 pendaftar perempuan yang tersebar di 10 kecamatan. Dengan tambahan tersebut, total pendaftar calon anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Lamongan untuk Pemilu Serentak Tahun 2024 mencapai 401 orang, yang terdiri dari 309 laki-laki dan 92 perempuan. Upaya ini menunjukkan komitmen untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam proses seleksi sesuai dengan prinsip inklusivitas dan kesetaraan. Rincian dari tahapan tertulis dapat di lihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.5
Tahapan Tes Tertulis

No	Total Peserta Laki-Laki	Total Peserta Perempuan	Total Peserta Tes Tertulis Online	Total Peserta Tes Tertulis Offline	Grand Total Peserta
1	272	70	342	0	342

Sumber : Laporan Akhir Pembentukan Panwaslu Kecamatan 2022

Pelaksanaan tes tertulis calon anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Lamongan diikuti oleh 342 peserta, terdiri atas 272 laki-laki dan 70 perempuan. Pelaksanaan tes yang dilakukan secara online mencatat ketidakhadiran sebanyak 41 peserta, terdiri dari 31 laki-laki dan 9 perempuan. Hal ini menekankan pentingnya kesiapan dan komitmen peserta dalam mengikuti setiap tahapan seleksi guna mendukung kelancaran proses pemilihan.

Tabel 3.6

Pembagian Sesi Pelaksanaan Tes Tertulis

NO	HARI, WAKTU	SESI/KELAS	JUMLAH PESERTA		
			L	P	JML
1	Sabtu, 15 Oktober 2022 08.00 - 09.30 WIB	I / A	21	9	30
2		I / B	26	4	30
3		I / C	25	5	30
4	Sabtu, 15 Oktober 2022 10.00 - 11.30 WIB	II / A	23	7	30
5		II / B	25	5	30
6		II / C	27	3	30
7	Sabtu, 15 Oktober 2022 12.00 - 13.30 WIB	III / A	25	5	30
8		III / B	26	4	30
9		III / C	27	3	30
7	Sabtu, 15 Oktober 2022 14.00 - 15.30 WIB	IV / A	23	7	30
8		IV / B	19	11	30
9		IV / C	20	10	30
10	Sabtu, 15 Oktober 2022 16.00 - 17.30 WIB	V / A	16	7	23

JUMLAH	303	80	383
--------	-----	----	-----

Sumber : Laporan Akhir Pembentukan Panwaslu Kecamatan 2022

Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa tes tertulis bagi calon anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Lamongan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2022 dalam satu hari penuh. Proses seleksi ini terbagi menjadi lima sesi, dengan setiap sesi menggunakan tiga ruang ujian secara simultan. Pengaturan ini dirancang untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tes serta memberikan kenyamanan bagi peserta dalam mengikuti tahapan seleksi. Selain tes tertulis, calon anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Lamongan juga mengikuti tes wawancara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.7

Tahapan Tes Wawancara

No	Total Peserta Laki-laki	Total Peserta Perempuan	Grand Total Peserta
1	144	18	162

Sumber : Laporan Akhir Pembentukan Panwaslu Kecamatan 2022

Pada pelaksanaan tes wawancara, dari total 162 peserta yang dijadwalkan, sebanyak 161 peserta hadir mengikuti tahapan ini. Peserta yang hadir terdiri dari 143 laki-laki dan 18 perempuan. Tingkat kehadiran yang tinggi ini mencerminkan antusiasme serta komitmen para peserta dalam melanjutkan proses seleksi sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan. Setelah mengikuti beberapa tes di atas. Tabel dibawah ini merupakan tabel jumlah rekapitulasi Panwaslu Kecamatan sebagai berikut:

Tabel 3.8
Rekapitulasi Panwaslu Kecamatan (Panwascam) Terpilih

No	Total Kecamatan	Total Panwascam Terpilih Laki-Laki	Total Panwascam Terpilih Perempuan	Keterangan
1	27	70	11	

Sumber: Laporan Akhir Pembentukan Panwaslu Kecamatan 2022

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 81 peserta telah dinyatakan lulus seleksi, dengan rincian setiap kecamatan diwakili oleh 3 orang. Para peserta yang terpilih ini secara resmi diambil sumpah dan dilantik pada tanggal 27 Oktober 2022, dalam sebuah acara yang berlangsung khidmat di Pendopo Lokatantra, Kabupaten Lamongan. Pelantikan ini menandai dimulainya tugas para anggota Panwaslu Kecamatan dalam mengawal pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024.

No	Nama-Nama Terpilih	Jenis Kelamin (L/P)
Kecamatan Babat		
1.	Nurofik	L
2.	Afif Mahtuhfuad	L
3.	Agung Supriyitno	L
Kecamatan Bluluk		
1.	Ainur Rofiq,S.Pd	L
2.	Mafud Eka Yenuri,S.Pd	L
3.	Rumbati,S.Pd	P
Kecamatan Brondong		

1.	Muhammad Marzuqi	L
2.	Wawan Cahyono	L
3.	Yodi Kurniawan	L
Kecamatan Deket		
1.	Santoso	L
2.	Kholil	L
3.	Mohc. Fadlan	L
Kecamatan Glagah		
1.	Zaenal Abidin	L
2.	Nur Hidayah	P
3.	ACH. Muzaky Fanani	L
Kecamatan Kalitengah		
1.	Jayanto,S.Pd	L
2.	Moh. Syamsudin Abdillah	L
3.	Achmad Rifa'i	L
Kecamatan Karangbinangun		
1.	Moh. Jamaludin Trengginas	L
2.	Hepni	L
3.	Muhammad Asrori	L
Kecamatan Karanggeneng		
1.	Hadi Santoso	L
2.	Anhari	L
3.	Donny Kusumah	L
Kecamatan Kedungpring		
1.	Sidiq Resianto	L
2.	Dwi May Syaroh	P
3.	Moh. Miftahul Sholihuddin A.	L
Kecamatan Kembangbahu		
1.	Moh. Ian Aulia Willy S	L
2.	Supangat	L
3.	Yusuf	L
Kecamatan Lamongan		

1.	Mohammad Nafis Abd Rouf,S.Pd	L
2.	Dian Rahayu Puji Astutik	L
3.	Nur wachid	L
Kecamatan Laren		
1.	Fatikun Nashor	L
2.	Dian Wisnu Al Afdhoni	L
3.	Istika	P
Kecamatan Maduran		
1.	Mas'an Chamid SS.,M.Pd	L
2.	Budi Rahmat	L
3.	Muktinin	L
Kecamatan Mantup		
1.	Sunaryo	L
2.	M. Syarifuddin	L
3.	Moh. Haikal	L
Kecamatan Modo		
1.	Yusheva Resky Ammara Ogga	L
2.	Shofiana Cahyaning Tyas	P
3.	Ahmad Yusuf Afif Rifa'i	L
Kecamatan Ngimbang		
1.	Hari Mulya Sasmita	L
2.	Saidi	L
3.	Ahmad Miftahul Ulum	L
Kecamatan Paciran		
1.	A. Thoriq Hidayatullah.S.Pd.I	L
2.	Luqman Hakim,S.Psi	L
3.	Moh. Syafuani Choiruddin	L
Kecamatan Pucuk		
1.	Sapari	L
2.	Venia	P
3.	Anam	L
Kecamatan Sambeng		

1.	Samsul Junaidi	L
2.	Vega Ariesta	L
3.	Khoirotin Nisa'	P
Kecamatan Sarirejo		
1.	Eko Setiawan	L
2.	Syaichul Amin	L
3.	Khoiron Ma'hadi	L
Kecamatan Sekaran		
1.	Friedric Dihliz M	L
2.	Rois Anwar	L
3.	Mohammad Nurfa'i	L
Kecamatan Solokuro		
1.	Fahed Muh. Badar Karomi	L
2.	Minan	L
3.	Suroto	L
Kecamatan Sugio		
1.	Nahmadu Setiawan Ibad	L
2.	Rifa'atun	P
3.	Matkan	L
Kecamatan Sukodadi		
1.	Mujtahidul Faqih	L
2.	Akhmad Fauzun Adzim	L
3.	Imam Taufiq	L
Kecamatan Tikung		
1.	Ismail Khoiri	L
2.	Jessika Putrilia A	P
3.	Indah Dwi Utami	P
Kecamatan Turi		
1.	Akhmad Roziqin	L
2.	Muhammad Arifin	L
3.	Hasan Kholiq	L

2. Panwaslu Kelurahan

Panwaslu Kelurahan/Desa memegang posisi yang sangat penting dalam memastikan bahwa integritas dan kelancaran kegiatan Pemilu di tingkat lokal dapat terjaga. Mereka berfungsi sebagai pengawas utama, dengan tanggung jawab untuk mengawasi setiap tahap pemilihan, mulai dari pengiriman logistik hingga perhitungan suara di TPS, demi memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Keberadaan Panwaslu Kelurahan juga sangat penting dalam mencegah dan mengatasi berbagai pelanggaran Pemilu, seperti praktik politik uang, penipuan suara, atau tindakan intimidasi. Dengan terjun langsung ke lapangan, Panwaslu Kelurahan mampu mengidentifikasi dengan cepat segala potensi masalah yang bisa mengganggu kelangsungan Pemilu. Kehadiran mereka tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap transparansi dan keadilan dalam proses Pemilu, tetapi juga memotivasi masyarakat untuk lebih aktif menggunakan hak suara mereka.

Selain itu, Panwaslu Kelurahan berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan penyelenggara Pemilu, dengan menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran serta memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Melalui tugas ini, mereka turut memperkuat kesadaran akan pentingnya menjaga demokrasi yang jujur dan adil. Dengan tanggung jawab yang kompleks ini, Panwaslu Kelurahan berperan besar dalam memastikan kualitas demokrasi di Indonesia tetap terjaga. Oleh

karena itu, berdasarkan hasil pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa oleh Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lamongan diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 3.9

Tahapan Pendaftaran Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Lamongan Pemilu Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Pendaftar Laki-Laki	Pendaftar Perempuan	Total
1	Babat	23	39	23	62
2	Bluluk	9	16	10	26
3	Brondong	10	26	9	35
4	Deket	17	24	23	47
5	Glagah	29	44	23	67
6	Kalitengah	20	42	14	56
7	Karangbinangun	21	34	24	58
8	Karanggeneng	18	28	22	50
9	Kedungpring	23	31	30	61
10	Kembangbahu	18	24	18	42
11	Lamongan	20	43	29	72
12	Laren	20	36	25	61
13	Maduran	17	19	23	42
14	Mantup	15	22	14	36
15	Modo	17	22	7	29
16	Ngimbang	19	29	13	42
17	Paciran	17	34	15	49

18	Pucuk	17	29	22	51
19	Sambeng	22	32	24	56
20	Sarirejo	9	16	11	27
21	Sekaran	21	28	21	49
22	Solokuro	10	17	3	20
23	Sugio	21	35	26	61
24	Sukodadi	20	34	17	51
25	Sukorame	9	14	13	27
26	Tikung	13	21	16	37
27	Turi	19	28	23	51
JUMLAH		474	767	498	1265

Sumber : Laporan Akhir Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa

Berdasarkan data pada tabel di atas, terlihat tingginya antusiasme masyarakat untuk mendaftar sebagai anggota Panwaslu Kelurahan/Desa di 27 kecamatan. Total jumlah pendaftar mencapai 1.265 orang, dengan komposisi 767 laki-laki dan 498 perempuan. Angka ini mencerminkan semangat partisipasi publik yang tinggi dalam mendukung pengawasan Pemilu di tingkat lokal, sekaligus menunjukkan keberagaman dan inklusivitas dalam proses seleksi.

Tabel 3.10
Tahapan Perpanjangan Pendaftaran Panwaslu Kelurahan/Desa
Se-Kabupaten Lamongan Pemilu
Tahun 2024

No	Kecamatan Perpanjangan	Total Kelurahan/Desa	Total Kelurahan/Desa Yang Melakukan Perpanjangan
1	Babat	23	7
2	Bluluk	9	1

3	Brondong	10	5
4	Deket	17	1
5	Glagah	29	14
6	Kalitengah	20	11
7	Karangbinangun	21	6
8	Karanggeneng	18	1
9	Kembangbahu	18	4
10	Lamongan	20	6
11	Laren	20	3
12	Mantup	15	4
13	Modo	17	12
14	Ngimbang	19	8
15	Paciran	17	9
16	Pucuk	17	2
17	Sambeng	22	5
18	Sekaran	9	5
19	Solokuro	21	8
20	Sugio	10	5
21	Sukodadi	21	8
22	Sukorame	20	1

Sumber : Laporan Akhir Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 22 kecamatan se-Kabupaten Lamongan yang melaksanakan perpanjangan pendaftaran. Kecamatan-kecamatan tersebut mencakup 126 Kelurahan/Desa, yang menunjukkan upaya maksimal untuk memastikan keterlibatan masyarakat secara luas dalam proses pengawasan Pemilu. Langkah ini mencerminkan

komitmen Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam menjamin proses seleksi yang inklusif dan sesuai dengan prinsip demokrasi. Proses pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Lamongan berjalan dengan lancar, khususnya pada tahapan tanggapan dan masukan masyarakat, di mana tidak ditemukan adanya aduan dari masyarakat. Hal ini mencerminkan kepercayaan publik terhadap transparansi dan kredibilitas proses seleksi yang dilakukan. Setelah tahap penelitian administrasi selesai dan peserta yang lulus diumumkan, seleksi dilanjutkan dengan tahapan tes wawancara. Adapun data lengkap peserta yang mengikuti tes wawancara adalah sebagai berikut:

Tabel 3.11
Tahapan Tes Wawancara Calon Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Lamongan Pada Pemilu Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Peserta Laki-Laki	Peserta Perempuan	Total Peserta
1	Babat	23	39	23	62
2	Bluluk	9	16	10	26
3	Brondong	10	26	9	35
4	Deket	17	24	23	47
5	Glagah	29	44	23	67
6	Kalitengah	20	42	14	56
7	Karangbinangun	21	34	24	58
8	Karanggeneng	18	28	22	50
9	Kedungpring	23	31	30	61
10	Kembangbahu	18	24	18	42

11	Lamongan	20	43	29	72
12	Laren	20	36	25	61
13	Maduran	17	19	23	42
14	Mantup	15	22	14	36
15	Modo	17	22	7	29
16	Ngimbang	19	29	13	42
17	Paciran	17	34	15	49
18	Pucuk	17	29	22	51
19	Sambeng	22	32	24	56
20	Sarirejo	9	16	11	27
21	Sekaran	21	28	21	49
22	Solokuro	10	17	3	20
23	Sugio	21	35	26	61
24	Sukodadi	20	34	17	51
25	Sukorame	9	14	13	27
26	Tikung	13	21	16	37
27	Turi	19	28	23	51
JUMLAH		474	767	498	1265

Sumber : Laporan Akhir Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa 2023

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari total peserta yang mengikuti tes wawancara calon Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Lamongan mencapai 1.265 orang. Dari jumlah tersebut, 767 peserta merupakan laki-laki, sedangkan 498 peserta adalah perempuan. Angka ini menunjukkan tingginya antusiasme dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pengawasan Pemilu di tingkat lokal.

Tabel 3.12

Rekapitulasi Panwaslu Kelurahan/Desa Terpilih

No	Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Total PKD Terpilih Laki-Laki	Total PKD Terpilih Perempuan	Keterangan
1	Babat	23	18	5	
2	Bluluk	9	8	1	
3	Brondong	10	10	0	
4	Deket	17	12	5	
5	Glagah	29	19	10	
6	Kalitengah	20	15	5	
7	Karangbinangun	21	16	5	
8	Karanggeneng	18	14	4	
9	Kedungpring	23	19	4	
10	Kembangbahu	18	15	3	
11	Lamongan	20	15	5	
12	Laren	20	13	7	
13	Maduran	17	11	6	
14	Mantup	15	12	3	
15	Modo	17	15	2	
16	Ngimbang	19	15	4	
17	Paciran	17	16	1	
18	Pucuk	17	12	5	
19	Sambeng	22	18	4	
20	Sarirejo	9	9	0	
21	Sekaran	21	16	5	
22	Solokuro	10	10	0	
23	Sugio	21	17	4	
24	Sukodadi	20	14	6	
25	Sukorame	9	7	2	
26	Tikung	13	10	3	
27	Turi	19	13	6	

JUMLAH	474	369	105	
--------	-----	-----	-----	--

Sumber : Laporan Akhir Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa 2023

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 474 orang terpilih sebagai anggota Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Lamongan. Dari jumlah tersebut, 369 orang atau (78%) adalah laki-laki, sementara 105 orang atau (22%) adalah perempuan, mencerminkan keterwakilan yang proporsional sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

3. Pengawas Tps Pembentukan Dan Keberadaannya

Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Lamongan resmi mengumumkan dibukanya pendaftaran calon Anggota Pengawas TPS untuk Pemilu mendatang. Proses pengumuman ini dilakukan melalui dua jalur, yaitu online dan offline, guna memastikan informasi tersebar luas dan merata. Melalui jalur online, informasi pendaftaran disampaikan menggunakan berbagai platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, yang efektif menjangkau masyarakat, terutama generasi muda yang aktif di dunia digital. Sementara itu, jalur offline dilakukan dengan pendekatan langsung oleh Panwaslu Kecamatan melalui sosialisasi ke pengawas kelurahan atau desa di seluruh kecamatan di Kabupaten Lamongan. Dalam kegiatan ini, Panwaslu menyampaikan surat pemberitahuan yang dilengkapi dengan formulir pendaftaran, lampiran persyaratan, dan dokumen pendukung lainnya, serta menempelkan pengumuman rekrutmen di kantor Panwaslu, seperti di

Kecamatan Tikung. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh calon Anggota Pengawas TPS adalah berusia minimal 21 tahun, memiliki pendidikan minimal SMA atau sederajat, tidak pernah terlibat tindak pidana, serta tidak memiliki hubungan atau ikatan dengan sesama penyelenggara Pemilu. Sebagai bukti penyebaran informasi, Panwaslu memastikan setiap desa menerima dan mendokumentasikan surat pengumuman. Dengan ini, masyarakat Kabupaten Lamongan diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga integritas Pemilu melalui peran sebagai Anggota Pengawas TPS.

Proses pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) berlanjut dengan tahap Seleksi Wawancara, di mana calon yang telah lulus seleksi administrasi diuji lebih mendalam terkait pemahaman mereka terhadap tugas dan tanggung jawab PTPS, termasuk integritas, independensi, dan komitmen terhadap aturan Pemilu. Hasil dari seleksi ini diumumkan melalui Pengumuman Lulus Wawancara sebagai bentuk transparansi proses rekrutmen. Setelah itu, calon yang dinyatakan lulus diwajibkan mengikuti tahap Pembekalan dan Pelatihan, yang bertujuan membekali mereka dengan pengetahuan teknis, pedoman pelaksanaan tugas, serta langkah-langkah penanganan potensi pelanggaran di TPS. Seluruh tahapan ini dirancang secara berjenjang untuk memastikan PTPS yang terpilih adalah individu yang kompeten, berintegritas, dan mampu menjalankan tugasnya secara profesional, sehingga berkontribusi pada terciptanya Pemilu yang jujur, adil, dan berkualitas. Berikut tabel

jadwal tahapan pembentukan pengawas TPS pada pemilu serentak 2024.

Tabel 3.13

Tahapan Pembentukan Pengawas TPS Pemilu Tahun 2024

NO	TAHAPAN	WAKTU INDO	DURASI
1.	Sosialisasi dan Pengumuman Pendaftaran	21-31 Desember 2023	11 hari
2.	Pendaftaran dan Penerimaan Berkas (G1)	2-6 Januari 2024	5 hari
3.	Penelitian Kelengkapan Berkas Pendaftaran	2-6 Januari 2024	5 hari
4.	Pengumuman Perpanjangan	7 Januari 2024	1 hari
5.	Penerimaan Berkas Pendaftaran Di Masa Perpanjangan (G2)	7-8 Januari 2024	2 hari
6.	Penelitian Berkas Pendaftaran Di Masa Perpanjangan	7-8 Januari 2024	2 hari
7.	Pengumuman Lulus Administrasi	10 Januari 2024	1 hari
8.	Tanggapan/Masukan Masyarakat	10-21 Januari 2024	12 hari

9.	Wawancara	2-17 Januari 2024	16 hari
10.	Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Berdasarkan Hasil Wawancara	18-19 Januari 2024	2 hari
11.	Pergantian Calon Terpilih (Jika Ada Setelah Didahului Klarifikasi li)	19-21 Januari 2024	3 hari
12.	Pelantikan Pengawas Tps	22 Januari 2024	2 hari
13.	Perpanjangan Rekrutmen Khusus Tps Yang Belum Terisi Pengawas	24 Jan-7 Febr 2024	15 hari

Sumber: Laporan Akhir Bawaslu Tahun 2023

Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) memiliki peran krusial sebagai bagian integral dalam penyelenggaraan pemilu. Keberadaannya tidak hanya memastikan kelancaran proses pemungutan suara, tetapi juga menjamin keadilan dalam pelaksanaannya. Untuk mewujudkan hal tersebut, keterlibatan aktif masyarakat, termasuk sebagai anggota PTPS, menjadi sangat penting. Partisipasi ini berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas dan integritas penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan.

Tabel 3.14
Jumlah Pendaftar PTPS

Jumlah Pendaftar	Laki-laki	Perempuan
5436	3003	2433

Sumber: Laporan Akhir Bawaslu Tahun 2023

Dari tabel di atas, jumlah pendaftar PTPS tercatat sebanyak 5.436 orang, yang terdiri dari 3.003 laki-laki dan 2.433 perempuan. Data ini menunjukkan bahwa pendaftar laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan, dengan selisih sebanyak 570 orang. Komposisi ini mencerminkan antusiasme yang tinggi dari kedua kelompok gender untuk berkontribusi dalam proses pemilu, sekaligus menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dari berbagai latar belakang dalam mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilu.

Tabel 3.15
Pendaftar yang Lolos Seleksi

Jumlah PTPS Terpilih	Laki-laki	Perempuan
4153	2396	1757

Sumber: Laporan Akhir Bawaslu Tahun 2023

Dari tabel di atas, jumlah pendaftar yang lolos seleksi sebagai PTPS mencapai 4.153 orang, terdiri dari 2.396 laki-laki dan 1.757 perempuan. Data ini menunjukkan bahwa jumlah laki-laki yang terpilih masih lebih banyak dibandingkan perempuan, dengan selisih sebanyak 639 orang. Meskipun demikian, proporsi perempuan yang lolos seleksi mencerminkan adanya keberagaman dan representasi gender yang signifikan dalam

keanggotaan PTPS. Hasil seleksi ini juga menggambarkan proses penilaian yang mempertimbangkan kapasitas dan komitmen individu dalam mendukung kelancaran dan integritas pelaksanaan pemilu.

Pembentukan PTPS sering menghadapi berbagai kendala dan hambatan yang perlu diatasi untuk memastikan proses berjalan optimal. Salah satu kendala utama adalah minimnya pemahaman masyarakat terhadap peran dan tanggung jawab PTPS, yang dapat mengurangi minat untuk mendaftar. Selain itu, faktor geografis di wilayah terpencil atau sulit dijangkau sering kali menghambat proses sosialisasi dan rekrutmen. Tidak kalah penting, ketersediaan sumber daya manusia yang memenuhi kriteria, baik dari segi integritas maupun kompetensi, kerap menjadi tantangan tersendiri. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis, seperti meningkatkan intensitas sosialisasi mengenai pentingnya peran PTPS melalui berbagai media dan pendekatan komunitas, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Penyediaan pelatihan intensif bagi calon anggota PTPS juga dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas mereka dalam menjalankan tugas. Dengan solusi yang tepat, pembentukan PTPS dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan pemilu.

4. Pembinaan SDM

Bawaslu Kabupaten Lamongan memegang tanggung jawab besar dalam memastikan setiap tahapan pemilu berlangsung dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang

berlaku. Untuk melaksanakan tugas ini, Bawaslu Lamongan harus membangun fondasi yang kokoh, perisai yang kuat, dan atap yang rapat sebagai simbol kesiapan, perlindungan, dan keutuhan dalam mengawasi jalannya pemilu. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Bawaslu meliputi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu, penanganan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa proses pemilu. Semua upaya ini bertujuan untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, transparan, dan berintegritas, demi menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pengawasan, Bawaslu Kabupaten Lamongan secara rutin mengadakan berbagai kegiatan, seperti Bimbingan Teknis, Rapat Koordinasi, serta monitoring dan pembinaan langsung ke seluruh kecamatan di wilayah Lamongan. Kegiatan-kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kompetensi dan kapasitas seluruh sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Bawaslu, termasuk para pengawas ad hoc dan jajaran kesekretariatan. Keberhasilan pelaksanaan program ini sangat bergantung pada perencanaan dan persiapan yang matang, mencakup aspek waktu, materi, dan teknis pelaksanaan, sehingga mampu mendukung efektivitas pengawasan pemilu yang profesional dan berintegritas.

a. Peningkatan Kapasitas

1. Bimbingan Teknis atau Rapat Koordinasi

Pengembangan kapasitas pegawai merupakan aspek yang sangat penting untuk memastikan organisasi dapat

berkembang dan terus beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan. Secara umum, capacity building dapat dipahami sebagai proses yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan (skills), sikap (attitude), dan perilaku (behavior) sumber daya manusia (SDM). Melalui penguatan kapasitas ini, organisasi tidak hanya dapat menghadapi tantangan dengan lebih baik, tetapi juga memperkuat fondasi untuk mencapai tujuan jangka panjang secara efektif dan efisien.

Tabel 3.16

Bimbingan Teknis atau Rapat Koordinasi

No	Materi Bimtek/ Rakor	Asal Peserta	Maksud dan Tujuan	Hasil yang ingin dicapai	Ket
1	Bimbingan Teknis Pengawasan Pemilu dan Pengelolaan Administrasi Kesekretariatan dalam rangka Siaga Pengawasan Satu Tahun Menuju Pemilu Serentak Tahun 2024	Peserta Bimtek 89 (delapan puluh sembilan) orang terdiri 27 Ketua dan Kordiv. Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas Panwaslu Kecamatan serta Staf Panwaslu Kecamatan	Dalam rangka siaga pengawasan satu tahun menuju Pemilu Serentak Tahun 2024	Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam melakukan pengawasannya, menjalankan sesuai pedoman dan alat kerja pengawasan yang menjadi acuan kerja Pengawas Pemilu pada setiap tingkatan termasuk Panwaslu	

		<p>n, staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan dan instansi terkait (Bakesbangpol Kabupaten Lamongan)</p>		<p>Kecamatan dan Panwaslu Desa sebagai pedoman dalam melakukan tindakan pengawasan tahapan Pemilu. Dari aspek pencegahan, Bawaslu Kabupaten Lamongan perlu melakukan upaya preventif untuk meminimalisir terjadinya potensi pelanggaran Pemilu. Dalam rangka optimalisasi tindakan pencegahan, Bawaslu Kabupaten Bantul membangun sistem laporan hasil pencegahan yang tersinkronisasi</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>di setiap tingkatan Pengawas Pemilu baik dari Bawaslu Kabupaten Lamongan, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu Desa. Beberapa aspek kesiapan Bawaslu Kabupaten Lamongan perlu mendapatkan dukungan dari berbagai elemen dan masyarakat, baik itu dukungan dari Pemerintah Daerah, DPRD, Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Lamongan, Lembaga Negara di Kabupaten Bantul, Organisasi</p>	
--	--	--	--	--	--

				Masyarakat, unsur-unsur masyarakat sipil, dan stakeholder lainnya sebagai pendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 khususnya diwilayah Kabupaten Lamongan.	
2	Rapat Koordinasi Pimpinan Bawaslu Kabupaten Lamongan dan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lamongan Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengawas Pemilu dan Sekretariat	Peserta Bimtek 89 (delapan puluh sembilan) orang terdiri 27 Ketua, Anggota Panwaslu Kecamatan dan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan, staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan	Bahwa dalam rangka penataan kelembagaan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lamongan	Pelembagaan Bawaslu berdasarkan prinsip kolektif kolegial. Ketua merupakan penanggung jawab dari seluruh tahapan pemilu. Ketua memegang kontrol internal seluruh fungsi dan tata kelola kelembagaan sedangkan Kepala	

	Pada Pemilu Serentak Tahun 2024	dan instansi terkait (Bakesbangpol Kabupaten Lamongan)		Sekretariat merupakan penanggung jawab seluruh administrasi (Administratur tertinggi)	
3	Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lamongan	Peserta Bimtek 89 (delapan puluh sembilan) orang terdiri 27 Ketua, Anggota Panwaslu Kecamatan dan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan, staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan dan instansi terkait (Bakesbangpol Kabupaten	Bahwa dalam rangka evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pencocokan dan penelitian daftar pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2024	Tujuan kegiatan dilaksanakan agar dalam pengawasan tersebut bisa berjalan lancar dan tercapai pengawasan yang maksimal guna mewujudkan daftar pemilih yang akurat, mutakhir dan komprehensif. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan	

		Lamongan)		Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	
--	--	---------------	--	---	--

4	Bimbingan Teknis Pengawasan Pemilu dan Pengelolaan Administrasi Kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lamongan Pada Pemilu Serentak Tahun 2024	Peserta Bimtek 89 (delapan puluh sembilan) orang terdiri 27 Ketua, Anggota Panwaslu Kecamatan dan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan, staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan dan instansi terkait (dari Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lamongan)	Bahwa dalam rangka evaluasi pelaksanaan pengawasan pencocokan dan penelitian daftar pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2024	Bahwa dalam rangka evaluasi pelaksanaan pengawasan pencocokan dan penelitian daftar pemilih pada Pemilu Serentak Tahun 2024	
5	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas	Peserta Bimtek 474 (empat	Bahwa dalam rangka peningkatan	Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang berintegritas	

	<p>Sumber Daya Manusia Panwaslu Kelurahan/ Desa Se-Kabupaten Lamongan Pada Pemilu Serentak Tahun 2024</p>	<p>ratus tujuh puluh empat) orang Panwaslu Kelurahan/ Desa yang hadir 464 (empat ratus enam puluh empat) orang, staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan dan instansi terkait (Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lamongan)</p>	<p>an Kapasitas Sumber Daya Manusia Panwaslu Kelurahan/ Desa Se-Kabupaten Lamongan</p>	<p>dan berkualitas, peserta wajib memahami tugas pokok dan fungsi pengawas Pemilu yang meliputi tiga aspek, yaitu Cegah, Awasi, dan Tindak. Pengawas pemilu harus memperkuat solidaritas, integritas, mentalitas, dan profesionalitas dalam bekerja. Tujuan dari bimtek ini agar PKD lebih mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing, sehingga dalam menjalankan tugas bisa lebih bersemangat dan paham</p>	
--	---	---	--	---	--

				rambu-rambu yang harus dilakukan dalam tiap tahapan pemilu.	
6	Rapat Koordinasi Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lamongan	Peserta Bimtek 89 (delapan puluh sembilan) orang terdiri 3 orang Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lamongan, staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan dan instansi terkait (Bakesbangpol Kabupaten Lamongan)	Bahwa dalam rangka optimalisasi pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Lamongan pada Pemilu Tahun 2024	Memberikan informasi kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lamongan terkait potensi dugaan pelanggaran pada tahapan Pencalonan meliputi : - POTENSI DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRAS I Misalnya dokumen persyaratan bacaleg tidak memenuhi syarat, KPU melakukan kesalahan prosedur; - POTENSI DUGAAN PELANGGARAN PIDANA	

				<p>Misalnya penggunaan dokumen palsu atau tidak sah</p> <ul style="list-style-type: none"> - POTENSI DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK - Penyele nggara pemilu melakukan perlakuan tidak sama terhadap peserta Pemilu, tidak professional dalam memberikan pelayanan. 	
7	Rapat Koordinasi Manajemen Sumber Daya Manusia Pengawas Pemilu dan Sekretariat Pada Pemilu Serentak Tahun 2024	Peserta kegiatan 89 (delapan puluh sembilan) orang terdiri 2 (dua) orang Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten	Bahwa dalam rangka optimalisasi pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Lamongan pada Pemilu	Panwaslu Kecamatan untuk selalu menuangkan hasil pengawasannya ke dalam Form A atau Laporan Hasil Pengawasan. Selain itu, Lilies memberi arahan kepada	

		Lamongan , 1 (satu) orang Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan dan instansi terkait (Bakesbangpol Kabupaten Lamongan)	Tahun 2024	Panwaslu Kecamatan untuk selalu berkoordinasi dengan jajaran Panwaslu Kecamatan, PKD, PPK serta PPS dan memiliki data hasil pengawasan sebagai pembanding dengan data PPK.	
8	Rapat Koordinasi Pimpinan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lamongan dengan tema Evaluasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Lamongan Pada	Peserta kegiatan 89 (delapan puluh sembilan) orang pelajar terdiri dari 81 orang Panwaslu Kecamatan, 1 orang dari eksternal (Bakesbangpol Kabupaten Lamongan	Bahwa dalam rangka evaluasi hasil pengawasan tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Lamongan pada Pemilu Tahun 2024	Mengharapkan semua kita tetap menjaga integritas dan sumpah janji jangan termakan rayuan yang menyebabkan kita keluar dari rel yang sebenarnya	

	Pemilu Tahun 2024) dan 7 orang sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan			
9	Rapat Koordinasi Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Konsolidasi Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2024	Peserta kegiatan 89 (delapan puluh sembilan) orang pelajar terdiri dari 81 orang Panwaslu Kecamatan, 1 orang dari eksternal (Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lamongan) dan 7 orang sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan	Bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan Panwaslu Kecamatan Tahun Anggaran 2023 yang akuntabel dan sesuai dengan standar yang ditetapkan	Diharapkan dapat menyelaraskan pemahaman dan persepsi seluruh jajaran Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Lamongan tentang pengelolaan administrasi keuangan, sehingga menciptakan ketertiban dalam administrasi dan menjadikan prosedur pelaksanaan anggaran di Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Lamongan menjadi seragam.	

				<p>Semua ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilu tahun 2024. Sebagai supporting system, penting bagi sekretariat Panwaslu Kecamatan memahami pola kerja dan tata kerja administratif di Panwaslu Kecamatan agar dapat mewujudkan pengawasan yang maksimal dalam pertanggungjawabannya.</p>	
10	Rapat Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan Daftar Pemilih Tambahan	Peserta kegiatan 89 (delapan puluh sembilan) orang pelajar	Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan	Pentingnya menjaga integritas dan transparansi dalam proses penyusunan DPT, DPTb, dan DPK. Hal	

	dan Daftar Pemilih Khusus Pada Pemilu Tahun 2024	terdiri dari 81 orang Panwaslu Kecamatan, 1 orang dari eksternal (Bakesbangpol Kabupaten Lamongan) dan 7 orang sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan	penyusunan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Pemilihan Umum Tahun 2024	ini akan memberikan dasar yang kuat bagi kelancaran pemilu yang demokratis dan inklusif pada tahun 2024, di mana suara setiap warga memiliki arti dan pengaruh yang sama. Dari kegiatan ini diharapkan Panwaslu Kecamatan dapat membuat Form A hasil pengawasan dengan benar dan sesuai serta dapat mengelola data dengan manajemen data yang akurat dan akuntabel.	
	Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan	Peserta kegiatan 89 (delapan puluh sembilan)	Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan	Memberikan pemahaman kepada Panwaslu Kecamatan mengenai	

	Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lamongan	orang pelajar terdiri dari 81 orang Panwaslu Kecamatan, 1 orang dari eksternal (Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan) dan 7 orang sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan	an khususnya pengawasan tahapan kampanye Pemilu Tahun 2024	Metode Kampanye, Fasilitasi, Serta Penentuan Titik Dalam Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Serta mekanisme penerbitan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) Kampanye Pemilu Tahun 2024 dan strategi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lamongan dalam masa tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024	
11	Rapat Koordinasi Evaluasi Hasil Pengawasan Pencalonan	Peserta kegiatan 89 (delapan puluh sembilan) orang	Bahwa dalam rangka evaluasi hasil pengawasan tahapan	Untuk memiliki kesepahaman kedepannya apa yang dilakukan apabila ada	

	Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pada Pemilu Tahun 2024	pelajar terdiri dari 81 orang Panwaslu Kecamatan, eksternal (Bakesbangpol Kabupaten Lamongan) dan sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan	Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Pemilu Tahun 2024.	kendala dalam pengawasan pencalonan verfak bakal calon DPD. Evaluasi pengawasan yang telah dilakukan dan membahas beberapa kendala di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan/desa. Jajaran Panwaslu Kecamatan diminta untuk melakukan pengawasan melekat dengan mendokumentasikan hasil pengawasannya, ia mengatakan itu adalah bagian dari prosedur pengawasan.	
12	Bimbingan Teknis Pengelolaan	Peserta kegiatan 89 (delapan	Bahwa dalam rangka tertib	Untuk Memperkuat kapasitas SDM Ketua,	

	<p>Administrasi Kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lamongan</p>	<p>puluh sembilan) orang pelajar terdiri dari 81 orang Panwaslu Kecamatan, eksternal (Bakesbangpol Kabupaten Lamongan) dan sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan</p>	<p>administrasi keuangan dan arsip hasil pengawasan Pemilu Tahun 2024.</p>	<p>Kepala Sekretariat dan Staf Pengelola Keuangan Panwaslu Kecamatan dalam mengelola aspek administrasi pengawasan dan keuangan dengan baik dan efektif dan Peningkatan Pemahaman Keuangan, Pengembangan Keterampilan, Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas, Kepatuhan terhadap Aturan dan Kebijakan, Pengelolaan Risiko, dan Peningkatan Kinerja Keuangan, serta memberikan pemahaman</p>	
--	--	---	--	---	--

				kepada peserta tentang pola hubungan pengawas pemilu dengan sekretariat	
13	Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Lingkup Bawaslu Kabupaten Lamongan Pada Pemilu Tahun 2024	Peserta kegiatan 50 (lima puluh) orang pelajar terdiri dari 27 orang Ketua Panwaslu Kecamatan, 20 orang Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan, dari eksternal (Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lamongan, Bagian Hukum Setda Kabupaten	Bahwa dalam rangka pembinaan dan penguatan kelembagaan jajaran Pengawas Pemilu	Penyelenggara pemilu yang memiliki kewenangan kompleks mulai dari pencegahan pelanggaran, pengawasan seluruh tahapan pemilu, penanganan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu. Artinya kualitas dan mutu dari pemilu juga yang menentukan adalah Bawaslu.	

		n Lamongan dan Bakesban gpol Kabupate n Lamongan) dan sekretariat Bawaslu Kabupate n Lamongan			
14	Rapat Koordinasi Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2024 dengan tema Pengelolaan Data Penanganan Pelanggaran	Peserta kegiatan 100 (seratus) orang pelajar terdiri dari 54 anggota Panwaslu Kecamatan dan sisanya 46 berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Lamongan, instansi terkait dan	Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan tahapan kampanye Pemilu Tahun 2024	Bawaslu sebagai lembaga Pengawas pemilu juga dituntut harus peka menjawab semua problematika pemilu dimulai dari persoalan daftar pemilih, Money Politik, Netralitas ASN, Akuntabilitas Penyelenggara dan Isu SARA. Keberhasilan terselenggaranya Pemilu	

		organisasi kemasyarakatan		yang aman dan berintegritas ditentukan oleh seperti apa lembaga penyelenggara pemilu menjalankan tugasnya dengan baik.	
15	Rapat Koordinasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pada Pemilu Tahun 2024 dengan tema Sinergi antara Bawaslu dan Pemerintah Daerah dalam mensukseskan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Lamongan	Peserta kegiatan 47 (empat puluh tujuh) orang dari eksternal	Bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan distribusi logistik agar hak pemilih tidak terganggu, maka Bawaslu Kabupaten Lamongan	Untuk melakukan sosialisasi, literasi, edukasi kepada masyarakat mengenai peraturan perundang-undangan pemilu, dan melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu.	

16	Rapat Koordinasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pada Pemilu Tahun 2024 dengan tema "Penanganan Dugaan Pelanggaran Pengadaan Pendistribusian Logistik Pemilu 2024"	Rapat Koordinasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pada Pemilu Tahun 2024 dengan tema "Penanganan Dugaan Pelanggaran Pengadaan Pendistribusian Logistik Pemilu 2024"	Bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan distribusi logistik sesuai dengan prinsip tepat jenis, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat biaya.	Sebagai informasi, untuk kelengkapan logistik Pemilu terdiri dari perlengkapan pemungutan suara yang meliputi Kotak Suara, Surat Suara, Tinta, Bilik Pemungutan Suara, Segel, alat untuk mencoblos pilihan, serta Tempat Pemungutan Suara. Sedangkan dukungan perlengkapan lainnya berupa sampul kertas, tanda pengenal, karet pengikat surat suara, lem atau perekat, kantong plastik, bolpoin, gembok, spidol,
----	--	--	--	--

				formulir, stiker nomor kotak suara, tali pengikat, alat untuk mencoblos pilihan, dan alat bantu tunanetra.	
17	Sosialisasi Persiapan Rekrutmen Pengawas TPS Pemilu Tahun 2024	Peserta kegiatan 100 (seratus) orang pelajar terdiri dari 54 anggota Panwaslu Kecamatan dan sisanya 46 berasal dari eksternal (OPD terkait dan Ormas)	Bahwa dalam rangka persiapan pembentukan Pengawas TPS Pemilu Tahun 2024	"Perekrutan PTPS yang akan dilakukan Panwascam dapat melakukan perekrutan dengan baik dengan supervisi dari Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Lamongan Panwascam akan melakukan perekrutan. Diharapkan PTPS ini bisa menjadi penyelesaian masalah, bukan membuat masalah dengan membentuk	

				<p>PTPS yang tangguh dan setelah dilakukan rekrutmen bisa segera bekerja. "Setelah perekrutan, PTPS akan mendapatkan pembekalan pada Januari 2024. Kita harus segera melakukan persiapan dan bekerja dengan sungguh-sungguh karena banyak yang mesti dilakukan jangan menunda-nunda</p>	
18	Sosialisasi Persiapan Rekrutmen Pengawas TPS Pemilu Tahun 2024	Peserta kegiatan 100 (seratus) orang pelajar terdiri dari 54 anggota Panwaslu Kecamatan			

		n dan sisanya 46 berasal dari eksternal (OPD terkait dan Ormas)			
--	--	---	--	--	--

Sumber : Laporan Keuangan Bawaslu Kabupaten Lamongan TA 2023

2. Penyediaan Wadah Konsultasi

Penyediaan wadah konsultasi sangat penting dalam pengambilan keputusan serta penyelesaian berbagai persoalan hukum dan teknis yang berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai pengawas pemilu. Wadah ini berfungsi sebagai saluran untuk mendapatkan masukan, arahan, dan solusi dari berbagai pihak yang kompeten, sehingga proses pengawasan pemilu dapat berlangsung dengan lebih tepat, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 3.17

Penyediaan Wadah Konsultasi

No	Panwascam yang berkonsultasi	Materi Konsultasi	Maksud dan Tujuan	Rekomendasi	Keterangan
1	27 Panwascam	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kinerja Pengawasan	Meningkatkan kemampuan SDM Panwascam dan Sekretariat	Pengadaan sewa Komputer dan Printer	

			dalam kegiatan Pengawasan Pemilu Tahun 2024		
--	--	--	---	--	--

3. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan merupakan hal yang sangat penting, sesuai dengan Perbawaslu dan Pedoman Teknis Pembinaan bagi Pengawas Pemilu. Namun, pada tahun 2022, Bawaslu Kabupaten Lamongan tidak dapat melaksanakan kegiatan ini akibat keterbatasan anggaran serta belum adanya petunjuk teknis yang jelas terkait pelaksanaan pendidikan dan pelatihan. Kendati demikian, upaya peningkatan kapasitas pengawas pemilu tetap menjadi prioritas, dengan harapan dapat dilaksanakan pada kesempatan yang akan datang ketika sumber daya dan pedoman teknis sudah tersedia.

4. Fasilitasi

Bawaslu Kabupaten Lamongan telah memberikan fasilitasi dalam penyusunan alat kerja pengawasan serta berbagai bentuk fasilitasi lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas pengawas pemilu kepada Panwaslu Kecamatan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengawas pemilu di tingkat kecamatan memiliki sarana dan dukungan yang diperlukan untuk menjalankan tugas pengawasan dengan efektif, memastikan proses pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Tabel 3.18 Fasilitasi

No	Panwaslu Kecamatan yang difasilitasi	Materi Fasilitasi	Maksud dan Tujuan	Hasil yang dicapai	Keterangan
1	27 Kecamatan	Penyusunan alat kerja pengawasan	fasilitasi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu	Peningkatan ketrampilan dan kemampuan dalam pelaksanaan tugas pengawasan Pemilu	-

Secara keseluruhan, perencanaan dan implementasi program kerja Bawaslu Kabupaten Lamongan menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan struktur kelembagaan. Melalui pendekatan ini, Bawaslu Kabupaten Lamongan dapat melaksanakan tugas pengawasan pemilu dengan lebih efisien, menjaga integritas dalam setiap tahap penyelenggaraan pemilu, serta membangun dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Strategi ini diharapkan dapat menciptakan pemilu yang transparan, akuntabel, dan mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang seutuhnya.

5. Program Dan Kegiatan Panwaslu Kecamatan

Pengawasan pada setiap tahapan Pemilu mencakup serangkaian aktivitas yang meliputi pemantauan, analisis, pemeriksaan, dan evaluasi terhadap proses penyelenggaraan Pemilu, dengan tujuan memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Definisi ini menjadi landasan penting dalam merumuskan tugas pengawasan Pemilu oleh para pengawas. Dalam implementasinya, pengawasan Pemilu tidak hanya diharapkan berfokus pada aspek teknis penyelenggaraan, namun juga harus mencerminkan komitmen yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan nilai-nilai demokrasi. Dengan demikian, pengawasan bukan sekadar rutinitas untuk mendeteksi dan menindak pelanggaran, tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang terkandung dalam norma perundang-undangan Pemilu.

Untuk melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenangnya sebagai pengawas Pemilu ad hoc, Panwaslu Kecamatan merancang program dan kegiatan kerja yang terstruktur dan terukur. Program-program ini disusun dengan mempertimbangkan skala prioritas, sehingga menghasilkan output dan outcome yang jelas serta dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian kinerja lembaga secara menyeluruh. Program dan kegiatan tersebut dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang berbasis anggaran APBN dan yang tidak berbasis anggaran APBN.

Panwaslu Kecamatan melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang terdiri dari beberapa inisiatif. Program Kegiatan Pencegahan difokuskan pada tindakan-tindakan preventif untuk menghindari pelanggaran Pemilu, dengan tujuan menciptakan proses Pemilu yang bersih dan sesuai dengan peraturan yang ada. Sementara itu, Program Kegiatan Pengawasan Partisipatif mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan Pemilu. Melalui peran serta masyarakat, program ini bertujuan untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan Pemilu.

Melalui perencanaan program yang terstruktur, penentuan prioritas yang strategis, serta dukungan anggaran yang mencukupi, Panwaslu Kecamatan diharapkan dapat menjalankan fungsi pengawasan Pemilu dengan optimal. Program-program ini dirancang tidak hanya untuk memastikan integritas dalam penyelenggaraan Pemilu, tetapi juga untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di tingkat kecamatan.

1. Realisasi Program dan Anggaran APBN

- a. Dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu Kabupaten Lamongan, khususnya Divisi SDM dan Organisasi, didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBN Tahun 2023. Anggaran ini dialokasikan untuk mendanai kegiatan operasional perkantoran serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas yang diemban oleh lembaga tersebut.

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Lamongan pada Tahun 2023, diperoleh informasi sebagai berikut:

Tabel 3.19

Kegiatan Bawaslu Kabupaten Lamongan Tahun 2023

No	Kegiatan		Keterangan
	Tanggal	Bentuk Kegiatan	
1	Setiap hari senin	Apel Pagi Setiap Hari Senin	Peserta pimpinan, Kasek, Kasubag dan Staf
2	14-02-2023	Bimbingan Teknis Pengawasan Pemilu dan Pengelolaan Administrasi Kesekretariatan dalam rangka Siaga Pengawasan Satu Tahun Menuju Pemilu Serentak Tahun 2024	Peserta Bimtek 89 (delapan puluh sembilan) orang terdiri 27 Ketua dan Kordiv. Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas Panwaslu Kecamatan serta Staf Panwaslu Kecamatan, staf secretariat Bawaslub Kabupaten Lamongan dan instansi terkait (Bakesbangpol Kabupaten Lamongan)
3	14-03-2023	Rapat Koordinasi Pimpinan Bawaslu Kabupaten Peserta Bimtek 89 (delapan puluh sembilan) orang terdiri 27 Ketua, Anggota Panwaslu Kecamatan dan Kepala Sekretariat	Peserta Bimtek 89 (delapan puluh sembilan) orang terdiri 27 Ketua, Anggota Panwaslu Kecamatan dan Kepala Sekretariat

		Kecamatan dan Kepala Sekretariat Lamongan dan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lamongan Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengawas Pemilu dan Sekretariat Pada Pemilu Serentak Tahun 2024	Panwaslu Kecamatan, staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan dan instansi terkait (Bakesbangpol Kabupaten Lamongan)
4	54-03-2023	Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lamongan	Peserta Bimtek 89 (delapan puluh sembilan) orang terdiri 27 Ketua, Anggota Panwaslu Kecamatan dan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan, staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan dan instansi terkait (Bakesbangpol Kabupaten Lamongan)
5	21-03-2023	Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan tema "Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum Pemilu di Kabupaten Lamongan Pada Pemilu Serentak Tahun 2024"	Peserta kegiatan 34 (tiga puluh empat) orang terdiri alumni Organisasi Kemasyarakatan dan Mahasiswa yang ada di Kabupaten Lamongan, dan Sekretariat Bawaslu

			Kabupaten Lamongan
6	04-04-2023	Bimbingan Teknis Pengawasan Pemilu dan Pengelolaan Administrasi Kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lamongan Pada Pemilu Serentak Tahun 2024	Peserta Bimtek 89 (delapan puluh sembilan) orang terdiri 27 Ketua, Anggota Panwaslu Kecamatan dan Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan, staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan dan instansi terkait (dari Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lamongan)
7	17 sd 20-12-2023	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Panwaslu Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Lamongan Pada Pemilu Serentak Tahun 2024	Peserta Bimtek 474 (empat ratus tujuh puluh empat) orang Panwaslu Kelurahan/Desa yang hadir 464 (empat ratus enam puluh empat) orang, staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan dan instansi terkait (Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lamongan)
8	26-07-2023	Rapat Koordinasi Pengawasan	Peserta Bimtek 89 (delapan puluh sembilan) orang

		Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Panwaslu Kecamatan Se- Kabupaten Lamongan	terdiri 3 orang Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lamongan, staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan dan instansi terkait (Bakesbangpol Kabupaten Lamongan)
9	09-09-2023	Rapat Koordinasi Manajemen Sumber Daya Manusia Pengawas Pemilu dan Sekretariat Pada Pemilu Serentak Tahun 2024	Peserta kegiatan 89 (delapan puluh sembilan) orang terdiri 2 (dua) orang Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lamongan, 1 (satu) orang Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan dan instansi terkait (Bakesbangpol Kabupaten Lamongan)
10	20-09-2023	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan tema "Partisipasi Mahasiswa dan Pelajar dalam Mensukseskan Pemilu 2024 di Kabupaten Lamongan."	Peserta kegiatan 82 (delapan puluh dua) orang pelajar dan mahasiswa serta 7 (tujuh) sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan

11	27-09-2023	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif dengan tema "Peran Serta Masyarakat Lawan Politisasi SARA dan Berita Hoax Menuju Demokrasi Sehat dalam Pemilu Tahun 2024"	Peserta kegiatan 82 (delapan puluh dua) orang eksternal serta 7 (tujuh) sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan
12	30-09-2023	Sosialisasi dan Implementasi Peraturan dan Non Peraturan Bawaslu Pada Pemilu Tahun 2024	Peserta kegiatan 82 (delapan puluh dua) orang eksternal serta 7 (tujuh) sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan
13	28-10-2023	Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif Bersama Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dan Stakeholder terkait Menjelang Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024	Peserta kegiatan 82 (delapan puluh dua) orang terdiri dari perwakilan partai politik, organisasi masyarakat dan stakeholder terkait dan sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan
14	16 sd 17-11-2023	Rapat Koordinasi Pimpinan Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lamongan dengan tema Evaluasi	Peserta kegiatan 89 (delapan puluh sembilan) orang pelajar terdiri dari 81 orang Panwaslu Kecamatan, 1 orang

		Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Lamongan Pada Pemilu Tahun 2024	dari eksternal (Bakesbangpol Kabupaten Lamongan) dan 7 orang sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan
15	18 sd 19-11-2023	Rapat Koordinasi Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Konsolidasi Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 Dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2024	Peserta kegiatan 89 (delapan puluh sembilan) orang pelajar terdiri dari 81 orang Panwaslu Kecamatan, 1 orang dari eksternal (Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lamongan) dan 7 orang sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan
16	20-11-2023	Sosialisasi dan Implementasi Peraturan dan Non Peraturan Bawaslu Pada Pemilu Tahun 2024 dengan tema Penyamaan Persepsi Menjelang Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024	Peserta kegiatan 82 (delapan puluh dua) orang terdiri dari 75 (tujuh puluh lima) peserta eksternal serta dan 7 (tujuh) peserta internal dari sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan

17	21 sd 22-11-2023	Rapat Koordinasi Pengawasan Sub Tahapan Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih Khusus Pada Pemilu Tahun 2024	Peserta kegiatan 89 (delapan puluh sembilan) orang pelajar terdiri dari 81 orang Panwaslu Kecamatan, 1 orang dari eksternal (Bakesbangpol Kabupaten Lamongan) dan 7 orang sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan
18	1 sd 2-12-2023	Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lamongan	Peserta kegiatan 89 (delapan puluh sembilan) orang pelajar terdiri dari 81 orang Panwaslu Kecamatan, 1 orang dari eksternal (Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan) dan 7 orang sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan
19	5 sd 6-12-2023	Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Dengan Tema: Netralitas ASN/TNI/POLRI Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Lamongan	Peserta kegiatan 47 (empat puluh tujuh) orang dari eksternal
20	9 sd 10-12-2023	Rapat Koordinasi Evaluasi Hasil Pengawasan	Peserta kegiatan 89 (delapan puluh sembilan) orang

		Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pada Pemilu Tahun 2024	pelajar terdiri dari 81 orang Panwaslu Kecamatan, eksternal (Bakesbangpol Kabupaten Lamongan) dan sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan
21	11-12-2023	Bimbingan Teknis Pengelolaan Administrasi Kesekretariatan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Lamongan	Peserta kegiatan 89 (delapan puluh sembilan) orang pelajar terdiri dari 81 orang Panwaslu Kecamatan, eksternal (Bakesbangpol Kabupaten Lamongan) dan sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan
22	12-12-2023	Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan Lingkup Bawaslu Kabupaten Lamongan Pada Pemilu Tahun 2024	Peserta kegiatan 50 (lima puluh) orang pelajar terdiri dari 27 orang Ketua Panwaslu Kecamatan, 20 orang Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan, dari eksternal (Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Lamongan, Bagian Hukum Setda Kabupaten Lamongan dan

			Bakesbangpol Kabupaten Lamongan) dan secretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan
23	13-12-2023	Rapat Koordinasi Pengawasan Kampanye Pemilu Tahun 2024 dengan tema Pengelolaan Data Penanganan Pelanggaran	Peserta kegiatan 100 (seratus) orang pelajar terdiri dari 54 anggota Panwaslu Kecamatan dan sisanya 46 berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Lamongan, instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan
24	14 sd 15-12-2023	Rapat Koordinasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pada Pemilu Tahun 2024 dengan tema Sinergi antara Bawaslu dan Pemerintah Daerah dalam mensukseskan Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Lamongan	Peserta kegiatan 47 (empat puluh tujuh) orang dari eksternal
25	16-12-2023	Rapat Koordinasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian	Rapat Koordinasi Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pada Pemilu

		Logistik Pada Pemilu Tahun 2024 dengan tema "Penanganan Dugaan Pelanggaran Pengadaan Pendistribusian Logistik Pemilu 2024"	Tahun 2024 dengan tema "Penanganan Dugaan Pelanggaran Pengadaan Pendistribusian Logistik Pemilu 2024"
26	20 sd 21-12-023	Fasilitasi Pelatihan Saksi Peserta Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Lamongan	Peserta kegiatan 54 (lima puluh empat) orang eksternal (perwakilan partai politik) peserta Pemilu Tahun 2024 tingkat Kabupaten Lamongan dan 9 (sembilan) Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lamongan
27	24-12-2023	Sosialisasi Persiapan Rekrutmen Pengawas TPS Pemilu Tahun 2024	Peserta kegiatan 100 (seratus) orang pelajar terdiri dari 54 anggota Panwaslu Kecamatan dan sisanya 46 berasal dari eksternal (OPD terkait dan Ormas)

Sumber : Divisi SDM, Organisasi dan Diklat Bawaslu Kabupaten Lamongan

b. Program dan Kegiatan yang Tidak didukung Anggaran

Pada tahun anggaran 2023, dukungan anggaran untuk kegiatan operasional dan pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Lamongan secara umum dinilai memadai. Namun, terdapat beberapa keterbatasan yang dirasakan, khususnya dalam

memenuhi kebutuhan tertentu untuk mendukung pelaksanaan sejumlah kegiatan secara optimal.

c. Besaran serapan anggaran

Pada tahun anggaran 2023, Bawaslu Kabupaten Lamongan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 23.576.707.000,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah). Dari total anggaran tersebut, serapan yang terealisasi mencapai Rp 19.259.228.978,00 (sembilan belas miliar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah). Detail penggunaan anggaran tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.20
Besaran Serapan Tahun Anggaran 2023

No	Kode KRO/RO	Deskripsi	Besaran Anggaran	Besaran Serapan	Keterangan
		Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan	23.576.707. 000	19.259.228. 978	81,69%
1	115.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI	21.863.837. 000	17.726.445. 856	81,08%
	115.CQ.5 245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN	78.099.000	59.751.568	76,51%

		BAWASLU KABUPATEN/KOTA			
	5245.BA H	Pelayanan Publik Lainnya	12.760.000	5.914.933	46,36%
	001	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	12.760.000	5.914.933	46,36%
	301	Koordinasi penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	6.380.000	2.584.500	40,51%
	302	Koordinasi penyelesaian sengketa proses (Kab./Kota)	6.380.000	3.330.433	52,20%
	5245.BK C	Pemantauan Lembaga	65.339.000	53.836.635	82,40%
	001	Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	65.339.000	53.836.635	82,40%
	301	Pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)	18.380.000	14.805.000	80,55%
	302	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	32.410.000	30.917.635	95,40%

	303	Evaluasi pelaksanaan pengawasan (Kab./Kota)	5.049.000	414.000	8,20%
	305	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (Kab./Kota)	9.500.000	7.700.000	81,05%
	115.CQ.661	PERENCANAAN, PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU	4.005.248.000	3.033.786.546	75,75%
	6661.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	4.005.248.000	3.033.786.546	75,75%
	001	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	3.149.119.000	2.204.655.546	70,01%
	301	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu (Kab./Kota)	49.570.000	1.090.000	2,20%
	302	Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu (Kab./Kota)	118.142.000	76.473.278	64,73%

	303	Fasilitasi dan pembinaan aparaturngawas pemilu (Kab./Kota)	289.095.000	198.295.359	68,59%
	304	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif (Kab./Kota)	120.930.000	80.835.000	66,84%
	305	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran (Kab./Kota)	145.310.000	103.234.003	71,04%
	306	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa (Kab./Kota)	35.950.000	9.580.500	26,65%
	307	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kab./Kota)	453.297.000	426.350.727	94,06%
	308	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu (Kab./Kota)	87.460.000	53.576.679	61,26%
	401	Fasilitasi dan pembinaan aparaturngawas pemilu (Kecamatan)	1.444.365.000	983.870.000	68,12%
	402	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan (Kecamatan)	405.000.000	271.350.000	67,00%
	003	Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc	856.129.000	829.131.000	96,85%

	401	Rekrutmen panwaslu desa/kelurahan (Kecamatan)	856.129.000	829.131.000	96,85%
	115.CQ.6 662	PENGAWASAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU	3.445.000	3.444.500	99,99%
	6662.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	3.445.000	3.444.500	99,99%
	001	Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	3.445.000	3.444.500	99,99%
	303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu (Kab./Kota)	3.445.000	3.444.500	99,99%
	115.CQ.6 838	PENGAWASAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU	13.230.534.000	12.721.588.000	96,15%
	6838.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	13.230.534.000	12.721.588.000	96,15%
	001	Honorarium Pengawas Ad-Hoc	10.870.800.000	10.846.050.000	99,77%

	401	Honorarium (Kecamatan)	5.135.400.000	5.119.450.000	99,69%
	501	Honorarium (Kelurahan/Desa)	5.735.400.000	5.726.600.000	99,85%
	002	Operasional Pengawas Ad-Hoc	2.359.734.000	1.875.538.000	79,48%
	301	Sewa kendaraan operasional (Kab./Kota)	182.700.000	79.645.000	43,59%
	302	Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kab./Kota)	71.382.000	-	0,00%
	402	Sewa gedung/ peralatan/ meubelair (Kecamatan)	1.134.000.000	964.575.000	85,06%
	404	Pelayanan operasional perkantoran (Kecamatan)	876.852.000	736.992.000	84,05%
	502	Penanda Identitas (Kelurahan/Desa)	94.800.000	94.326.000	99,50%
	115.CQ.6839	PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	2.084.440.000	725.245.000	34,79%
	6839.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	2.052.520.000	725.245.000	35,33%
	001	Pengawasan Pemutakhiran Data	2.052.520.000	725.245.000	35,33%

		Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih			
	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	9.550.000	-	0,00%
	302	Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	112.880.000	87.055.000	77,12%
	303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	69.160.000	-	0,00%
	401	Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kecamatan)	211.410.000	140.940.000	66,67%
	501	Pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kelurahan/Desa)	1.649.520.000	497.250.000	30,15%

	6839.QC E	Penanganan Perkara	31.920.000	-	0,00%
	001	Penanganan Pelanggaran Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih	31.920.000	-	0,00%
	302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih (Kab./Kota)	31.920.000	-	0,00%
	115.CQ.6 841	PENGAWASAN PENETAPAN JUMLAH KURSI DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN	2.126.000	2.126.000	100,00%
	6841.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	2.126.000	2.126.000	100,00%
	001	Pengawasan Penetapan Jumlah Kursi Dan Penetapan Daerah Pemilihan	2.126.000	2.126.000	100,00%
	301	Publikasi dan dokumentasi penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Kab./Kota)	1.306.000	1.306.000	100,00%

	302	Pengawasan penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan (Kab./Kota)	820.000	820.000	100,00%
	115.CQ.6 842	PENGAWASAN PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SERTA ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA	476.070.000	255.523.242	53,67%
	6842.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	378.720.000	253.226.365	66,86%
	001	Pengawasan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	378.720.000	253.226.365	66,86%
	301	Publikasi dan dokumentasi pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	17.010.000	6.523.500	38,35%
	302	Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres	165.980.000	134.837.865	81,24%

		serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)			
	303	Fasilitasi sentra gakkumdu tahapan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	28.330.000	1.300.000	4,59%
	401	Pengawasan pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kecamatan)	167.400.000	110.565.000	66,05%
	6842.QC E	Penanganan Perkara	97.350.000	2.296.877	2,36%
	001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	97.350.000	2.296.877	2,36%
	301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	29.080.000	-	0,00%

	302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	36.880.000	2.296.877	6,23%
	303	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses pencalonan Presiden dan Wapres serta anggota DPR, DPD dan DPRD (Kab./Kota)	31.390.000	-	0,00%
	6843	PENGAWASAN MASA KAMPANYE PEMILU	983.481.000	679.766.000	69,12%
	6843.QC E	Penanganan Perkara	137.296.000	61.710.000	44,95%
	6843.QC E.001	Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Masa Kampanye	137.296.000	61.710.000	44,95%
	301	Pengelolaan data penanganan pelanggaran	97.900.000	61.710.000	63,03%
	302	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran	22.226.000	0	0,00%
	303	Pengelolaan barang duga pelanggaran	5.890.000	0	0,00%

	304	Pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	11.280.000	-	0,00%
	6843.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	846.185.000	618.056.000	73,04%
	6843.QIC .001	Pengawasan Masa Kampanye	846.185.000	618.056.000	73,04%
	301	Publikasi dan dokumentasi	31.580.000	-	0,00%
	302	Pengawasan tahapan masa kampanye	297.505.000	110.550.000	37,16%
	303	Fasilitasi sentra gakkumdu	10.100.000	506.000	5,01%
	401	Publikasi dan dokumentasi	135.000.000	135.000.000	100,00%
	402	Pengawasan tahapan masa kampanye	135.000.000	135.000.000	100,00%
	501	Pengawasan tahapan masa kampanye	237.000.000	237.000.000	100,00%
	6845	PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA	170.940.000	45.100.000	26,38%

	6845.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	170.940.000	45.100.000	26,38%
	6845.QIC .001	Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara	170.940.000	45.100.000	26,38%
	304	Fasilitasi pelatihan saksi parpol (Kab./Kota)	170.940.000	45.100.000	26,38%
	6848	PENGAWASAN LOGISTIK	829.454.000	200.115.000	24,13%
	6848.QC E	Penanganan Perkara	121.480.000	63.360.000	52,16%
	6848.QC E.001	Penanganan Pelanggaran Logistik	121.480.000	63.360.000	52,16%
	301	Penyelenggaraan penanganan pelanggaran	97.100.000	59.760.000	61,54%
	302	Fasilitasi dan pengelolaan barang dugaan pelanggaran	24.380.000	3.600.000	14,77%
	6848.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	707.974.000	136.755.000	19,32%
	6848.QIC .001	Pengawasan Logistik	707.974.000	136.755.000	19,32%

	301	Publikasi dan dokumentasi	31.699.000	-	0,00%
	302	Pengawasan pengadaan dan distribusi logistik	159.225.000	39.874.000	25,04%
	303	Fasilitasi sentra gakkumdu	10.050.000	506.000	5,03%
	401	Publikasi dan dokumentasi	135.000.000	16.875.000	12,50%
	402	Pengawasan distribusi logistik	135.000.000	20.250.000	15,00%
	501	Pengawasan logistik (Kelurahan/Desa)	237.000.000	59.250.000	25,00%
2	115.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	1.712.870.000	1.532.783.122	89,49%
	4355	PEMERIKSAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN INTERNAL	6.055.000	-	0,00%
	4355.EB D	Layanan Manajemen Kinerja Internal	6.055.000	-	0,00%

	961	Layanan Reformasi Kinerja	6.055.000	-	0,00%
	301	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kab/Kota	6.055.000	-	0,00%
	4356	PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI	13.376.000	7.504.000	56,10%
	4356.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	13.376.000	7.504.000	56,10%
	958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Bawaslu	8.225.000	3.949.000	48,01%
	301	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	8.225.000	3.949.000	48,01%
	963	Layanan Data dan Informasi	5.151.000	3.555.000	69,02%
	301	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	5.151.000	3.555.000	69,02%

6849	PENGELOLAAN KEUANGAN, BMN, DAN UMUM	1.611.404.000	1.472.600.350	91,39%
6849.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1.575.464.000	1.448.671.950	91,95%
956	Layanan BMN	13.260.000	4.515.651	34,05%
301	Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	13.260.000	4.515.651	34,05%
994	Layanan Perkantoran	1.562.204.000	1.444.156.299	92,44%
001	Gaji dan tunjangan	772.240.000	734.792.900	95,15%
002	Operasional dan pemeliharaan kantor	789.964.000	709.363.399	89,80%
6849.EB D	Layanan Manajemen Kinerja Internal	35.940.000	23.928.400	66,58%
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	5.505.000	2.432.000	44,18%
301	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	5.505.000	2.432.000	44,18%

	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	5.220.000	3.977.000	76,19%
	301	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kab/Kota	5.220.000	3.977.000	76,19%
	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	16.645.000	15.622.900	93,86%
	301	Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	16.645.000	15.622.900	93,86%
	EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan Bawaslu	8.570.000	1.896.500	22,13%
	301	Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	8.570.000	1.896.500	22,13%
	6850	PENGELOLAAN ORGANISASI DAN SDM	82.035.000	52.678.772	64,21%
	6850.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	18.830.000	6.430.249	34,15%
	957	Layanan Hukum	11.525.000	2.816.249	24,44%

	301	Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	5.025.000	2.816.249	56,04%
	302	Kajian hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	6.500.000	-	0,00%
	962	Layanan Umum	7.305.000	3.614.000	49,47%
	301	Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota	7.305.000	3.614.000	49,47%
	6850.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	63.205.000	46.248.523	73,17%
	954	Layanan Manajemen SDM	63.205.000	46.248.523	73,17%
	301	Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kab/Kota	63.205.000	46.248.523	73,17%

BAGIAN 4

KERJA PENGAWAS PEMILU AD HOC

1. Pencegahan

Panwaslu kecamatan memiliki peran strategis sebagaimana diatur dalam pasal 105 UU Nomor 7 Tahun 2017, yaitu mencegah dan menangani pelanggaran pemilu di wilayahnya. Prioritas utama dalam upaya pencegahan yaitu melakukan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran pada setiap tahapan pemilu. Maka pengawas ad hoc melakukan pemetaan risiko pelanggaran berdasarkan dua aspek utama yaitu pengawasan yang berfokus pada pencegahan melalui edukasi masyarakat tentang potensi pelanggaran serta pemanfaatan pengalaman dan data dari penyelenggaraan pemilu sebelumnya sebagai mitigasi.

Langkah pencegahan juga dilakukan melalui sosialisasi, baik secara daring maupun luring atau tatap muka. Dalam konteks daring, pengawas ad hoc Bawaslu menggunakan teknologi informasi dan media sosial untuk menyebarkan konten edukatif seperti berita, flyer, video dan infografis. Pengawas ad hoc mempublikasikan berita tentang kegiatan pengawas pemilu 2024, penyebaran flyer tentang pendidikan politik, serta infografis yang memuat data terkait tindakan pencegahan dan penanganan pelanggaran.

Pengawas pemilu di Kabupaten Lamongan, secara keseluruhan telah menunjukkan konsistensi dalam upaya pencegahan di setiap tahapan dan non-tahapan Pemilu 2024.

Upaya tersebut merupakan komitmen Bawaslu dalam memastikan bahwa setiap proses Pemilu berlangsung secara sesuai dan akuntabel. Pencegahan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan langkah yang strategis untuk memastikan proses demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparan, dan akuntabel. Pada Pemilu 2024, pencegahan tidak hanya menjadi tanggungjawab pengawas Pemilu di tingkat nasional, tetapi juga melibatkan berbagai elemen,, termasuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) dan masyarakat. Melalui kolaborasi dan pendekatan yang terencana, berbagai bentuk pencegahan dirancang untuk mengantisipasi potensi pelanggaran, memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu, serta memastikan setiap tahapan Pemilu berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa bentuk pencegahan yang telah dilaksanakan adalah:

1. Identifikasi Kerawanan

Pencegahan pelanggaran pemilu dapat dilakukan melalui langkah identifikasi kerawanan yang bertujuan untuk mengenali potensi risiko dan titik rawan yang dapat mengganggu integritas proses pemilu. Kegiatan Pencegahan dalam bentuk Identifikasi Kerawanan yang dilakukan sebanyak 18.099 yang dilakukan oleh jajaran ad hoc Bawaslu Kabupaten Lamongan. Bawaslu Kabupaten Lamongan melakukan beberapa hal. Pertama, penelitian

dan pengumpulan data. Bawaslu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengumpulkan data terkait potensi pelanggaran yang dapat terjadi seperti politik uang, pemalsuan data pemilih, kampanye hitam maupun pelanggaran administratif yang lain.

Kedua, pemetaan daerah rawan konflik. Bawaslu melakukan memetakan daerah-daerah yang memiliki potensi kerawanan yang tinggi baik dari sisi sosial, politik, ekonomi maupun gangguan keamanan yang lain. Pemetaan penting dilakukan untuk memberikan perhatian lebih pada daerah-daerah yang memiliki kerawanan tinggi terhadap potensi pelanggaran dan sengketa. Ketiga, pendalaman isu lokal. Bawaslu melakukan pendalaman terhadap isu-isu lokal yang mungkin menjadi faktor kerawanan seperti adanya persaingan yang ketat antar calon atau potensi ketidakpuasan masyarakat terhadap proses pemilu yang dapat memicu ketegangan. Maka Bawaslu Kabupaten Lamongan memiliki kesiapan dalam melakukan langkah pencegahan yang tepat.

2. Pendidikan

Pencegahan pemilu dalam bentuk pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih termasuk risiko dan dampak negatif dari praktik seperti politik uang, kampanye hitam, atau penyebaran informasi palsu. Program pendidikan ini dapat dilakukan melalui berbagai

cara seperti sosialisasi langsung, lokakarya, kampanye digital atau materi edukatif yang mudah diakses. Bawaslu Kabupaten Lamongan melakukan pencegahan dalam bentuk Pendidikan yang dilakukan sebanyak 385 yang dilakukan oleh jajaran adhoc Bawaslu Kabupaten Lamongan.

Beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya *pertama*, sosialisasi kepada masyarakat. Bawaslu Kabupaten Lamongan mengadakan sosialisasi di berbagai daerah secara massif untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengawasan pemilu. *Kedua*, pendidikan pengawasan partisipatif. Bawaslu Kabupaten Lamongan menyelenggarakan pelatihan dan workshop bagi masyarakat, organisasi masyarakat sipil dan kelompok pemuda untuk membekali mereka keterampilan dan pengetahuan dalam melakukan pengawasan Pemilu sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga integritas Pemilu. Melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan pendidikan tersebut, Bawaslu Kabupaten Lamongan berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengawasan Pemilu serta mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam memastikan Pemilu berjalan dengan adil dan transparan.

3. Partisipasi Masyarakat

Pencegahan pelanggaran Pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu atau lembaga terkait,

tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat. Oleh karena itu, program penting yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lamongan adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan pengawasan partisipatif. Kegiatan Pencegahan dalam bentuk Partisipasi Masyarakat yang dilakukan sebanyak 608 yang dilakukan oleh jajaran adhoc Bawaslu Kabupaten Lamongan.

Bawaslu turut mengajak masyarakat untuk melakukan pengawasan secara langsung dan melaporkan tindakan pelanggaran yang terjadi di lapangan. Kegiatan-kegiatan pendidikan yang dilakukan sebelumnya dapat membekali masyarakat memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam melakukan pengawasan Pemilu sehingga masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga integritas Pemilu. Bawaslu Kabupaten Lamongan memfasilitasi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran Pemilu melalui berbagai saluran baik secara langsung maupun online melalui saluran yang disediakan oleh Bawaslu. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran menjadi salah satu elemen penting dalam mencegah pelanggaran dan sengketa.

4. Kerja Sama

Tugas pengawasan dalam penyelenggaraan Pemilihan umum merupakan tugas semua lapisan masyarakat baik perorangan maupun kelembagaan.

Bawaslu tidak dapat berjalan sendiri dalam mengawasi setiap tahapan Pemilu karena keterbatasan-keterbatasannya. Maka sangat penting untuk bekerjasama dengan pihak-pihak lain seperti Lembaga/Institusi/Organisasi /Individu yang memiliki pengaruh di dalam masyarakat di mana lembaga atau institusi tersebut memiliki relevansi dengan tugas Bawaslu.

Guna memastikan Pemilu yang jujur, adil dan transparan, Bawaaslu melakukan kegiatan pencegahan dalam bentuk Kerja sama yang dilakukan sebanyak 1.838. Kerja sama dengan berbagai lembaga tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu. Kerja sama ini merupakan bagaian dari Upaya Bawaslu untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Pemilu dan menciptakan pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat serta berbagai pihak untuk memastikan setiap tahapan Pemilu dijalankan dengan integritas yang tinggi. Tujuan utama dari kerja sama dalam Pemilu adalah untuk menciptakan sistem pengawasan yang kuat, sinergis dan memiliki dampak langsung terhadap kualitas pelaksanaan Pemilu dan mengoptimalkan fungsi-fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu.

Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa secara aktif menjalin koordinasi dan konsolidadi dengan para pemangku kepentingan

(stakeholders) serta peserta [emilu di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa. Langkah ini bertujuan mendorong keterlibatan aktif dalam mengawasi proses Pemilu 2024 sekaligus memperkuat kerja sama dalam menciptakan Pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil).

Selain itu, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa berusaha memperluas peran para pemangku kepentingan sebagai mitra pengawas. Partisipasi ini tidak hanya ditujukan untuk mencegah pelanggaran tetapi juga untuk memastikan prinsip kesetaraan dan keadilan dalam demokrasi tetap terjaga. Dengan melibatkan masyarakat dan stakeholder dalam pengawasan, hak pilih warga dapat dihormati dan kualitas pelaksana Pemilu sebagai pesta demokrasi dapat semakin ditingkatkan.

5. Publikasi

Pencegahan pelanggaran dilakukan dengan melalui sosialisasi baik secara daring maupun tatap muka. Dalam ranah darinh, pengawas ad hoc Bawaslu memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial untuk menyebarkan konten edukatif seperti berita, flyer, video dan infografis. Pengawas ad hoc mempublikasikan berita tentang kegiatan pengawas Pemilu 2024 seperti flyer tentang pendidikan politik serta infografis yang memuat data terkait tindakan pencegahan dan penanganan

pelanggaran. Adapun Kegiatan Pencegahan dalam bentuk Publikasi yang dilakukan sebanyak 3.135 yang dilakukan oleh jajaran adhoc Bawaslu Kabupaten Lamongan

6. Naskah Dinas

Naskah dinas dalam pencegahan pelanggaran pemilu memiliki peran penting sebagai sarana komunikasi resmi antara Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa dan berbagai berbagai pemangku kepentingan terkait, baik tingkat daerah maupun instansi yang lebih tinggi. Naskah dinas ini berfungsi untuk mengkoordinasikan langkah-langkah strategis dalam mencegah pelanggaran, seperti sosialisasi peraturan pemilu, pelaksanaan patroli pengawasan, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Adapun Kegiatan Pencegahan dalam bentuk Naskah Dinas yang dilakukan sebanyak 9032 yang dilakukan oleh jajaran adhoc Bawaslu Kabupaten Lamongan

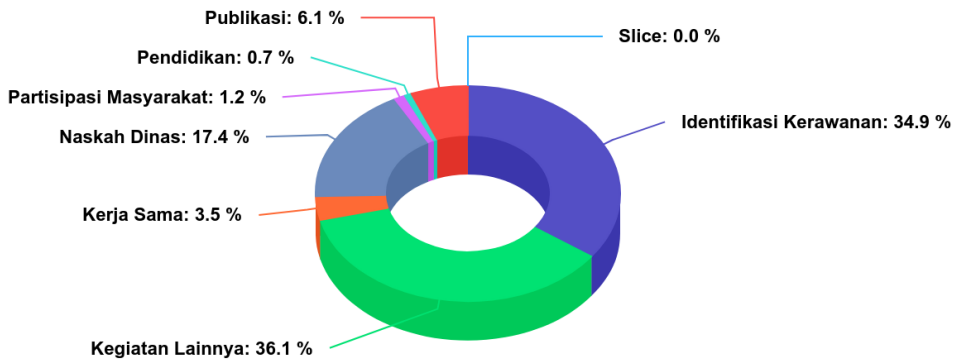
Melalui surat resmi ini, Panwaslu menyampaikan instruksi, mengajak kolaborasi, dan memberikan informasi penting mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjaga kelancaran dan integritas Pemilu. Naskah dinas juga mencerminkan komitmen terhadap transparansi, akuntabel serta pengawasan yang efektif dengan harapan agar Pemilu dapat terlaksana sesuai

dengan prinsip demokrasi yang jujur, adil dan bebas dari pelanggaran.

7. Kegiatan Lainnya

Adapun Kegiatan Pencegahan dalam bentuk Kegiatan Lainnya yang dilakukan sebanyak 18697 yang dilakukan oleh jajaran adhoc Bawaslu Kabupaten Lamongan.

Pencegahan Pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan langkah strategis untuk memastikan proses demokrasi berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi dan akuntabel. Pencegahan-pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Lamongan ditampilkan dalam data tabel berikut:



Highcharts.com

2. Kerja Pengawasan

Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Lamongan beserta Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Lamongan dan Pengawas TPS dalam melaksanakan tugas pengawasan selalu berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya:

1. Undang-Undang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
4. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum; dan
5. Surat Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Selain itu, dalam menjalankan tugasnya, Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Lamongan beserta Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Lamongan dan Pengawas TPS memperhatikan beberapa hal berikut:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum;
3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum;
4. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum; dan
5. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Pengawas Pemilu Kabupaten Lamongan memiliki peran yang strategis dalam pengawasan Pemilu 2024, terutama pada pemetaan potensi kerawanan pada tahapan pemungutan suara.

Kerawanan tersebut terbagi menjadi dua kategori yaitu pertama, tahap persiapan. Potensi kerawanan meliputi kampanye yang berlangsung pada tahap pemungutan suara, daftar pasangan calon, DPTB, ketidaksesuaian pengumuman daftar pemilih, tata letak TPS yang tidak memadai, maupun terdapat potensi surat pemberitahuan yang tidak tersampaikan kepada pemilih sehingga penyelenggara Pemilu merangkap sebagai saksi peserta Pemilu. Kedua, tahap pelaksanaan. Kerawanan yang diidentifikasi meliputi praktik-praktik politik uang, ketidakhadiran petugas KPPS, keterlibatan pihak yang dilarang. Kerawanan lainnya mencakup gangguan keamanan seperti kerusuhan, bencana alam di TPS, terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) yang tetap memberikan suara, serta pemilih yang memenuhi syarat (MS) yang tidak menggunakan hak pilihnya. Selain itu, ditemukan potensi ketidakhadiran pemilih sesuai waktu yang telah ditentukan, mobilisasi pemilih oleh tim kampanye, dan ketidaknetralan penyelenggara di TPS.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai kerawanan tersebut, pengawas Pemilu menyusun rencana pengawasan pada tahap persiapan dan pelaksanaan pemungutan suara. Pada tahap persiapan, pengawas Pemilu memastikan KPPS telah mempersiapkan TPS sesuai ketentuan, menempelkan DPT, DPTB, daftar pasangan calon, dan DCT dilokasi yang strategis serta mendistribusikan salinan DPT dan DPTB kepada saksi dan PTPS. Pada tahap pelaksanaan, Bawaslu memastikan KPPS melayani pemilih sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melalui upaya ini,

pengawas Pemilu Kabupaten Lamongan berkomitmen untuk melakukan pencegahan pelanggaran, menjaga integritas Pemilu serta menjamin proses pemungutan suara berlangsung secara transparan adil dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang berintegritas dan berkualitas, Panwaslu Kecamatan serta Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) memegang peran penting dalam mengawasi setiap tahapan Pemilu 2024. Tugas utama mereka mencakup tiga aspek utama yaitu pencegahan, pengawasan dan penindakan. Pencegahan melibatkan upaya untuk menghindari terjadinya pelanggaran melalui langkah-langkah edukatif dan preventif. Pengawasan dilakukan dengan memantau secara intensif setiap tahapan pemilu guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Sementara itu, penindakan adalah respon terhadap pelanggaran yang ditemukan, termasuk memberikan rekomendasi penyelesaian atau penerapan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dan PKD mencakup berbagai aktivitas untuk menjamin kelancaran dan transparansi dalam setiap tahapan Pemilu. Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Lamongan beserta Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Lamongan dan Pengawas TPS telah melaksanakan tugas pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan Langsung, dengan bentuk:

a. Pengawasan Melekat

Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan dan PKD melibatkan berbagai bentuk aktivitas yang bertujuan memastikan kelancaran dan transparansi setiap tahapan pemilu. Pengawasan langsung dan melekat untuk memastikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan peserta pemilu mematuhi ketentuan serta menjalankan prosedur sesuai aturan. Selain itu, memastikan bahwa peraturan teknis yang tersedia bersifat komprehensif, tidak multitafsir dan dapat dilakukan oleh PPK. Pengawas mensosialisasikan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan publik.

b. Patroli Pengawasan

Panwaslu Kecamatan bersama Pengawas Kelurahan/Desa (PKD) secara aktif melaksanakan patroli pengawasan Pemilu 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran selama Pemilu. Patroli pengawasan dilakukan dengan memantau langsung aktivitas kampanye yang berlangsung, sekaligus memberikan sosialisasi dan menyampaikan surat

imnbauan kepada seluruh partai politik peserta Pemilu 2024.

Selama patroli pengawasan, jajaran Pengawas Pemilu pada tingkat kecamatan dan kelurahan mendokumentasikan hasil pengawasan di Formulir Model hasil pengawasan. Langkah ini memastikan seluruh aktivitas pengawasan terdokumentasikan dengan baik dan dipantau secara sistematis. Patroli pengawasan dilaksanakan sesuai dengan Surat Instruksi Bawaslu RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Patroli Pencegahan dan Pengawasan Kampanye. Sesuai dengan arahan Bawaslu RI, patroli difokuskan pada lokasi-lokasi yang dianggap rawan terjadi pelanggaran. Patroli pengawasan dilakukan dengan tujuan dapat menjadi dasar pengambilan langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif, sehingga dapat meminimalisir pelanggaran selama tahapan kampanye.

2. Pengawasan Tidak Langsung, dengan bentuk:

a. Bentuk Analisis Data

Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Lamongan beserta Panwaslu Kelurahan/Desa se-Kabupaten Lamongan dan Pengawas TPS selama pelaksanaan pengawasan tahapan pemilu tahun 2024 telah membuat form A pengawasan sebanyak 86.630 buah yang terinci sebagai berikut:

No	Tahapan/Sub Tahapan/Kegiatan	Jumlah
1	Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih	6771
2	Verifikasi Faktual Perseorangan	37
3	Pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	54
4	Kampanye dan Hari Tenang	50034
5	Pendistribusian Logistik Pemilu	81
6	Pemungutan dan Penghitungan Suara	29545
7	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	27
8	Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc	81

Selama proses pengawasan Pemilu 2024, Pengisian Form A menjadi instrumen yang penting dalam mencatat hasil pengawasan yang dilakukan di berbagai tingkatan. Form A mencakup laporan hasil pengawasan, temuan lapangan, potensi pelanggaran atau pelanggaran yang terdeteksi serta rekomendasi tindak lanjut yang diperlukan. Dokumen tersebut menjadi alar evaluasi yang sangat penting sekaligus bukti nyata komitmen Panwaslu dalam melaksanakan pengawasan secara transparan, profesional, dan bertanggung jawan. Dengan langkah-langkah tersebut, Panwaslu Kecamatan dan PKD berupaya memastikan Pemilu 2024 dapat berlangsung dengan baik, adil, dan sesuai dengan prinsip demokrasi.

3. Kerja Penanganan Pelanggaran

Penanganan pelanggaran Pemilu merupakan aspek yang krusial dalam menjamin proses demokrasi berlangsung secara jujur, adil dan transparan. Setiap indikasi pelanggaran yang muncul selama tahapan Pemilu perlu ditindaklanjuti melalui prosedur yang jelas dan tegas, guna menjaga integritas dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu. Panwaslu memainkan peran penting dalam mendeteksi, menindaklanjuti dan menyelesaikan setiap pelanggaran yang terjadi. Dengan pengawasan yang teliti dan responsif, diharapkan potensi pelanggaran dapat diminimalkan sehingga Pemilu dapat terselenggara secara adil dan bermartabat.

Selama pelaksanaan Pemilu tahun 2024, tidak ditemukan adanya laporan dan temuan oleh Panwascam Kecamatan se-Kabupaten Lamongan atau oleh Panwascam Kelurahan/Desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses Pemilu berjalan dengan lancar, tertib dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini mencerminkan keberhasilan pengawasan yang dilakukan secara efektif, baik melalui pengawasan langsung, melekat maupun patroli pengawasan. Selain itu, kondisi ini juga menjadi indikasi bahwa tingkat kesadaran peserta Pemilu, Penyelenggara dan masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan terhadap aturan Pemilu semakin meningkat. Dengan tidak ditemukannya pelanggaran atau laporan menegaskan komitmen semua pihak dalam menjaga integritas dan kualitas pemilu.

4. Kerja Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan pemilu merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas politik dan memperkuat demokrasi. Dalam setiap proses pemilu, potensi sengketa dapat muncul akibat perbedaan penafsiran aturan, pelanggaran prosedural, atau tindakan yang dianggap mencederai prinsip keadilan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas, adil, dan dapat diakses oleh semua pihak. Mekanisme ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga menjadi jaminan bahwa proses pemilu berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

Langkah penyelesaian sengketa harus mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari upaya mediasi antara pihak yang bersengketa, penyelesaian melalui lembaga pengawas pemilu, hingga penyelesaian melalui jalur hukum di pengadilan. Setiap tahapan harus dilaksanakan dengan memperhatikan asas keadilan, non-diskriminasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat bahwa setiap sengketa diproses secara objektif dan tanpa keberpihakan.

Kolaborasi antarlembaga sangat krusial dalam memastikan penyelesaian sengketa berjalan efektif. Badan pengawas pemilu, penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, dan pengadilan harus bekerja sama untuk memastikan bahwa setiap keputusan

yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima oleh semua pihak yang terlibat. Dukungan teknologi informasi dalam dokumentasi dan pelaporan sengketa juga dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi proses tersebut.

Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian sengketa sangat penting untuk mendorong partisipasi aktif. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat tidak hanya menjadi pengawas yang kritis terhadap pelaksanaan pemilu, tetapi juga dapat mencegah eskalasi konflik yang disebabkan oleh misinformasi atau ketidakpahaman terhadap aturan. Partisipasi publik dalam proses ini mencerminkan keberhasilan demokrasi yang inklusif dan partisipatif.

Melalui penyelesaian sengketa pemilu yang efektif, integritas dan legitimasi hasil pemilu dapat dijaga. Hal ini tidak hanya memastikan bahwa hasil pemilu mencerminkan suara rakyat, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Dengan demikian, penyelesaian sengketa bukan sekadar solusi bagi konflik, tetapi juga fondasi penting bagi keberlanjutan demokrasi yang berkeadilan, berintegritas, dan bermartabat.

Dalam rangka mempersiapkan dan memperkuat kesiapan menghadapi potensi permohonan sengketa antar peserta pemilu pada Pemilu tahun 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lamongan telah mengambil langkah strategis dengan memberikan surat mandat kepada Panitia Pengawas Pemilu

(Panwaslu) di tingkat kecamatan. Langkah ini merupakan wujud nyata dari komitmen Bawaslu dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang berintegritas, transparan, dan berkeadilan. Surat mandat tersebut menjadi landasan hukum dan operasional bagi Panwaslu Kecamatan untuk menjalankan tugas penyelesaian sengketa proses pemilu secara efektif, sesuai dengan prinsip dan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, Bawaslu tidak hanya menitikberatkan pada aspek penegakan hukum, tetapi juga memperkuat peran pengawasan di tingkat akar rumput guna mencegah eskalasi konflik yang dapat mengganggu stabilitas demokrasi di Kabupaten Lamongan.

Nomor surat mandat yang diberikan menjadi bagian penting dalam administrasi kelembagaan dan memberikan legitimasi atas setiap tindakan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan terkait penyelesaian sengketa. Dengan adanya mandat ini, Panwaslu Kecamatan memiliki kewenangan penuh untuk melakukan mediasi, memfasilitasi dialog, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul antar peserta pemilu. Proses tersebut diharapkan dapat mengutamakan asas keadilan, imparialitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sehingga setiap peserta pemilu mendapatkan perlakuan yang setara tanpa adanya keberpihakan.

Melalui pemberian surat mandat ini, Bawaslu Kabupaten Lamongan tidak hanya memperkuat struktur pengawasan pemilu

di tingkat kecamatan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh perangkat pengawas memiliki kapasitas dan kewenangan yang memadai untuk menjalankan tugas mereka. Hal ini mencerminkan upaya proaktif dalam mencegah konflik serta menyelesaikan sengketa secara dini dan efektif. Dengan demikian, inisiatif ini diharapkan dapat berkontribusi pada terciptanya proses pemilu yang damai, tertib, dan sesuai dengan prinsip demokrasi yang berkeadilan. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.1
Surat Mandat PSAP

NOMOR SURAT MANDAT PSAP	PANWASLU KECAMATAN
028/HK.01.01/K.JI-11/11/2023	BABAT
029/HK.01.01/K.JI-11/11/2023	BLULUK
030/HK.01.01/K.JI-11/11/2023	BRONDONG
031/HK.01.01/K.JI-11/11/2023	DEKET
032/HK.01.01/K.JI-11/11/2023	GLAGAH
033/HK.01.01/K.JI-11/11/2023	KALITENGAH
034/HK.01.01/K.JI-11/11/2023	KARANGBINANGUN
035/HK.01.01/K.JI-11/11/2023	KARANGGENENG
036/HK.01.01/K.JI-11/11/2023	KEDUNGPRING
036/HK.01.01/K.JI-11/11/2023	KEMBANGBAHU
037/HK.01.01/K.JI-11/11/2023	LAMONGAN
038/HK.01.01/K.JI-11/11/2023	LAREN

039/HK.01.01/K.JI-11/11/2023	MADURAN
040/HK.01.01/K.JI-11/11/2023	MANTUP
041/HK.01.01/K.JI-11/11/2023	MODO
042/HK.01.01/K.JI-11/11/2023	NGIMBANG
043/HK.01.01/K.JI-11/11/2023	PACIRAN
044/HK.01.01/K.JI-11/11/2023	PUCUK
045/HK.01.01/K.JI-11/11/2023	SAMBENG
046/HK.01.01/K.JI-11/11/2023	SARIREJO
047/HK.01.01/K.JI-11/11/2023	SEKARAN
048/HK.01.01/K.JI-11/11/2023	SOLOKURO
049/HK.01.01/K.JI-11/11/2023	SUGIO
050/HK.01.01/K.JI-11/11/2023	SUKODADI
051/HK.01.01/K.JI-11/11/2023	SUKORAME
052/HK.01.01/K.JI-11/11/2023	TIKUNG
053/HK.01.01/K.JI-11/11/2023	TURI

Dalam pelaksanaan Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Lamongan mencatat adanya Permohonan Penyelesaian Sengketa yang diajukan secara tertulis oleh Lintang Salaswati, perwakilan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Kabupaten Lamongan, terhadap termohon Iswanto, perwakilan dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kabupaten Lamongan. Permohonan tersebut berkaitan dengan keberadaan Alat Peraga Kampanye (APK) Calon Anggota DPRD Provinsi dari Dapil 13 Lamongan-Gresik

atas nama Susy Cecilia A.S dari Partai PDI Perjuangan yang dipasang di depan Kantor DPD Partai Nasdem. Partai Nasdem mengajukan keberatan dan meminta Panwaslu Kecamatan Lamongan untuk memindahkan APK tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan prinsip kesetaraan dalam kampanye.

Menanggapi permohonan tersebut, Panwaslu Kecamatan Lamongan segera melakukan langkah penyelesaian sengketa antar peserta pemilu. Dalam proses penyelesaian ini, Panwaslu memfasilitasi musyawarah untuk mufakat antara pemohon, yaitu Partai Nasdem, dan termohon, yaitu Partai PDI Perjuangan. Proses musyawarah berlangsung dalam suasana yang kondusif dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan keterbukaan. Setelah melalui diskusi dan pertimbangan bersama, kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan bahwa APK tersebut akan dipindahkan dari lokasi yang dipermasalahkan.

Sebagai bagian dari prosedur resmi, Panwaslu Kecamatan Lamongan menuangkan hasil kesepakatan ini ke dalam Putusan Penyelesaian Sengketa antar Peserta Pemilu, yang dituangkan dalam Formulir Model PSPP-22. Keputusan ini sekaligus mencerminkan keberhasilan penyelesaian sengketa secara damai dan efektif, tanpa harus berlanjut pada tahap penyelesaian hukum yang lebih tinggi. Dengan langkah ini, Panwaslu Kecamatan tidak hanya memastikan pelaksanaan pemilu yang adil dan demokratis, tetapi juga menjaga stabilitas hubungan antar peserta pemilu di tingkat lokal.

Keputusan tersebut menjadi bukti bahwa mekanisme penyelesaian sengketa dalam pemilu mampu memberikan solusi yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, langkah ini menunjukkan pentingnya kolaborasi dan dialog dalam menyelesaikan konflik, sehingga prinsip demokrasi yang jujur, adil, dan damai tetap terjaga sepanjang proses pemilu.

BAGIAN 5

KONTRIBUSI PENGAWAS AD HOC DALAM MENJAGA DEMOKRASI

1. Peran Pengawas Ad Hoc dalam Pemilu di Kabupaten Lamongan

Bagi sebuah negara demokrasi seperti Indonesia, pelaksanaan pemilu adalah salah satu pilar fundamental yang menentukan arah politik dan pemerintahan. Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin, tetapi juga menjadi sarana untuk memastikan bahwa keputusan politik yang diambil benar-benar mencerminkan kehendak rakyat. Seperti yang dikemukakan oleh Budiardjo (2008), pemilu adalah inti dari demokrasi. Namun, untuk menjaga agar proses ini berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kejujuran, pengawasan pada setiap tahapan pemilu menjadi sangat penting. Dalam sistem demokrasi Indonesia, pengawas ad hoc memegang peran sentral dalam mengawasi dan menjaga kualitas pemilu di tingkat lokal. Di Kabupaten Lamongan, kehadiran pengawas ad hoc menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam memastikan pemilu berlangsung secara sah dan terhindar dari kecurangan.

Pengawas ad hoc, yang bernaung di bawah Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa setiap tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara, berlangsung dengan adil dan sesuai aturan. Tugas mereka meliputi memantau,

mendeteksi, dan melaporkan potensi pelanggaran yang berisiko mencederai integritas pemilu. Selain itu, mereka juga berperan menciptakan suasana pemilu yang bebas dari intimidasi, politik uang, manipulasi suara, atau kecurangan lainnya. Dengan berada di garis terdepan, pengawas ad hoc menjadi penjaga keabsahan suara rakyat, memastikan setiap suara dihitung dan tidak disalahgunakan demi kepentingan tertentu.

Peran pengawas ad hoc di Lamongan sangat signifikan, terutama di wilayah-wilayah yang rentan terhadap politisasi tinggi atau tekanan politik lokal. Tradisi politik uang, misalnya, masih menjadi tantangan serius di beberapa daerah. Selain itu, intimidasi terhadap pemilih juga dapat muncul, baik di pedesaan maupun di kawasan perkotaan. Dalam konteks ini, pengawas ad hoc bertugas menjaga agar pemilih dapat menggunakan hak pilih mereka secara bebas tanpa ancaman atau tekanan. Mereka juga bertanggung jawab melaporkan pelanggaran kepada pihak berwenang, memastikan bahwa sanksi tegas diberikan kepada pelanggar untuk mencegah praktik serupa di masa depan.

Tidak hanya berperan dalam menjaga integritas proses pemilu, pengawas ad hoc juga memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keberlanjutan demokrasi. Demokrasi sejati bukan hanya soal menyelenggarakan pemilu, tetapi juga memastikan bahwa proses dan hasil pemilu memiliki legitimasi yang kuat di mata rakyat. Fuady (2010) menekankan pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap pemilu sebagai fondasi demokrasi. Tanpa pengawasan yang memadai, kepercayaan

terhadap sistem pemilu bisa runtuh, menyebabkan rendahnya partisipasi politik masyarakat dan melemahkan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, pengawas ad hoc tidak hanya mengawasi jalannya pemilu secara teknis tetapi juga bertindak sebagai jembatan antara masyarakat dan penyelenggara pemilu. Mereka memastikan bahwa setiap pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan rasa aman, percaya bahwa suara mereka dihitung secara jujur dan adil.

Sebagai agen pendidikan demokrasi, pengawas ad hoc juga memiliki peran dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Mereka membantu menyosialisasikan hak dan kewajiban pemilih, prosedur pemilu, dan pentingnya partisipasi aktif dalam pemilu. Hal ini sangat relevan di daerah-daerah dengan tingkat pendidikan politik yang masih rendah, di mana pemahaman masyarakat tentang demokrasi dan pemilu seringkali terbatas. Melalui kegiatan seperti dialog publik, pelatihan, dan sosialisasi, pengawas ad hoc membantu memperkuat kesadaran politik masyarakat, mendorong mereka untuk lebih peduli terhadap proses demokrasi.

Selain itu, pengawas ad hoc juga mengawasi transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu di Lamongan. Setiap tahap pemilu, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan, harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengawas ad hoc memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan wewenang, manipulasi data pemilih, atau pelanggaran lain yang dapat merusak kualitas pemilu. Jika

ditemukan penyimpangan, mereka memiliki kewajiban untuk memberikan rekomendasi atau laporan kepada pihak yang berwenang.

Kontribusi pengawas ad hoc terhadap demokrasi di Lamongan sangatlah besar. Mereka tidak hanya bertugas sebagai pengawas teknis pemilu, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi, penguat kepercayaan publik, dan pendidik politik di tingkat lokal. Tanpa keberadaan mereka, kualitas dan legitimasi pemilu dapat terganggu, mengancam keberlangsungan demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, peran pengawas ad hoc tidak hanya penting untuk keberhasilan pemilu, tetapi juga untuk memperkuat fondasi demokrasi yang adil, transparan, dan terpercaya di Kabupaten Lamongan.

Keberadaan pengawas ad hoc dalam pengawasan pemilu di Kabupaten Lamongan menunjukkan pentingnya sistem pengawasan yang bersifat lokal dan fleksibel. Pengawas ad hoc, yang direkrut untuk mengawasi pemilu pada tingkat kecamatan hingga desa, membawa pemahaman yang mendalam mengenai dinamika sosial dan politik setempat. Pemahaman ini memungkinkan mereka untuk mendeteksi potensi pelanggaran yang spesifik di wilayah tersebut, seperti tradisi politik uang atau praktik intimidasi terhadap pemilih. Dalam konteks Lamongan, yang memiliki keragaman sosial dan politik yang tinggi, pendekatan berbasis lokal ini memberikan keunggulan strategis untuk menjamin pemilu yang bebas dan adil.

Selain itu, pengawas ad hoc berperan dalam menciptakan keseimbangan antara masyarakat dan penyelenggara pemilu. Keberadaan mereka sebagai pihak independen yang berasal dari masyarakat lokal meningkatkan legitimasi pemilu di mata publik. Mereka dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara pemilih dan penyelenggara, menjawab kekhawatiran masyarakat, serta memastikan bahwa hak-hak pemilih terlindungi. Dalam sistem demokrasi yang sehat, pengawas ad hoc memainkan peran penting sebagai pengontrol eksternal, mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh penyelenggara pemilu, sekaligus memastikan transparansi dalam setiap tahapan pemilu.

Namun, efektivitas pengawas ad hoc sering kali dipengaruhi oleh beberapa tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, waktu pelatihan yang singkat, dan potensi tekanan dari aktor politik lokal. Di Lamongan, keberadaan dinamika politik lokal yang kompleks dapat menjadi hambatan serius bagi pengawas ad hoc dalam menjalankan tugas mereka. Dalam hal ini, penting bagi Bawaslu Kabupaten Lamongan untuk memberikan pelatihan yang lebih intensif dan memastikan dukungan operasional yang memadai bagi pengawas ad hoc. Dengan begitu, mereka dapat menjalankan tugas dengan profesionalisme tinggi, terlepas dari tekanan atau hambatan yang mungkin dihadapi.

Dari sudut pandang masyarakat, keberadaan pengawas ad hoc juga memengaruhi tingkat partisipasi politik. Ketika pengawasan pemilu dilakukan secara transparan dan akuntabel,

masyarakat cenderung memiliki kepercayaan yang lebih besar terhadap proses pemilu dan hasilnya. Hal ini dapat mendorong partisipasi yang lebih aktif, baik dalam memberikan suara maupun dalam terlibat secara langsung sebagai relawan pengawas. Oleh karena itu, pengawas ad hoc tidak hanya berdampak pada proses teknis pemilu, tetapi juga pada dinamika politik jangka panjang, khususnya dalam membangun kepercayaan terhadap institusi demokrasi.

Sebagai garda terdepan pengawasan pemilu di tingkat lokal, pengawas ad hoc juga berfungsi sebagai indikator keberhasilan demokrasi yang inklusif. Keberadaan mereka menunjukkan bahwa pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga negara, tetapi juga melibatkan masyarakat sebagai bagian dari proses demokrasi. Di Kabupaten Lamongan, hal ini mencerminkan kolaborasi yang erat antara masyarakat dan lembaga penyelenggara pemilu dalam menjaga kualitas pemilu. Dengan memperkuat peran dan kapasitas pengawas ad hoc, Kabupaten Lamongan dapat menjadi contoh keberhasilan demokrasi lokal yang berbasis partisipasi masyarakat dan akuntabilitas publik.

2. Pengawas Ad Hoc di Kabupaten Lamongan sebagai Pilar Demokrasi Lokal

Pengawas ad hoc di Kabupaten Lamongan memainkan peran yang sangat penting dalam memastikan pelaksanaan pemilu yang adil, transparan, dan sesuai dengan aturan. Dalam konteks demokrasi lokal, pemilu tidak sekadar menjadi

mekanisme pemilihan pemimpin, tetapi juga merupakan fondasi utama dari kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, keberadaan pengawas ad hoc sangat vital dalam menjaga agar pemilu berjalan lancar dan mencerminkan kehendak rakyat. Di Kabupaten Lamongan, dengan segala keragaman sosial, budaya, dan tantangan geografisnya, pengawasan pemilu menjadi tugas yang menantang, namun tetap esensial untuk mendukung terwujudnya demokrasi yang sehat dan berkualitas.

Sebagai daerah dengan kompleksitas sosial dan tantangan tersendiri, Kabupaten Lamongan menghadapi sejumlah masalah dalam memastikan pemilu bebas dari kecurangan dan manipulasi. Tantangan seperti tingginya risiko praktik politik uang, pengaruh kuat dari kelompok tertentu, serta rendahnya tingkat literasi politik sebagian masyarakat menjadi kendala utama. Dalam situasi seperti ini, pengawas ad hoc memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai prinsip demokrasi. Mereka tidak hanya memantau proses pemilu, tetapi juga melindungi hak-hak pemilih serta memastikan semua peserta pemilu mengikuti aturan yang berlaku.

Pengawas ad hoc di Kabupaten Lamongan yang tergabung dalam lembaga seperti Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki tugas yang luas dan kompleks. Mereka memastikan bahwa setiap tahap pemilu, mulai dari pendaftaran calon dan pemilih, kampanye, hingga pemungutan serta penghitungan suara, berlangsung

dengan transparansi dan integritas tinggi. Tantangan geografis, terutama di daerah-daerah terpencil atau wilayah pesisir Kabupaten Lamongan, menambah tingkat kesulitan pengawasan. Namun, pengawas tetap diharapkan hadir di setiap tahapan untuk menjamin bahwa aturan dipatuhi dan potensi kecurangan dapat dicegah.

Keberadaan pengawas ad hoc di Kabupaten Lamongan juga berfungsi sebagai pilar utama akuntabilitas penyelenggara pemilu. Tanpa pengawasan yang ketat, risiko penyimpangan seperti manipulasi hasil suara atau penyalahgunaan anggaran pemilu dapat meningkat. Oleh karena itu, pengawas ad hoc yang berasal dari berbagai latar belakang masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugas mereka dengan profesionalisme dan independensi tinggi. Mereka harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip integritas agar dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu.

Pengawasan yang efektif juga memberikan dampak langsung dalam mencegah kecurangan atau pelanggaran selama proses pemilu. Misalnya, di Kabupaten Lamongan, pengawas ad hoc memiliki peran penting dalam mencegah praktik politik uang yang masih sering terjadi, terutama di wilayah dengan kesenjangan ekonomi tinggi. Dengan melakukan pengawasan intensif selama masa kampanye dan proses pemungutan suara, mereka dapat mendeteksi tanda-tanda kecurangan sejak dini dan mengambil langkah-langkah preventif untuk mengatasinya. Selain itu, pengawasan juga memastikan bahwa tidak ada

intimidasi terhadap pemilih atau manipulasi hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Keberadaan pengawas ad hoc juga berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu. Di Kabupaten Lamongan, di mana terkadang terdapat skeptisisme terhadap penyelenggara pemilu, pengawasan yang transparan dan independen membantu membangun kepercayaan publik. Ketika masyarakat merasa bahwa pemilu berjalan adil dan bebas dari intervensi pihak tertentu, mereka lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam proses pemilu. Partisipasi aktif ini menjadi elemen kunci demokrasi, karena tanpa keterlibatan masyarakat, hasil pemilu tidak akan sepenuhnya mencerminkan kehendak rakyat.

Selain itu, pengawasan oleh pengawas ad hoc berdampak langsung pada kualitas pemilu itu sendiri. Proses seperti distribusi logistik, pendaftaran pemilih, hingga pemungutan suara harus dilakukan secara teliti dan diawasi dengan ketat. Pengawasan terhadap daftar pemilih tetap (DPT), misalnya, menjadi sangat penting di Kabupaten Lamongan yang memiliki banyak wilayah pedesaan dan pemilih yang sering berpindah tempat tinggal. Dengan memastikan bahwa DPT akurat, pengawas dapat mencegah adanya pemilih ganda atau pemilih yang terlewat dari proses.

Pengawas ad hoc juga memastikan bahwa pemilih dapat menggunakan hak pilih mereka dengan bebas tanpa tekanan atau intimidasi. Di Kabupaten Lamongan, yang memiliki

keragaman budaya dan kelompok sosial, pengawasan terhadap kebebasan memilih menjadi lebih kompleks. Pengawas harus memastikan bahwa semua pemilih, baik dari kelompok mayoritas maupun minoritas, dapat memberikan suara tanpa gangguan. Hal ini mencakup pengawasan terhadap politik uang, mobilisasi massa, dan distribusi bahan kampanye yang tidak sesuai aturan. Transparansi dalam penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu juga menjadi fokus utama pengawasan. Di Kabupaten Lamongan, potensi manipulasi suara di daerah terpencil atau yang sulit dijangkau dapat diantisipasi melalui kehadiran pengawas di setiap proses penghitungan. Mereka memastikan bahwa setiap suara dihitung dengan benar dan tidak ada pihak yang menyalahgunakan kekuasaan untuk mengubah hasil pemilu. Dengan pengawasan yang ketat, hasil pemilu menjadi lebih dapat dipercaya dan mencerminkan kehendak rakyat.

Namun, pengawas ad hoc di Kabupaten Lamongan menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, akses ke daerah terpencil, serta tekanan politik dari elit lokal. Koordinasi yang baik antara pengawas, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, dan masyarakat menjadi kunci untuk mengatasi hambatan ini. Pengawas harus mempertahankan integritas dan independensinya meskipun dihadapkan pada tekanan yang signifikan. Dengan pengawasan yang profesional dan berintegritas, mereka dapat memastikan bahwa pemilu di Kabupaten Lamongan berjalan dengan adil dan sesuai aturan, sekaligus memperkuat fondasi demokrasi lokal.

Pengawas ad hoc di Kabupaten Lamongan tidak hanya berperan dalam memastikan teknis pelaksanaan pemilu berjalan dengan baik, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan demokrasi di tingkat lokal. Keberadaan mereka mencerminkan pentingnya pengawasan berbasis komunitas, di mana masyarakat lokal memiliki peran aktif dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas proses pemilu. Dalam konteks Lamongan, yang memiliki karakteristik sosial dan politik yang beragam, pendekatan lokal ini memungkinkan pengawas untuk lebih memahami dinamika yang terjadi di lapangan, seperti potensi konflik antar kelompok atau pola kecurangan yang khas di wilayah tertentu.

Keberadaan pengawas ad hoc juga memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesadaran politik masyarakat. Dengan adanya pengawas yang aktif memantau setiap tahapan pemilu, masyarakat menjadi lebih percaya diri untuk menggunakan hak pilihnya tanpa takut terhadap tekanan atau intimidasi. Kepercayaan ini menciptakan partisipasi yang lebih luas dan inklusif, yang pada akhirnya memperkuat legitimasi hasil pemilu. Di Kabupaten Lamongan, yang memiliki berbagai lapisan sosial dan ekonomi, kehadiran pengawas membantu mengurangi kesenjangan partisipasi politik, khususnya di wilayah pedesaan dan kelompok masyarakat yang sebelumnya kurang terlibat dalam proses demokrasi.

Namun, tantangan utama yang dihadapi pengawas ad hoc di Kabupaten Lamongan adalah keterbatasan sumber daya dan

tekanan politik. Dalam beberapa kasus, tekanan dari aktor-aktor politik lokal dapat memengaruhi independensi pengawas, terutama di daerah yang memiliki tradisi politik patronase yang kuat. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pelatihan intensif dan dukungan moral yang kuat dari Bawaslu Kabupaten Lamongan agar pengawas tetap berpegang pada prinsip independensi dan profesionalisme. Selain itu, penyediaan fasilitas pendukung seperti akses transportasi dan komunikasi yang memadai menjadi kebutuhan mendesak, mengingat luasnya wilayah Lamongan yang mencakup daerah pesisir dan pedalaman.

Dari perspektif manajemen pemilu, pengawas ad hoc juga memainkan peran penting dalam mencegah kebocoran anggaran dan penyalahgunaan logistik pemilu. Transparansi yang mereka tegakkan pada setiap tahap pemilu memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan sesuai peruntukannya dan tidak ada manipulasi data atau distribusi logistik yang merugikan salah satu pihak. Dengan pengawasan yang ketat, setiap penyimpangan dapat diidentifikasi sejak dini dan dilaporkan ke pihak berwenang untuk ditindaklanjuti. Hal ini tidak hanya menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu tetapi juga menghemat sumber daya negara.

Keberhasilan pengawasan oleh pengawas ad hoc juga memberikan dampak jangka panjang terhadap demokrasi di Kabupaten Lamongan. Ketika masyarakat melihat bahwa pemilu dilaksanakan dengan adil dan transparan, kepercayaan mereka

terhadap proses demokrasi semakin meningkat. Kepercayaan ini menciptakan siklus positif, di mana masyarakat lebih aktif berpartisipasi dalam pemilu dan lebih percaya pada hasilnya. Dalam jangka panjang, hal ini akan membangun fondasi demokrasi yang lebih kuat, di mana masyarakat tidak hanya menjadi peserta pasif tetapi juga agen perubahan yang aktif dalam menentukan arah politik daerah mereka. Dengan demikian, peran pengawas ad hoc di Kabupaten Lamongan tidak hanya penting untuk keberhasilan pemilu, tetapi juga untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi di tingkat lokal.

3. Pencapaian dan Prestasi Pengawas Ad Hoc di Kabupaten Lamongan

Pencapaian dan prestasi pengawas ad hoc di Kabupaten Lamongan dalam mengawal pemilu yang jujur, adil, dan transparan merupakan tonggak penting dalam upaya memperkuat demokrasi di tingkat lokal. Di tengah dinamika politik yang kompleks, pengawas ad hoc di Kabupaten Lamongan berhasil memainkan peran strategis dalam menjaga integritas pemilu dengan mengatasi berbagai potensi pelanggaran yang dapat merusak proses demokrasi (Subekti, 2015). Meskipun menghadapi tantangan besar, pengawas ad hoc menunjukkan dedikasi, keberanian, dan profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Keberhasilan mereka tercermin dari pencegahan pelanggaran-pelanggaran besar serta penanganan kasus-kasus pelanggaran yang berujung pada terciptanya pemilu yang kredibel dan dipercaya masyarakat.

Sebagai kabupaten dengan beragam karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis, Lamongan menghadapi tantangan tersendiri dalam menjaga agar pemilu berlangsung secara adil. Dengan sebagian wilayah terdiri dari daerah pesisir, pedesaan, dan kawasan terpencil, pengawasan pemilu menjadi semakin kompleks. Pengawas ad hoc di Lamongan, bekerja di bawah koordinasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Bawaslu, telah membangun kerja sama yang baik dengan lembaga seperti KPU, aparat keamanan, dan masyarakat. Mereka memastikan seluruh tahapan pemilu, mulai dari kampanye hingga penghitungan suara, bebas dari manipulasi, kecurangan, dan tindakan yang berpotensi merugikan masyarakat.

Salah satu keberhasilan besar pengawas ad hoc di Kabupaten Lamongan adalah kemampuannya mendeteksi dan menangani berbagai bentuk pelanggaran pemilu. Kasus politik uang, intimidasi terhadap pemilih, dan manipulasi suara menjadi contoh nyata tantangan yang berhasil diatasi. Praktik politik uang, yang sering terjadi di wilayah dengan tingkat ekonomi rendah, menjadi fokus perhatian pengawas. Dengan memanfaatkan jaringan masyarakat lokal dan koordinasi dengan pihak berwenang, pengawas berhasil mengumpulkan bukti pelanggaran dan mengambil tindakan preventif yang efektif. Keberhasilan ini tidak hanya mencegah kecurangan tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Pengawas ad hoc di Kabupaten Lamongan juga menghadapi tantangan terkait intimidasi terhadap pemilih, terutama di daerah yang memiliki tradisi politik lokal yang kuat. Intimidasi ini sering kali berupa ancaman langsung atau tekanan sosial yang memengaruhi kebebasan pemilih dalam menentukan pilihan. Pengawas ad hoc bekerja keras untuk melindungi hak-hak pemilih dengan memantau pemungutan suara secara ketat, menerima laporan dari masyarakat, dan melaporkan pelanggaran kepada pihak berwenang. Langkah-langkah ini membantu memastikan bahwa pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan aman dan tanpa tekanan dari pihak mana pun.

Selain itu, pengawas ad hoc memiliki peran penting dalam mencegah manipulasi suara pada tahap penghitungan. Di Kabupaten Lamongan, pengawasan ketat terhadap penghitungan suara di TPS, tingkat desa, hingga kecamatan menjadi salah satu prioritas utama. Manipulasi data penghitungan suara, yang dapat terjadi akibat lemahnya pengawasan, berhasil diminimalisir melalui kehadiran pengawas ad hoc yang bekerja dengan penuh dedikasi. Mereka memastikan bahwa setiap suara dihitung dengan benar, dan setiap pelanggaran yang ditemukan dilaporkan untuk ditindaklanjuti secara hukum.

Pencapaian lain yang patut diapresiasi adalah kemampuan pengawas ad hoc di Kabupaten Lamongan dalam menjaga independensi mereka meskipun menghadapi tekanan politik yang signifikan. Di wilayah yang memiliki hubungan erat antara elite politik dan masyarakat, tekanan untuk memengaruhi proses

pemilu sering kali tidak dapat dihindari. Namun, pengawas ad hoc berhasil mempertahankan integritas mereka dengan tetap berpegang pada prinsip objektivitas dan profesionalisme. Keberhasilan ini tidak hanya memperkuat kredibilitas pengawas tetapi juga meningkatkan kualitas demokrasi lokal.

Melalui berbagai upaya ini, pengawas ad hoc di Kabupaten Lamongan telah membantu menciptakan pemilu yang lebih bersih dan adil. Dampak positifnya terlihat pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu. Kepercayaan ini mendorong partisipasi politik yang lebih besar, yang merupakan elemen vital dalam demokrasi. Edukasi politik yang dilakukan pengawas melalui sosialisasi dan dialog dengan masyarakat juga membantu meningkatkan kesadaran warga tentang pentingnya menjaga integritas pemilu.

Ke depan, pengawas ad hoc di Kabupaten Lamongan diharapkan dapat terus memperkuat kinerja mereka dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan logistik. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga masyarakat, sangat diperlukan untuk memastikan pengawasan pemilu yang lebih efektif. Dengan dedikasi yang telah terbukti, pengawas ad hoc di Lamongan dapat terus menjadi pilar utama demokrasi lokal, menjaga agar setiap pemilu mencerminkan kehendak rakyat secara utuh.

Keberhasilan pengawas ad hoc di Kabupaten Lamongan dalam mengawasi jalannya pemilu mencerminkan efektivitas pendekatan pengawasan berbasis masyarakat. Pengawas ad hoc,

yang direkrut dari masyarakat lokal, memiliki pemahaman mendalam tentang dinamika sosial, ekonomi, dan politik di wilayah mereka. Pemahaman ini memungkinkan mereka untuk lebih peka terhadap potensi pelanggaran, seperti praktik politik uang atau intimidasi pemilih, yang mungkin luput dari pengawasan tingkat nasional. Dengan pendekatan yang lebih personal dan berbasis komunitas, pengawas ad hoc mampu menjangkau hingga tingkat desa dan kelurahan, memastikan tidak ada aspek pemilu yang terabaikan.

Namun, tantangan yang dihadapi pengawas ad hoc di Lamongan cukup signifikan, terutama terkait tekanan politik dari aktor-aktor lokal. Di beberapa wilayah, pengaruh elite politik atau kelompok tertentu sangat kuat, yang dapat memengaruhi independensi pengawas. Dalam konteks ini, pengawas ad hoc harus memiliki keteguhan moral dan dukungan struktural yang kuat untuk menjalankan tugas mereka dengan objektivitas. Pelatihan intensif dan pembekalan yang berkelanjutan dari Bawaslu Lamongan menjadi kunci untuk memastikan bahwa pengawas dapat menghadapi tekanan semacam ini tanpa mengorbankan integritas.

Keberadaan pengawas ad hoc juga berdampak langsung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu. Di Kabupaten Lamongan, di mana ketidakpercayaan terhadap sistem pemilu sering kali menjadi isu, pengawasan yang transparan dan independen dapat membantu membangun kembali kepercayaan tersebut. Ketika masyarakat

melihat bahwa pelanggaran ditangani dengan tegas dan suara mereka dihitung secara adil, mereka cenderung lebih aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi. Peningkatan partisipasi ini tidak hanya memperkuat legitimasi hasil pemilu tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas politik di daerah.

Selain itu, pengawas ad hoc berperan penting dalam mencegah dan menangani pelanggaran administratif yang sering kali terjadi pada tahap-tahap awal pemilu, seperti validasi daftar pemilih tetap (DPT) atau distribusi logistik pemilu. Di Kabupaten Lamongan, yang memiliki wilayah luas dan populasi yang tersebar, pengawasan terhadap DPT menjadi sangat penting untuk memastikan tidak ada pemilih yang terlewat atau terdaftar ganda. Dengan pengawasan yang teliti, pengawas ad hoc dapat meminimalkan potensi manipulasi di tahap awal ini, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas keseluruhan pemilu.

Dampak jangka panjang dari peran pengawas ad hoc di Kabupaten Lamongan adalah peningkatan kesadaran politik masyarakat. Pengawas tidak hanya bertugas mengawasi jalannya pemilu tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak politik mereka. Edukasi ini menjadi sangat penting, terutama di daerah-daerah yang masih memiliki tingkat literasi politik rendah. Ketika masyarakat memahami pentingnya menjaga integritas pemilu dan berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, mereka menjadi lebih kritis terhadap pelanggaran dan lebih aktif dalam melaporkan ketidakberesan. Hal ini

menciptakan siklus positif yang memperkuat demokrasi lokal dan mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih akuntabel.

Secara keseluruhan, pengawas ad hoc di Kabupaten Lamongan tidak hanya berperan sebagai pengawal teknis pemilu tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang memperkuat fondasi demokrasi. Tantangan yang mereka hadapi memberikan gambaran nyata tentang kompleksitas demokrasi di tingkat lokal, sementara pencapaian mereka menunjukkan bahwa dengan dukungan yang tepat, pengawasan pemilu dapat menjadi instrumen yang efektif untuk menciptakan pemilu yang lebih bersih, adil, dan demokratis. Keberhasilan pengawas ad hoc di Lamongan menjadi contoh bagaimana pendekatan lokal dapat menghasilkan dampak besar dalam menjaga integritas demokrasi di Indonesia.

4. Dampak terhadap Kualitas Demokrasi di Kabupaten Lamongan

Dalam sistem demokrasi yang sehat, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas menjadi elemen kunci yang menentukan kualitas demokrasi itu sendiri. Di Kabupaten Lamongan, pengawasan terhadap proses pemilu memainkan peran signifikan dalam menjaga agar demokrasi berjalan dengan baik. Tidak hanya memastikan pemilu berlangsung bebas dan adil, pengawasan juga melindungi hak-hak politik masyarakat. Pengawasan yang efektif bertujuan untuk mencegah kecurangan atau pelanggaran serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu. Dengan tantangan sosial,

politik, dan ekonomi yang dihadapi Kabupaten Lamongan, dampak dari pengawasan pemilu terhadap kualitas demokrasi menjadi semakin penting. Keberadaan pengawas yang cermat telah membantu memperkuat kepercayaan masyarakat yang sebelumnya mungkin meragukan integritas sistem pemilu.

Pengaruh politik lokal yang kuat, termasuk jejaring sosial dan budaya yang mendalam, sering kali menambah tantangan dalam memastikan pemilu berjalan dengan jujur dan adil di Kabupaten Lamongan. Isu-isu seperti politik uang, manipulasi suara, dan tekanan sosial terhadap pemilih kerap muncul sebagai masalah utama. Namun, dengan adanya pengawasan yang ketat dari pengawas ad hoc seperti Panwaslu dan Bawaslu, banyak pelanggaran ini berhasil diidentifikasi dan dicegah. Salah satu dampak positif dari pengawasan tersebut adalah meningkatnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Di masa lalu, ketidakpercayaan terhadap sistem pemilu menjadi kendala besar, membuat banyak warga enggan berpartisipasi. Melalui pengawasan yang transparan dan konsisten, situasi ini perlahan berubah, mendorong partisipasi yang lebih besar di masyarakat. Pengawasan pemilu yang efektif di Lamongan juga bertindak sebagai jembatan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Ketika warga melihat bahwa ada pihak independen yang bertanggung jawab untuk memastikan pemilu berjalan dengan adil dan bebas dari campur tangan politik yang tidak sah, mereka merasa lebih yakin untuk menggunakan hak pilih mereka. Transparansi dalam pengawasan menciptakan rasa keadilan yang

kuat di antara masyarakat. Hal ini terutama penting dalam konteks Lamongan, di mana tekanan sosial atau ekonomi dapat memengaruhi pilihan pemilih. Dengan adanya pengawasan yang terbuka dan berintegritas, pelanggaran seperti politik uang atau intimidasi terhadap pemilih dapat diminimalkan, menciptakan suasana demokrasi yang lebih sehat dan adil.

Selain itu, pengawasan pemilu juga berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas penyelenggara pemilu. Sebelumnya, kecurigaan terhadap penyelenggara sering kali muncul akibat kurangnya transparansi dalam proses pemilu. Dengan kehadiran pengawas yang independen, penyelenggara terpaksa bekerja lebih transparan dan akuntabel. Pengawas ad hoc di Lamongan tidak hanya memeriksa aspek teknis pemilu tetapi juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem, sehingga mendorong penyelenggara bekerja lebih hati-hati dan bertanggung jawab. Dampaknya, masyarakat menjadi lebih percaya pada proses pemilu dan hasil yang dikeluarkan, yang pada akhirnya memperkuat legitimasi demokrasi di daerah tersebut.

Partisipasi publik dalam pemilu juga meningkat berkat pengawasan yang efektif. Tingkat partisipasi politik merupakan indikator utama kualitas demokrasi. Di Kabupaten Lamongan, partisipasi pemilih menunjukkan tren positif setelah pengawasan diperkuat. Masyarakat merasa suara mereka dihargai dan bahwa ada sistem yang memastikan proses pemilu berjalan sesuai aturan. Dengan meningkatnya partisipasi, pemilu di Lamongan

semakin mencerminkan kehendak rakyat secara keseluruhan. Selain itu, pengawasan yang baik menciptakan efek jangka panjang dalam memperkuat fondasi demokrasi, dengan menghasilkan pemimpin yang memiliki legitimasi kuat dan berkomitmen pada prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pengawas ad hoc di Kabupaten Lamongan juga memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesadaran politik masyarakat. Melalui sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh pengawas, masyarakat lebih memahami pentingnya peran mereka dalam menjaga integritas pemilu. Pemilih tidak lagi menjadi objek pasif dalam proses pemilu, melainkan aktor aktif yang turut mengawasi dan melaporkan potensi pelanggaran. Hal ini menciptakan siklus demokrasi yang lebih inklusif, di mana warga tidak hanya memilih tetapi juga terlibat dalam memastikan proses pemilu berjalan sesuai prinsip demokrasi. Dengan demikian, pengawasan pemilu di Kabupaten Lamongan tidak hanya berdampak pada keberhasilan pemilu itu sendiri tetapi juga pada penguatan demokrasi secara keseluruhan.

Pengawasan pemilu di Kabupaten Lamongan telah memberikan dampak signifikan dalam menjaga kualitas demokrasi, terutama dengan memastikan transparansi dan akuntabilitas di setiap tahapan pemilu. Salah satu elemen penting dalam demokrasi adalah kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik, dan pengawasan yang efektif telah menjadi pilar utama dalam membangun kembali kepercayaan tersebut. Dengan keterlibatan pengawas ad hoc, masyarakat melihat

adanya kontrol independen yang memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat teridentifikasi dan ditindaklanjuti. Hal ini memberikan rasa aman bagi pemilih dan menciptakan iklim demokrasi yang lebih stabil.

Dalam konteks Kabupaten Lamongan, dinamika sosial dan budaya yang beragam sering kali menghadirkan tantangan unik dalam proses pemilu. Keberadaan pengawas ad hoc yang berasal dari masyarakat lokal memberikan keuntungan karena mereka memahami kondisi setempat dan mampu mendeteksi potensi pelanggaran yang khas. Sebagai contoh, isu politik uang yang kerap terjadi di wilayah pedesaan dapat diminimalkan melalui pengawasan ketat di lapangan. Pengawas lokal memiliki hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat, sehingga mampu menciptakan komunikasi yang lebih efektif dalam menyosialisasikan pentingnya pemilu yang bersih dan jujur.

Pengawasan juga berfungsi sebagai mekanisme checks and balances bagi penyelenggara pemilu seperti KPU. Di Kabupaten Lamongan, pengawas ad hoc tidak hanya memantau proses administratif, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh penyelenggara sesuai dengan prinsip transparansi. Dengan adanya pengawasan, penyelenggara lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas mereka, mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang yang dapat merusak kepercayaan publik. Hal ini sangat penting untuk membangun sistem pemilu yang akuntabel dan memastikan

bahwa setiap tahapan pemilu berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu, pengawasan yang ketat juga memberikan dampak jangka panjang pada pendidikan politik masyarakat. Di Kabupaten Lamongan, banyak masyarakat yang sebelumnya kurang memahami pentingnya partisipasi politik kini lebih aktif terlibat dalam proses pemilu. Edukasi yang dilakukan oleh pengawas ad hoc, seperti sosialisasi tentang hak dan kewajiban pemilih, telah membantu meningkatkan literasi politik masyarakat. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat tidak hanya berpartisipasi dalam memilih tetapi juga menjadi lebih kritis terhadap pelanggaran yang terjadi. Ini menciptakan siklus demokrasi yang lebih sehat, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek pemilu tetapi juga aktor yang aktif menjaga integritas proses demokrasi.

Namun, tantangan tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah tekanan politik dari aktor-aktor lokal yang memiliki pengaruh besar di beberapa wilayah Kabupaten Lamongan. Tekanan semacam ini dapat memengaruhi independensi pengawas, terutama di daerah dengan hubungan politik yang erat antara elite lokal dan masyarakat. Untuk mengatasi tantangan ini, pengawas ad hoc memerlukan pelatihan yang intensif dan dukungan moral dari Bawaslu untuk memastikan bahwa mereka tetap dapat menjalankan tugas dengan profesionalisme tinggi. Selain itu, perlindungan hukum bagi pengawas perlu diperkuat

agar mereka dapat bekerja tanpa rasa takut atau tekanan dari pihak-pihak tertentu.

Pengawasan yang baik juga berdampak pada peningkatan partisipasi politik, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya memiliki tingkat golput yang tinggi. Ketika masyarakat melihat bahwa proses pemilu diawasi dengan transparan dan bahwa pelanggaran ditindak dengan tegas, mereka merasa lebih percaya pada sistem pemilu. Hal ini mendorong partisipasi yang lebih luas, termasuk dari kelompok-kelompok yang sebelumnya enggan terlibat, seperti kaum muda dan masyarakat di daerah terpencil. Peningkatan partisipasi ini tidak hanya memperkuat legitimasi hasil pemilu tetapi juga menunjukkan bahwa masyarakat semakin memahami pentingnya peran mereka dalam demokrasi.

Keberhasilan pengawasan juga terlihat dari bagaimana pengawas mampu mencegah manipulasi suara pada tahap penghitungan. Di Kabupaten Lamongan, penghitungan suara sering menjadi titik rawan terjadinya pelanggaran, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Dengan adanya pengawasan ketat, potensi manipulasi dapat diminimalkan. Pengawas ad hoc memastikan bahwa setiap suara dihitung dengan benar dan bahwa laporan hasil penghitungan sesuai dengan suara yang diberikan di TPS. Transparansi dalam proses penghitungan ini memberikan jaminan tambahan bagi masyarakat bahwa suara mereka benar-benar dihargai dan dihitung secara adil.

Dalam jangka panjang, dampak positif pengawasan pemilu di Kabupaten Lamongan adalah terciptanya pemerintahan yang lebih responsif dan legitimasi politik yang lebih kuat. Pemimpin yang terpilih melalui proses pemilu yang bersih cenderung lebih bertanggung jawab kepada rakyat, karena mereka memahami bahwa legitimasi mereka berasal dari dukungan masyarakat yang diperoleh melalui mekanisme yang adil. Pemerintahan yang responsif dan akuntabel ini menjadi fondasi bagi pembangunan demokrasi yang lebih matang di Lamongan, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penonton tetapi juga bagian aktif dalam proses politik.

Secara keseluruhan, pengawasan pemilu yang dilakukan oleh pengawas ad hoc di Kabupaten Lamongan tidak hanya memperbaiki kualitas pemilu tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi di tingkat lokal. Dengan mencegah pelanggaran, meningkatkan partisipasi, dan membangun kepercayaan publik, pengawasan pemilu menjadi alat yang efektif untuk menciptakan demokrasi yang lebih inklusif, transparan, dan akuntabel. Ke depan, tantangan yang ada harus terus diatasi dengan inovasi dan dukungan yang lebih besar bagi pengawas ad hoc, sehingga kualitas demokrasi di Kabupaten Lamongan dapat terus meningkat.

BAGIAN 6

EVALUASI DAN REKOMENDASI

1. Evaluasi Bawaslu Kabupaten Lamongan

Pemilu 2024 menjadi momen penting dalam sistem demokrasi Indonesia yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat demi masa depan yang lebih baik. Pemilu yang bersih, adil, dan transparan adalah syarat utama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan institusi negara. Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi jalannya pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lamongan memiliki peran strategis dalam memastikan pelaksanaan pemilu sesuai aturan, bebas dari kecurangan, dan dilakukan dengan integritas tinggi. Salah satu elemen kunci dalam pengawasan pemilu adalah keberadaan pengawas ad hoc, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga tempat pemungutan suara (TPS), yang menjadi ujung tombak dalam memantau pelaksanaan pemilu di lapangan.

Meskipun pengawasan pemilu oleh Bawaslu Lamongan telah berjalan dengan cukup baik, berbagai tantangan dan kendala masih memengaruhi efektivitas pengawasan, pencegahan, penindakan, dan penyelenggaraan pemilu, terutama terkait kualitas dan kinerja pengawas ad hoc. Catatan kritis terhadap pelaksanaan pemilu ini mengulas sejumlah tantangan yang dihadapi Bawaslu Lamongan dalam menjalankan tugasnya, khususnya terkait pengawas ad hoc, serta langkah-

langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengawasan pemilu di Kabupaten Lamongan.

Langkah pencegahan pelanggaran menjadi prioritas awal agar pemilu dapat berjalan lancar. Dalam hal ini, Bawaslu Kabupaten Lamongan telah melaksanakan berbagai program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai hak suara, aturan yang berlaku, serta pentingnya partisipasi dalam pengawasan pemilu. Kegiatan pencegahan meliputi penyuluhan kepada pemilih, kampanye sosialisasi, dan pemberian informasi tentang potensi pelanggaran. Harapannya, masyarakat dapat berperan aktif dalam mencegah pelanggaran, baik oleh peserta pemilu maupun penyelenggara.

Namun, meskipun upaya pencegahan sudah dilakukan, keterbatasan jangkauan informasi di daerah-daerah terpencil menjadi tantangan besar. Kabupaten Lamongan, dengan wilayah geografis yang luas dan beragam, menghadirkan kendala dalam penyebaran informasi. Banyak desa yang sulit dijangkau sehingga masyarakat di daerah tersebut kurang mendapatkan informasi tentang proses pemilu dan potensi pelanggaran. Selain itu, pemahaman masyarakat yang masih terbatas tentang pentingnya pengawasan pemilu turut menjadi hambatan dalam membangun budaya partisipasi yang efektif.

Pelanggaran selama masa kampanye menjadi tantangan pengawasan tersendiri. Praktik politik uang (money politics) dan kampanye di luar jadwal sering kali terjadi. Pengawasan terhadap

pelanggaran ini di tingkat desa dan kecamatan kerap menemui kendala karena kurangnya pelatihan dan kapasitas pengawas ad hoc. Selain itu, keterbatasan akses informasi di wilayah terpencil membuat deteksi dan pelaporan pelanggaran menjadi sulit dilakukan secara efektif.

Pengawas ad hoc memegang peran vital dalam memastikan tahapan pemilu berjalan sesuai ketentuan. Pengawas ini mencakup Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Desa/Kelurahan, hingga Pengawas TPS yang bertugas mulai dari pendataan pemilih hingga penghitungan suara. Namun, masalah kualitas pengawas ad hoc menjadi perhatian. Banyak dari mereka kurang memahami aturan teknis pemilu, seperti mendeteksi pelanggaran atau menyusun laporan. Selain itu, potensi penyalahgunaan wewenang oleh pengawas yang memiliki kedekatan dengan calon peserta pemilu dapat memengaruhi objektivitas pengawasan.

Komunikasi antara pengawas ad hoc dengan Bawaslu Kabupaten Lamongan juga menjadi kendala dalam pengawasan yang efektif. Laporan temuan di lapangan sering kali terlambat diterima akibat kendala geografis, keterbatasan infrastruktur, dan hambatan teknis lainnya. Penindakan terhadap pelanggaran pemilu, meskipun penting, sering terhambat oleh kurangnya bukti konkret. Praktik politik uang, misalnya, sulit dibuktikan tanpa kerja sama antara Bawaslu, KPU, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

Tantangan logistik juga memengaruhi kelancaran penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Lamongan, terutama di daerah terpencil. Keterlambatan distribusi logistik pemilu seperti surat suara dan kotak suara dapat mengganggu proses pemungutan suara. Pengawasan di TPS juga menghadapi tantangan besar karena banyaknya aspek yang perlu dipantau, mulai dari kehadiran pemilih hingga penghitungan suara.

Bawaslu Kabupaten Lamongan memiliki peran penting dalam memastikan Pemilu 2024 berjalan sesuai prinsip demokrasi. Tantangan besar yang dihadapi, terutama terkait kualitas pengawas ad hoc, keterbatasan infrastruktur, dan potensi pelanggaran, membutuhkan perhatian serius. Upaya maksimal diperlukan untuk memperbaiki kualitas pengawasan, meningkatkan pelatihan pengawas ad hoc, serta memperkuat kerja sama antara Bawaslu, KPU, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menjaga integritas pemilu.

2. Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lamongan

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu pilar utama demokrasi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Keberhasilan penyelenggaraan Pemilu 2024 sangat ditentukan oleh integritas dan keadilan dalam setiap prosesnya, yang dapat dicapai melalui pengawasan yang efektif dan menyeluruh. Dalam memastikan Pemilu yang bersih, transparan, dan akuntabel, peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sangat penting, terutama dalam mengawasi pengawas ad hoc seperti Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Pengawas Tempat Pemungutan

Suara (PTPS). Bawaslu Kabupaten Lamongan, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan Pemilu di wilayahnya, memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi jalannya Pemilu 2024. Berikut adalah rekomendasi Bawaslu Kabupaten Lamongan terkait pencegahan, pengawasan, penindakan, dan penyelenggaraan Pemilu 2024, khususnya yang melibatkan pengawas ad hoc.

Rekomendasi Pencegahan dalam Proses Pemilu 2024

Langkah pencegahan merupakan upaya awal untuk mengurangi potensi pelanggaran dalam Pemilu. Bawaslu Kabupaten Lamongan merekomendasikan sejumlah langkah pencegahan yang harus diambil oleh semua pihak, khususnya pengawas ad hoc, yang menjadi bagian penting dari sistem pengawasan Pemilu. Pertama, melakukan sosialisasi dan edukasi bagi pengawas ad hoc. Sosialisasi intensif mengenai tugas dan kewajiban pengawas ad hoc harus dilakukan sejak awal. Pengawas ad hoc seperti Panwaslu dan PTPS perlu memahami kode etik, regulasi, serta hak dan kewajiban mereka. Dengan pemahaman yang baik, mereka dapat melaksanakan tugas dengan lebih profesional. Kedua, meningkatkan kompetensi pengawas ad hoc melalui pelatihan dan pendidikan. Kompetensi yang baik dapat membantu pengawas ad hoc mendeteksi pelanggaran secara efektif dan menjalankan tugas dengan optimal. Ketiga, mencegah praktik politik uang dan kampanye hitam. Pengawasan ketat terhadap kegiatan kampanye diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, dan

pengawas ad hoc harus berani melaporkan temuan pelanggaran. Keempat, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dapat meningkatkan transparansi dan meminimalkan potensi kecurangan.

Rekomendasi Pengawasan terhadap Proses Pemilu 2024

Pengawasan menjadi komponen kunci dalam menjaga kualitas Pemilu. Proses ini harus dilakukan secara objektif, independen, dan profesional. Pertama, pengawasan terhadap pemungutan suara di TPS. Pengawas ad hoc harus memastikan seluruh tahapan pemungutan suara berjalan sesuai prosedur, mulai dari pengecekan daftar pemilih hingga pengawasan penggunaan surat suara. Kedua, pengawasan terhadap daftar pemilih tetap (DPT). Pengawas ad hoc harus memastikan DPT bebas dari pemilih ganda dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketiga, pemantauan terhadap kampanye. Pengawasan terhadap berbagai bentuk kampanye, termasuk iklan, pertemuan publik, dan distribusi materi kampanye, harus dilakukan untuk memastikan kampanye berjalan sesuai aturan. Keempat, pengawasan terhadap alat peraga kampanye (APK). Pengawas ad hoc harus memantau pemasangan APK agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi Penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu 2024

Penindakan terhadap pelanggaran Pemilu menjadi langkah penting untuk menjaga integritas. Bawaslu Kabupaten Lamongan memberikan beberapa rekomendasi terkait

penindakan. Pertama, penyelesaian pelanggaran secara profesional. Pengawas ad hoc harus bertindak independen dan transparan dalam menangani pelanggaran, baik administratif maupun pidana. Kedua, tindakan tegas terhadap politik uang. Pengawas ad hoc harus memprioritaskan penanganan kasus politik uang dan segera melaporkan temuan ke pihak berwenang. Ketiga, pemberian sanksi kepada pengawas ad hoc yang melanggar. Jika pengawas ad hoc terbukti melakukan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Lamongan harus segera memberikan sanksi yang sesuai untuk menjaga kredibilitas.

Rekomendasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang Adil dan Transparan

Penyelenggaraan Pemilu yang baik memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pengawas ad hoc. Pertama, memperkuat sinergi antara Bawaslu, KPU, dan pihak terkait lainnya. Kolaborasi ini diperlukan untuk memastikan kelancaran semua tahapan Pemilu. Kedua, menjaga independensi dan objektivitas dalam pengawasan. Pengawas ad hoc harus bebas dari intervensi pihak manapun dan bersikap adil dalam menjalankan tugas. Ketiga, memanfaatkan teknologi dalam pengawasan. Penggunaan teknologi seperti aplikasi pelaporan pelanggaran atau CCTV di TPS dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pengawasan. Dengan penerapan rekomendasi ini, Pemilu 2024 di Kabupaten Lamongan diharapkan dapat berlangsung secara adil, transparan, dan bebas dari kecurangan,

serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjaga kualitas demokrasi.

EPILOG

“Di Balik Layar Pemilu: Perjalanan Pengawas Ad Hoc Kabupaten Lamongan Mengawal Demokrasi”

Pemilu adalah puncak dari semangat demokrasi, sebuah momentum di mana suara setiap individu memiliki arti penting dalam menentukan arah masa depan bangsa. Namun, apa yang tampak di permukaan—suara yang dihitung, kotak suara yang tertutup rapat, hingga hasil akhir yang diumumkan—hanya sebagian kecil dari proses panjang yang terjadi di balik layar. Di balik hiruk-pikuk Pemilu, ada sosok-sosok yang mungkin jarang mendapat sorotan, tetapi memiliki peran vital dalam menjaga keadilan dan integritas proses demokrasi: para pengawas ad hoc.

Buku ini telah membawa pembaca menelusuri cerita mereka—cerita tentang dedikasi, tantangan, dan perjuangan tanpa henti untuk mengawal jalannya Pemilu di Kabupaten Lamongan. Dalam setiap langkah yang mereka ambil, pengawas ad hoc tidak hanya menjadi saksi perjalanan demokrasi, tetapi juga menjadi penjaga dari potensi kecurangan yang bisa merusak kepercayaan rakyat. Mereka berdiri di garis terdepan, di TPS yang tersebar hingga pelosok desa, memastikan bahwa setiap suara dihargai, setiap proses berjalan sesuai aturan, dan keadilan tetap menjadi prinsip utama.

Namun, perjalanan mereka bukan tanpa rintangan. Keterbatasan sumber daya, tantangan geografis, hingga tekanan

dari berbagai pihak menjadi bagian dari dinamika yang harus mereka hadapi. Meskipun begitu, keberadaan mereka adalah bukti nyata bahwa demokrasi tidak pernah berjalan sendirian. Demokrasi membutuhkan penjaga, dan di Kabupaten Lamongan, penjaga itu hadir dalam bentuk para pengawas ad hoc yang bekerja tanpa pamrih, dengan semangat untuk menjaga kepercayaan rakyat terhadap sistem Pemilu.

Dalam setiap tantangan yang mereka hadapi, terlihat betapa besar pengorbanan yang diberikan oleh pengawas ad hoc. Ada yang harus meninggalkan keluarga selama sehari-hari untuk menjalankan tugas, menempuh medan berat untuk mencapai TPS terpencil, hingga bertahan di tengah tekanan dari pihak-pihak tertentu yang mencoba menggoyahkan prinsip mereka. Meskipun pekerjaan mereka sering kali tidak mendapatkan apresiasi yang setimpal, semangat mereka untuk menjaga demokrasi tetap teguh. Pengawas ad hoc adalah simbol dari keberanian dan keikhlasan, yang terus melangkah meski tantangan seolah tiada habisnya.

Cerita-cerita yang tertuang dalam buku ini juga memberikan pelajaran penting bagi kita semua tentang arti tanggung jawab. Demokrasi bukanlah sebuah sistem yang bekerja otomatis. Ia memerlukan manusia-manusia yang berkomitmen untuk menjaganya. Para pengawas ad hoc ini menunjukkan bahwa meskipun peran mereka tidak selalu terlihat, dampak dari kerja keras mereka sangatlah besar. Mereka adalah fondasi dari kepercayaan rakyat terhadap sistem Pemilu, yang jika

rapuh, dapat meruntuhkan seluruh bangunan demokrasi itu sendiri.

Lebih jauh, pengalaman yang tertuang di dalam buku ini mengajarkan bahwa demokrasi bukan hanya soal prosedur, tetapi juga soal nilai. Kejujuran, keadilan, dan keberanian adalah nilai-nilai yang menjadi inti dari tugas pengawas ad hoc. Di balik laporan dan data yang mereka kumpulkan, ada cerita tentang manusia yang menjaga nilai-nilai ini di tengah segala godaan dan tekanan. Nilai-nilai inilah yang membuat demokrasi menjadi lebih dari sekadar sistem; ia menjadi janji bahwa setiap suara memiliki arti, setiap warga negara memiliki hak, dan setiap proses Pemilu adalah wujud penghormatan terhadap prinsip-prinsip tersebut.

Epilog ini menjadi pengingat bahwa pengawasan Pemilu bukan hanya tugas institusi, melainkan tanggung jawab bersama. Melalui dedikasi para pengawas ad hoc, kita belajar bahwa integritas dan keadilan adalah fondasi dari demokrasi yang sehat. Ketika kita mengingat Pemilu 2024 sebagai salah satu tonggak perjalanan demokrasi Indonesia, kita juga harus mengingat mereka yang berjuang di balik layar, tanpa nama besar, tetapi dengan hati besar, demi memastikan suara rakyat tetap dihormati.

Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk terus menjaga dan memperjuangkan demokrasi, bukan hanya dalam setiap Pemilu, tetapi dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, demokrasi adalah milik kita bersama—dan

masa depannya ada di tangan setiap warga negara yang percaya bahwa keadilan dan kejujuran adalah nilai yang tak tergantikan.

Lamongan, Januari 2025

Penulis

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, M. (2018). *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Demokrasi.
- Azhari, M. (2020). *Pengawasan Pemilu: Teori dan Praktik di Lapangan*. Bandung: Alfabeta.
- Basri, H. (2019). *Politik Uang dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Fitriani, E. (2021). *Integritas Pemilu: Kajian Akademik dan Praktis*. Malang: UB Press.
- Haris, S. (2017). *Membangun Demokrasi di Daerah: Pengalaman Pemilu di Indonesia*. Surabaya: Airlangga Press.
- Ichsan, F. (2021). *Teknologi dalam Pemilu: Peluang dan Tantangan*. Jakarta: Gramedia.
- Kusnadi, A. (2016). *Pemilu dan Partisipasi Politik: Teori dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Latif, Y. (2022). *Pemilu dan Demokrasi: Perspektif Indonesia*. Jakarta: Pustaka Media.
- Maulana, D. (2020). *Pengawas Ad Hoc dalam Sistem Pemilu Indonesia*. Semarang: Udinus Press.
- Prasetyo, W. (2018). *Pemilu di Era Digital: Peran Media Sosial*. Yogyakarta: Kanisius.
- Rohman, H. (2021). *Pemilu di Era Reformasi: Tantangan dan Harapan*. Bandung: Pustaka Rakyat.
- Santoso, D. (2017). *Sistem Pemilu dan Demokrasi Lokal*. Malang: UMM Press.

Syahri, M. (2019). *Pemilu di Desa: Kajian Sosio-Politik*. Surabaya: ITS Press.

Wibisono, T. (2020). *Pengawasan Pemilu: Strategi dan Tantangan*. Yogyakarta: Deepublish.

Zulkifli, A. (2022). *Dinamika Politik Lokal dan Pemilu*. Jakarta: Elex Media.

Jurnal

Anwar, F. (2019). "Efektivitas Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu di Kabupaten Lamongan." *Jurnal Demokrasi dan Hukum*, 7(2), 120-135.

Cahyono, R. (2021). "Peran Pengawas Ad Hoc dalam Menjaga Integritas Pemilu." *Jurnal Ilmu Politik Indonesia*, 15(1), 45-59.

Dewi, L. (2020). "Analisis Pelanggaran Pemilu di Tingkat Desa." *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 10(3), 200-215.

Fahmi, S. (2018). "Penggunaan Teknologi dalam Proses Pemilu." *Jurnal Teknologi Informasi dan Pemilu*, 5(2), 90-104.

Gunawan, T. (2022). "Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu." *Jurnal Masyarakat dan Demokrasi*, 9(1), 80-95.

Hidayat, M. (2020). "Pemilu dan Tantangan Pengawasan Ad Hoc." *Jurnal Demokrasi Lokal*, 8(2), 123-140.

Lestari, A. (2022). "Digitalisasi Pengawasan Pemilu." *Jurnal Teknologi Demokrasi*, 11(1), 50-65.

Pranoto, D. (2019). "Efektivitas Sistem Informasi Pemilu." *Jurnal Sistem Informasi dan Politik*, 6(3), 95-110.

Siregar, E. (2021). "Strategi Penindakan Politik Uang." *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 14(4), 300-315.

Widodo, P. (2020). "Peningkatan Kapasitas Pengawas Ad Hoc." *Jurnal Pendidikan Demokrasi*, 7(1), 100-120.

Majalah

Tempo (2024). "Potret Pemilu 2024: Perjalanan Panjang Demokrasi." Edisi Maret 2024.

Gatra (2023). "Integritas Pemilu di Era Digital." Edisi Desember 2023.

Kompas (2023). "Pemilu dan Peran Pengawas Ad Hoc." Edisi Oktober 2023.

The Jakarta Post (2024). "Challenges of Democracy in Local Elections." Edisi Februari 2024.

Media Indonesia (2023). "Pengawas Pemilu: Menjaga Suara Rakyat." Edisi November 2023.

Laporan

Bawaslu Jawa Timur. (2023). *Pemilu 2023: Tantangan Pengawasan di Daerah*. Surabaya: Bawaslu Jawa Timur.

Bawaslu Kabupaten Lamongan. (2023). *Rekapitulasi Temuan Pelanggaran Pemilu 2023*. Lamongan: Bawaslu Lamongan.

Bawaslu RI. (2022). *Laporan Tahunan Pengawasan Pemilu 2022*. Jakarta: Bawaslu RI.

ICW. (2021). *Laporan Kasus Politik Uang Pemilu 2019*. Jakarta: ICW.

Kementerian Dalam Negeri. (2021). *Panduan Pemilu Lokal yang Demokratis*. Jakarta: Kemendagri.

Komisi II DPR RI. (2021). *Evaluasi UU Pemilu dan Pilkada*. Jakarta: Sekretariat DPR RI.

KPU RI. (2023). Laporan Penyelenggaraan Pemilu 2023. Jakarta: KPU RI.

LIPI. (2020). Studi Demokrasi Lokal di Indonesia. Jakarta: LIPI Press.

Transparansi Internasional Indonesia. (2020). Indeks Demokrasi Lokal di Indonesia. Jakarta: TII.

UNDP Indonesia. (2022). Democracy and Election Monitoring in Indonesia. Jakarta: UNDP.

Media Online

Detik.com. (2024). "Mengawal Pemilu dengan Teknologi: Peran Pengawas Ad Hoc."

Kompas.com. (2023). "Tantangan Pengawas Pemilu di Daerah."

CNNIndonesia.com. (2023). "Pemilu 2024: Menjaga Integritas di Tengah Tekanan."

Tirto.id. (2024). "Politik Uang dan Pengawasan Pemilu."

Tempo.co. (2024). "Digitalisasi Pemilu: Solusi atau Masalah Baru?"

BBC.com. (2023). "Elections in Indonesia: The Role of Election Watchdogs."

TheJakartaPost.com. (2023). "Election Oversight: A Key to Democracy."

Republika.co.id. (2024). "Membangun Demokrasi di Tingkat Lokal."

JawaPos.com. (2023). "Pengawas Ad Hoc: Tugas dan Tantangan."

Merdeka.com. (2024). "Peran Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu."

DI BALIK LAYAR PEMILU

Perjalanan Pengawas Ad Hoc Kabupaten Lamongan Mengawal Demokrasi

Di Balik Layar Pemilu mengungkap perjalanan penuh dinamika para pengawas ad hoc Kabupaten Lamongan dalam menjaga tegaknya demokrasi. Buku ini menyajikan kisah-kisah inspiratif dari balik layar pelaksanaan pemilu, mulai dari tantangan di lapangan hingga dedikasi para pengawas dalam memastikan proses berjalan jujur, adil, dan transparan. Dengan sudut pandang yang humanis dan mendalam, karya ini menjadi cerminan perjuangan tanpa pamrih untuk mewujudkan cita-cita demokrasi yang bermartabat. Bacaan ini cocok bagi siapa saja yang ingin memahami lebih jauh peran penting pengawas pemilu dalam menjaga kepercayaan publik dan stabilitas bangsa.

Buku ini menghadirkan rekam jejak para pengawas ad hoc yang menjadi garda terdepan dalam mengawal setiap tahapan pemilu di Kabupaten Lamongan. Di tengah berbagai tantangan seperti tekanan politik, potensi konflik, hingga kompleksitas teknis, mereka tetap berpegang teguh pada prinsip integritas dan profesionalisme. Melalui narasi yang jujur dan mendalam, Di Balik Layar Pemilu menggambarkan betapa pentingnya peran pengawas dalam menjaga kemurnian suara rakyat. Sebuah karya yang tidak hanya mendokumentasikan perjuangan, tetapi juga menginspirasi dedikasi untuk demokrasi yang lebih baik.

Penerbit

UNISDA PRESS
Jl. Airlangga 03 Sukodadi Lamongan
Telp.(0322) 390497
Email: unisdapress@unisda.ac.id